analisis data pokok

Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015

Pusat Data, Statistik dan Informasi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2015

analisis data pokok

Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015

Pusat Data, Statistik dan Informasi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2015

ANALISIS DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015

Naskah :
Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Pengarah :
Dr. Budi Sulistiyo, M.Sc

Penanggung Jawab :
Ismayanti, DFM, DEA

Editor :
1. Rennisca Ray Damanti, S.Pi, MA, M.Eng
2. Mareta Nirmalanti, S.Pi, M.Si

Penyusun :
1. Krisna Fery Rahmantya, S.Si
2. Anggie Destiti Asianto, S.Si
3. Dadang Wibowo, S.Si
4. Tri Wahyuni, S.Kom
5. Walim Abdul Somad, S.Kom

Publikasi :
Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Ukuran Buku :
18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman :
xvi + 170 halaman

ISSN :
9-7725D2-592DDD

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan buku "Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2015" ini dapat diselesaikan. Buku ini menyajikan analisis pembangunan kelautan dan perikanan selama tahun 2010 sampai 2015, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), Produksi Perikanan dan Garam, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTN/NTPi), Angka Konsumsi Ikan Dalam Negeri, Ekspor dan Impor Hasil Perikanan, Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan, Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola, Pulau-Pulau Kecil Termasuk Pulau-Pulau Terluar yang Dikelola, dan Nilai Tambah Perdagangan Komoditi Kelautan dan Perikanan.

Buku Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2015 ini disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta masyarakat luas mengenai hasil pembangunan kelautan dan perikanan untuk kepentingan penetapan kebijakan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi kelautan dan perikanan.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran dari semua pihak akan dijadikan bahan masukan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas dan penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi baik tenaga maupun pikirannya sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Budi Sulistiyo

analisis data pokok

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2015

Daftar Isi

KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		ix
DAFTAR GAMBAR		xv
1	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	4
2	**PDB SUBKATEGORI PERIKANAN**	7
	2.1 Perubahan Tahun Dasar PDB	7
	2.2 PDB Nasional	9
	2.3 PDB Subkategori Perikanan Triwulan III-2015	11
	2.4 PDB Subkategori Perikanan Tahun 2010-2014	15
3	**PDB SATELIT KELAUTAN DAN PERIKANAN**	19
	3.1 Peranan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Perekonomian Nasional	21
	3.2 Laju Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan	24
	3.2.1 Pertumbuhan Perikanan	25
	3.2.2 Pertumbuhan Ekstraksi Garam	26
	3.2.3 Pertumbuhan Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan	28
	3.2.4 Pertumbuhan Konstruksi	29
	3.2.5 Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	32
	3.2.6 Pertumbuhan Jasa Wisata Tirta	33

4	**PRODUKSI PERIKANAN INDONESIA**	**35**
	4.1 Produksi Perikanan Indonesia Tahun 2015	35
	4.1.1 Produksi Perikanan Tangkap	36
	4.1.2 Produksi Perikanan Budidaya	38
	4.2 Produksi Perikanan Indonesia, 2010-2014	41
	4.2.1 Produksi Perikanan Tangkap	44
	4.2.2 Produksi Perikanan Budidaya	51
5	**PRODUKSI GARAM INDONESIA**	**59**
	5.1 Neraca Garam Nasional	59
	5.2 Garam Rakyat	62
	5.3 Nilai Tukar Petambak Garam	66
6	**NILAI TUKAR NELAYAN DAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN**	**69**
	6.1 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	69
	6.2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	72
7	**ANGKA KONSUMSI IKAN DALAM NEGERI**	**75**
	7.1 Penyediaan Ikan Konsumsi	75
	7.2 Angka Konsumsi Ikan	76
8	**EKSPOR DAN IMPOR HASIL PERIKANAN**	**83**
	8.1 Ekspor dan Impor Hasil Perikanan Tahun 2015	83
	8.2 Ekspor dan Impor Hasil Perikanan Tahun 2009 - 2014	88
	8.2.1 Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas	88
	8.2.2 Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi	91
	8.2.3 Ekspor Hasil Perikanan Menurut Negara Tujuan	95
	8.2.4 Impor Hasil Perikanan Menurut Komoditas	98
	8.2.5 Impor Hasil Perikanan Menurut Provinsi	100
	8.2.6 Impor Hasil Perikanan Menurut Negara Asal	102
	8.2.7 Neraca Perdagangan Hasil Perikanan	105

9 KASUS PENOLAKAN EKSPOR HASIL PERIKANAN 107

10 LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN YANG DIKELOLA 111
10.1 Kawasan Konservasi Taman Nasional Laut (TNL) 114
10.2 Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 115
10.3 Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Laut (SML) 117
10.4 Kawasan Konservasi Cagar Alam Laut (CAL) 118
10.5 Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan (TNP) 119
10.6 Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) 119
10.7 Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) 120
10.8 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) 121
10.9 Kawasan Konservasi Suaka Perikanan (SP) 123

11 PULAU-PULAU KECIL, TERMASUK PULAU-PULAU TERLUAR YANG DIKELOLA 125

12 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 129
12.1 Tantangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 130
12.2 Operasi Pengawasan Kapal Penangkapan Ikan 132
12.3 Upaya Pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia 139

13 SURVEI NILAI TAMBAH PERDAGANGAN PASAR KOMODITAS GARAM DAN IKAN 143
13.1 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 144
13.2 Kabupaten Serang, Banten 147
13.3 Kabupaten Sampang, Jawa Timur 148
13.4 Kabupaten Tangerang, Banten 150
13.5 Muara Angke, Jakarta 150
13.6 Kota Bandung, Jawa Barat 152
13.7 Kabupaten Pati, Jawa Tengah 154
13.8 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 156
13.9 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 157

14 KESIMPULAN 159

15 PENUTUP 165

DAFTAR PUSTAKA 167

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Penambahan Klasifikasi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan Tahun Dasar 2010	8
Tabel 2.2	PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, PDB Perikanan, dan PDB Nasional Atas Dasar Berlaku dan Harga Konstan tahun 2010	12
Tabel 2.3	PDB Subkategori Perikanan, 2010-2014	17
Tabel 3.1	Produk Domestik Bruto Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010=100, 2010-2014 (Juta Rupiah)	19
Tabel 3.2	Produk Domestik Bruto Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010=100, 2010-2014 (Juta Rupiah)	20
Tabel 3.3	Peranan PDB Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku terhadap Penciptaan PDB Indonesia Tahun 2010-2014 (Persen)	21
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDB Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan	24
Tabel 4.1	Produksi Perikanan Indonesia Hingga Triwulan III 2014-2015	36
Tabel 4.2	Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Tahun 2015	37

Tabel 4.3	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2015	39
Tabel 4.4	Produksi Perikanan Menurut Jenis Perairan/ Jenis Lahan, 2010-2014	42
Tabel 4.5	Produksi Komoditas Utama Perikanan Tangkap, 2010-2014	47
Tabel 4.6	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi	47
Tabel 4.7	Provinsi dalam Kelompok 1 (Produksi Perikanan Tangkap)	49
Tabel 4.8	Provinsi dalam Kelompok 2 (Produksi Perikanan Tangkap)	50
Tabel 4.9	Provinsi dalam Kelompok 3 (Produksi Perikanan Tangkap)	50
Tabel 4.10	Provinsi dalam Kelompok 4 (Produksi Perikanan Tangkap)	51
Tabel 4.11	Statistik Perikanan Budidaya, 2010-2014	52
Tabel 4.12	Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas, 2010-2014	54
Tabel 4.13	Produksi Perikanan Budidaya menurut Provinsi, 2010-2014	55
Tabel 4.14	Provinsi dalam Kelompok 1 (Produksi Perikanan Budidaya)	56
Tabel 4.15	Provinsi dalam Kelompok 2 (Produksi Perikanan Budidaya)	57
Tabel 4.16	Provinsi dalam Kelompok 3 (Produksi Perikanan Budidaya)	57
Tabel 5.1	Neraca Garam Nasional Tahun 2011-2014	60
Tabel 5.2	Produksi Tambak Garam Rakyat, 2011-2015	62
Tabel 5.3	Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2015	64
Tabel 7.1	Penyediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Angka Konsumsi Ikan, 2010-2014	74

Tabel 7.2	Perbandingan Produksi Ikan sebagai Sumber Protein Hewani dibandingan Produk Lainnya (Ton)	76
Tabel 7.3	Perbandingan Kandungan Omega 3 Ikan dengan Daging Lainnya	76
Tabel 7.4	Konsumsi Ikan Menurut Provinsi, 2010-2014 (kg/kap/tahun)	78
Tabel 8.1	Perbandingan Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015 dan 2014	84
Tabel 8.2	Perbandingan Impor Hasil Perikanan Tahun 2015 dan 2014	84
Tabel 8.3	Peranan Ekspor Hasil Perikanan Terhadap Ekspor Produk Non Migas 2015	85
Tabel 8.4	Peranan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Negara Tujuan 2015	85
Tabel 8.5	Peranan Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Negara Tujuan 2015	86
Tabel 8.6	Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Komoditi Utama, 2009-2014	88
Tabel 8.7	Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Provinsi, 2009-2014	92
Tabel 8.8	Volume Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2009-2014	94
Tabel 8.9	Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Komoditi Utama, 2009-2014	97
Tabel 8.10	Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Provinsi, 2009-2014	99
Tabel 8.11	Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Negara Asal, 2009-2014	102

Tabel 8.12	Neraca Perdagangan Hasil Perikanan Indonesia Periode, 2009-2014	103
Tabel 9.1	Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan oleh Negara Mitra Tahun 2011-2015	106
Tabel 10.1	Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Tahun 2015	110
Tabel 10.2	Jumlah Kawasan Konservasi Taman Nasional Laut Tahun 2015	102
Tabel 10.3	Jumlah Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Tahun 2015	114
Tabel 10.4	Jumlah Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Laut Tahun 2015	115
Tabel 10.5	Jumlah Kawasan Konservasi Cagar Alam Laut Tahun 2015	116
Tabel 10.6	Jumlah Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Tahun 2015	117
Tabel 10.7	Jumlah Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Tahun 2015	117
Tabel 10.8	Jumlah Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Tahun 2015	118
Tabel 10.9	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahun 2015	119
Tabel 10.10	Jumlah Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Tahun 2015	121
Tabel 11.1	Target dan Capaian IKU Jumlah Pulau-Pulau Kecil, termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Dikelola	123
Tabel 11.2	Perkembangan Jumlah Pulau-Pulau Kecil, Termasuk Pulau Kecil Terluar Yang Dikelola	124
Tabel 11.3	Daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Yang Menjadi Capaian Indikator Kinerja Jumlah PPKT Yang Difasilitasi Pengembangan Ekonominya (Pulau) Tahun 2015	125

Tabel 12.1	Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas, Pemeriksaan, Penangkapan dan Jumlah Kapal Pengawas Tahun 2009 s.d. 2015	134
Tabel 12.2	Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera Kebangsaan Kapal	135
Tabel 13.1	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Garam di Kabupaten Indramayu (bulanan)	144
Tabel 13.2	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di Kabupaten Indramayu (harian)	144
Tabel 13.3	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di PPN Karangantu, Serang (bulanan)	146
Tabel 13.4	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Garam di Kabupaten Sampang (bulanan)	147
Tabel 13.5	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di Kabupaten Tangerang	148
Tabel 13.6	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di PPS Nizam Zachman (bulanan)	150
Tabel 13.7	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di Pasar Sederhana dan Pasar Ciroyom (harian)	152
Tabel 13.8	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Garam di Desa Ketitang Wetan, Kec. Batangan (bulanan)	153
Tabel 13.9	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Hasil Perikanan di TPI Juwana Unit II (bulanan)	154
Tabel 13.10	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di TPI Tegalsari, Tegal (bulanan)	155
Tabel 13.11	Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di Pasar Karangreja, Kabupaten Cirebon (harian)	156

analisis data pokok

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2015

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Triwulan III-2015***	10
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Nasional, Subsektor Perikanan, dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Triwulan III-2015***	14
Gambar 2.3	Pertumbuhan PDB Subkategori Perikanan, PDB Lapangan Usaha Pertanian, kehutanan dan Perikanan dan PDB Nasional, 2011-2014	16
Gambar 4.1	Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Triwulan 1-III 2014-2015	38
Gambar 4.2	Produksi Rumput Laut Triwulan I-III 2014-2015	40
Gambar 4.3	Produksi Komoditas Perikanan Budidaya Triwulan I-III 2014-2015	41
Gambar 4.4	Nilai Produksi Perikanan, 2010-2014	43
Gambar 4.5	Gambar Proporsi Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Perikanan, 2010-2014	43
Gambar 4.6	Nilai Produksi Perikanan Tangkap, 2010-2014	45
Gambar 4.7	Nilai Produksi Perikanan Budidaya, 2010-2014	53
Gambar 5.1	Peta Lokasi PUGAR 2015	62
Gambar 6.1	Nilai Tukar Nelayan Nasional 2015	68

Gambar 6.2	Rata-Rata NTN Provinsi Tahun 2015	70
Gambar 6.3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Nasional 2015	71
Gambar 7.1	Penyediaan Ikan dan Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun), 2010-2014	75
Gambar 7.2	Perincian Pengeluaran Perkapita dalam Setahun (Rupiah)	77
Gambar 8.1	Neraca Perdagangan Hasil Perikanan Tahun 2009-2014	104
Gambar 8.2	Neraca Perdagangan Komoditas Utama Hasil Perikanan Tahun 2014	104
Gambar 10.1	Peta Lokasi dan Status KKPN Yang Dikelola Ditjen PRL Tahun 2015	111
Gambar 10.2	Presentase Luas Kawasan Taman Nasional Laut Terhadap Total Luas Kawasan TNL Tahun 2015	113
Gambar 10.3	Presentase Luas Kawasan Taman Wisata Alam Laut Terhadap Total Luas Kawasan TWAL Tahun 2015	114
Gambar 10.4	Presentase Luas Kawasan Suaka Margasatwa Laut Terhadap Total Luas Kawasan SML Tahun 2015	115
Gambar 10.5	Presentase Luas Kawasan Konservasi Cagar Alam Laut Terhadap Total Luas Kawasan CAL Tahun 2015	116
Gambar 10.6	Gambar Presentase Luas Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Terhadap Total Luas Kawasan TWP Tahun 2015	119
Gambar 10.7	Presentase Luas Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Terhadap Total Luas Kawasan SP Tahun 2015	121
Gambar 11.1	Jumlah Pulau-Pulau Kecil, Termasuk Pulau Kecil Terluar Yang Dikelola	124
Gambar 12.1	Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas, Kapal yang Diperiksa dan Ditangkap	134
Gambar 12.2	Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera/ Kebangsaan Kapal Tahun 2009 – 2015	136

Pendahuluan 1

Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses secara bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni "Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional", dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sejalan dengan misi pembangunan nasional tersebut, KKP telah menetapkan visi yang selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. **Visi** KKP adalah "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional".

Mandiri mempunyai maksud bahwa Indonesia ke depan dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya

kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. **Maju** mempunyai maksud dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. **Kuat** diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. **Berbasis kepentingan nasional** mempunyai arti optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi **misi** KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan

3. **Kesejahteraan** (***Prosperity***), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. **Keberlanjutan** dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. **Kesejahteraan** mempunyai maksud bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Penjabaran misi pembangunan kelautan dan perikanan dapat diturunkan menjadi tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

a. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

b. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan Perikanan;

c. **Kesejahteraan** (***Prosperity***), yakni :

6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Implementasi terhadap visi, misi, dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut diterjemahkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I Lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Buku analisis ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan

untuk penetapan kebijakan (*Decision Support System*) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja sektor kelautan dan perikanan.

Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu tugas dan fungsi Pusat Data, Statistik dan Informasi. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi salah satu penopang kebijakan pembangunan perekonomian nasional yang berpihak pada penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan pada sektor Kelautan dan Perikanan. Hal ini dimungkinkan karena Pusdatin memiliki data dan statistik yang mencakup dari hulu ke hilir yang terdiri dari: data potensi sumber daya ikan; pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola; luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan; produksi hasil perikanan berdasarkan aktifitas perikanan tangkap, budidaya, dan garam; pengolahan hasil perikanan; pemasaran hasil kelautan dan perikanan (ekspor dan impor); konsumsi ikan; pelaku usaha; sarana dan prasarana; sumberdaya manusia kelautan dan perikanan; pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; dukungan hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; serta teknologi informasi yang mendukung ketersediaan data dan statistik kelautan dan perikanan.

Begitu pentingnya analisis data dan statistik kelautan dan perikanan sehingga KKP dituntut untuk dapat menerbitkan data dan statistik kelautan dan perikanan dengan terus melakukan penyempurnaan pengelolaan data dan statistik yang meliputi metodologi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta peningkatan capability sumberdaya manusia bidang statistik.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan analisis data kelautan dan perikanan adalah :

a. tersedianya analisis data kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan investor akan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir serta dilengkapi analisis data tersebut;

b. analisis dari data dan statistik diharapkan menjadi salah satu acuan untuk penetapan kebijakan (*Decision Support System*) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja sektor kelautan dan perikanan; dan

c. hasil analisis data statistik merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan.

PDB Sub Kategori Perikanan 2

2 PDB
Sub kategori Perikanan

2.1 Perubahan Tahun Dasar PDB

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu lapangan usaha/sektor/subsektor tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu lapangan usaha/sektor/subsektor pada suatu periode waktu tertentu.

PDB dibagi menjadi 2 (dua) yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perubahan tahun dasar PDB dengan menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 telah diberitakan oleh BPS melalui Berita Resmi Statistik pada tanggal 5 Februari 2015 No.17/02/Th.XVIII bahwa *Release* PDB Tahun 2014 dan selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 berbasis *System of National Account* (SNA) 2008. Penghitungan PDB dengan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 melalui kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Dengan adanya perubahan tahun dasar dan implementasi SNA 2008 tersebut, terjadi perubahan klasifikasi PDB menurut lapangan usaha. Lapangan usaha yang tadinya dibagi menjadi 9, sekarang bertambah menjadi 17 lapangan usaha seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel2.1 Penambahan Klasifikasi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan Tahun Dasar 2010

No	PDB Tahun Dasar 2000	No	PDB Tahun Dasar 2010
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.	Pertambangan dan Penggalian
3.	Industri Pengolahan	3.	Industri Pengolahan
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	4.	Pengadaan Listrik dan Gas
5.	Konstruksi	5.	Pengadaan Air
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.	Konstruksi
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
8.	Keuangan, Real Estate, dan Jasa Keuangan	8.	Transportasi dan Pergudangan
9.	Jasa-jasa	9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		10.	Informasi dan Komunikasi
		11.	Jasa Keuangan
		12.	Real Estate
		13.	Jasa Perusahaan
		14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
		15.	Jasa Pendidikan
		16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
		17.	Jasa Lainnya

Lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan pada PDB dengan tahun dasar 2000 dibagi menjadi 5 (lima) sektor yaitu: Tanaman Bahan Makanan; Tanaman Perkebunan; Peternakan dan Hasil-hasilnya; Kehutanan; dan Perikanan. Namun pada PDB dengan tahun dasar 2010 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang dirinci lagi menjadi 6 (enam) subkategori (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura Semusim, Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perkebunan); 2) Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan 3) Perikanan.

Tahun dasar PDB perlu diubah karena beberapa hal berikut, yaitu: (a) Pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam 10 tahun terakhir; (b) Rekomendasi PBB untuk mengimplementasikan *System of*

National Accounts 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB melalui kerangka *Supply and Use Tables* (SUT); dan (c) Menjaga konsistensi antara 3 pendekatan PDB dan memperkecil perbedaan antara PDB nasional dan PDRB.

Manfaat dari perubahan tahun dasar tersebut adalah memberikan gambaran perekonomian nasional terkini yaitu pergeseran struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas PDB yang dihasilkan, dan menjadikan data PDB dapat diperbandingkan secara internasional. Dipilihnya tahun dasar 2010 untuk menggantikan tahun dasar 2000 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Perekonomian Indonesia relatif stabil;
b. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 tahun terakhir, terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
c. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 atau 10 Tahun sekali;
d. Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
e. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen; dan
f. Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking* / menetapkan PDB.

2.2 PDB Nasional

PDB Nasional pada triwulan III-2015 berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.311,21 triliun, sedangkan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 2.982,56 triliun. Pertumbuhan PDB nasional atas dasar harga konstan 2010 pada triwulan III-2015 dibanding triwulan II-2015 (*q-to-q*) sebesar 3,21 persen. Laju pertumbuhan PDB triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 sebesar 4,73 persen (*y-on-y*). Secara kumulatif pertumbuhan PDB nasional triwulan I

sampai dengan triwulan III-2015 dibandingkan periode yang sama tahun 2014 (*c-to-c*) tumbuh sebesar 4,71 persen. Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia dari triwulan dan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. PDB Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2011 – 2014 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,70 persen berdasarkan harga konstan 2010.

Berikut merupakan laju pertumbuhan dari semua lapangan usaha pada triwulan III-2015.

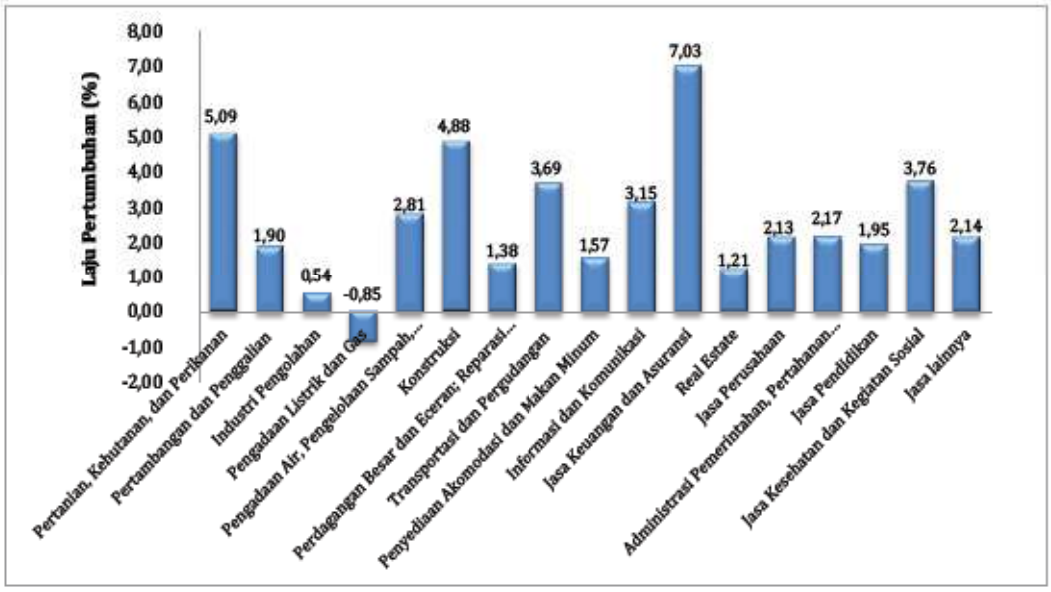

Keterangan: ***) Angka sangat sangat sementara

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Triwulan III-2015***

Dari grafik di atas terlihat semua sektor mengalami peningkatan kecuali lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan sebesar 0,85 persen, dengan laju tertinggi pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,09 persen.

Lapangan usaha pemberi kontribusi terbesar pada PDB nasional di triwulan III-2015 adalah Industri Pengolahan sebesar 20,41 persen dengan nilai Rp.608,63 triliun; kontribusi terbesar kedua pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,57 persen dengan nilai Rp.434,48 triliun; dan kontribusi terbesar ketiga adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,09 persen dengan nilai Rp.390,50 triliun.

Lapangan usaha yang memberikan kontribusinya ke PDB nasional sebagian besar mengalami peningkatan peranan pada triwulan III-2015 dibandingkan triwulan III-2014. Berikut adalah lapangan usaha yang mengalami peningkatan: Pertanian, Kehutanan dan Pertanian dari 14,43 persen menjadi 14,57 persen; Pengadaan Listrik dan Gas dari 1,02 persen menjadi 1,10 persen; Kontruksi dari 9,69 persen menjadi 9,96 persen; Transportasi dan Pergudangan dari 4,27 persen menjadi 4,92 persen; Informasi dan Komunikasi dari 3,40 persen menjadi 3,47 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi dari 3,73 persen menjadi 3,98 persen; Real Estate dari 2,72 persen menjadi 2,79 persen; Jasa Perusahaan dari 1,54 persen menjadi 1,63 persen; Jasa Pendidikan dari 3,31 persen menjadi 3,45 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dari 1,04 persen menjadi 1,06 persen; dan Jasa lainnya dari 1,50 persen menjadi 1,63 persen. Dengan peningkatan peran terbesar yaitu Transportasi dan Pergudangan meningkat sebesar 15,33 persen dari triwulan III-2014 ke triwulan III-2015.

2.3 PDB Subkategori Perikanan Triwulan III-2015

PDB masih dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja, baik ditingkat nasional, sektor maupun subsektor. Kementerian Kelautan dan Perikanan memakai angka PDB subkategori perikanan sebagai ukuran kinerja, jika angka PDB subkategori perikanan meningkat ataupun melambat maka hal tersebut dapat dijadikan patokan sebagai evaluasi kinerja Kementerian.

Tabel22 PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, PDB Perikanan, dan PDB Nasional Atas Dasar Berlaku dan Harga Konstan tahun 2010

Satuan: Triliun Rupiah

	Lapangan Usaha	Tahun 2015 ***			Jumlah I s.d. III
		I	II	III	
Harga Berlaku	**Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**375,18**	**411,49**	**434,48**	**1.221,15**
	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	290,55	320,09	340,62	951,26
	a. Tanaman Pangan	116,65	109,02	112,27	337,94
	b. Tanaman Hortikultura	40,79	46,61	47,51	134,91
	c. Tanaman Perkebunan	83,36	113,63	126,96	323,94
	d. Peternakan	44,05	44,87	47,49	136,41
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	5,70	5,96	6,40	18,06
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	17,66	22,13	20,50	60,28
	Perikanan	**66,97**	**69,27**	**73,36**	**209,60**
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	**2.726,48**	**2.865,25**	**2.982,56**	**8.574,29**
	Presentase PDB Perikanan:				
	Presentase terhadap Pertanian, Kehutanan dan	17,85	16,83	16,88	
	Presentase terhadap PDB Nasional	2,46	2,42	2,46	
Harga Konstan 2010	**Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**283,00**	**312,02**	**327,92**	**922,94**
	- Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	220,85	245,53	261,30	727,68
	a. Tanaman Pangan	82,90	77,86	77,81	238,57
	b. Tanaman Hortikultura	30,07	34,17	34,40	98,64
	c. Tanaman Perkebunan	70,11	95,19	109,56	274,87
	d. Peternakan	33,31	33,68	34,61	101,61
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	4,45	4,62	4,92	13,99
	- Kehutanan dan Penebangan Kayu	13,38	16,37	15,00	44,75
	- Perikanan	**48,77**	**50,12**	**51,62**	**150,51**
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	**2.157,66**	**2.239,31**	**2.311,21**	**6.708,18**
	Pertumbuhan PDB (y-on-y):				
	Subkategori Perikanan	**8,45**	**7,17**	**8,37**	
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,00	6,79	3,21	
	PDB Nasional	4,72	4,67	4,73	

Sumber: BPS, data tahun 2015***

Keterangan: ***) Angka sangat sangat sementara

Capaian PDB subkategori perikanan pada triwulan III-2015 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 73,36 triliun meningkat 5,90 persen dibanding triwulan II-2015 sebesar Rp 69,27 triliun. Sedangkan PDB subkategori perikanan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 50,12 triliun di triwulan II-2015 dan meningkat di triwulan III-2015 sebesar 2,99 persen menjadi Rp 51,62 triliun. PDB subkategori perikanan sampai dengan triwulan III-2015 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 209,60 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 150,51 triliun rupiah.

Laju pertumbuhan PDB subkategori perikanan menurut harga konstan 2010 dari triwulan I-2015 mengalami perlambatan sebesar 2,98 persen bila dibandingkan triwulan IV-2014, hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan. Untuk triwulan I-III PDB subkategori perikanan selalu mengalami kenaikan yang berarti terjadi kenaikan volume baik produksi maupun jasa di subkategori perikanan, dengan kenaikan rata-rata sebesar 2,88 persen. Pada triwulan I-2015 mengalami kenaikan sebesar 2,78 persen ke triwulan II-2015, dan dari triwulan II-2015 ke triwulan III-2015 mengalami kenaikan sebesar 2,99 persen.

Secara kumulatif besaran PDB subkategori perikanan hingga triwulan III-2015 bila dibandingkan dengan PDB pada periode yang sama tahun 2014 (*c-to-c*) tumbuh sebesar 7,99 persen. Laju kumulatif PDB subkategori perikanan tersebut merupakan laju kumulatif tertinggi bila dibandingkan dengan sektor lain yang berada di bawah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu: Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar 4,20 persen dan Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 1,06 persen. Untuk laju kumulatif PDB nasional pada periode yang sama hanya sebesar 4,71 persen, berada dibawah laju kumulatif PDB Perikanan.

Pada triwulan III-2015, kontribusi PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku sebesar 14,57 persen. Di dalam lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kontribusi terbesar diperoleh dari sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar 11,42 persen. Dalam kelompok sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terdapat 5 subsektor yang berkontribusi, yaitu tanaman pangan (3,76 persen); tanaman holtikultura (3,76 persen); tanaman perkebunan (4,26 persen); Peternakan (1,59 persen); dan jasa pertanian dan perburuan (0,21 persen). Kontribusi PDB subkategori perikanan terhadap PDB Nasional sebesar 2,46 persen (Rp.73,36 triliun dibandingkan dengan Rp.2.982,56 triliun). Kontribusi paling rendah untuk sektor di bawah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan III-2015 adalah Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 0,69 persen.

Pertumbuhan subsektor Perikanan Indonesia digambarkan oleh pertumbuhan PDB subkategori perikanan atas dasar harga konstan 2010. Gambar dibawah menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan PDB nasional, subkategori perikanan dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan III-2015.

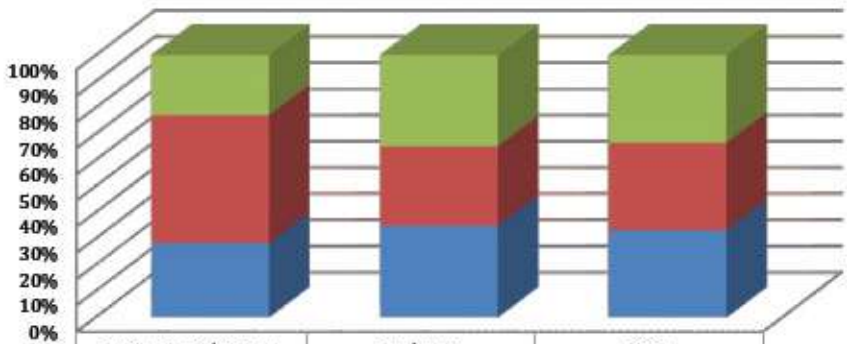

	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perikanan	PDB
III	3,21	8,37	4,73
II	6,79	7,17	4,67
I	4,00	8,45	4,72

Keterangan: ***)Angka sangat sangat sementara

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDB Nasional, Subsektor Perikanan, dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Triwulan III-2015***

Pertumbuhan PDB subkategori perikanan pada triwulan III-2015 sebesar 8,37 persen. Pertumbuhan PDB subkategori perikanan tersebut merupakan pertumbuhan PDB yang paling besar bila dibandingkan dengan PDB kategori maupun subkategori lain pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu: Kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (2,60 persen), dengan didalamnya terdapat subkategori tanaman pangan (1,06 persen); subkategori tanaman hortikultura (3,97 persen); subkategori perkebunan (2,93 persen); subkategori peternakan (3,68 persen); dan subkategori jasa pertanian dan perburuan (3,17 persen), kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu dengan laju pertumbuhan yang melambat sebesar 2,72 persen

dibanding triwulan III-2014. Sementara itu, pertumbuhan PDB nasional relatif kecil apabila dibandingkan PDB subkategori perikanan pada triwulan III-2014 yaitu sebesar 4,73 persen.

Laju pertumbuhan perikanan yang terjadi di triwulan III-2015 disebabkan oleh naiknya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya hingga triwulan III-2015. Untuk produksi tangkap mencapai angka sebesar 4,72 juta ton atau naik sebesar 5,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan produksi perikanan budidaya mencapai produksi sebesar 10,07 juta ton atau meningkat sebesar 3,98 persen. Meningkatnya produksi budidaya dipengaruhi oleh melimpahnya produksi rumput laut akibat musim kemarau yang berkepanjangan, selain itu juga dipengaruhi adanya diversifikasi komoditas, seperti udang vaname yang dibudidayakan di Keramba Jaring Apung (KJA) laut serta perluasan *demonstration farming* (denfarm) ke komoditas kekerangan.

2.4 PDB Subkategori Perikanan Tahun 2010-2014

PDB subkategori perikanan atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar Rp 210,67 triliun meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 247,09 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2013 sebesar Rp 176,15 triliun meningkat di tahun 2014 menjadi Rp 189,64 triliun.

Kenaikan rata-rata PDB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2010-2014 atas dasar harga berlaku sebesar 10,21 persen dari capaian Rp. 956,12 triliun menjadi Rp. 1.410,66 triliun. Jika dibandingkan dengan subkategori Perikanan pada periode yang sama, kenaikan rata-rata subkategori perikanan berada di atas lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut sebesar 14,55 persen dengan capaian Rp. 143,56 triliun menjadi Rp. 247,09 triliun. Pertumbuhan PDB nasional juga mengalami peningkatan pada periode waktu yang sama, dengan capaian sebesar Rp. 6.864,13 triliun menjadi Rp. 10.542,69 triliun.

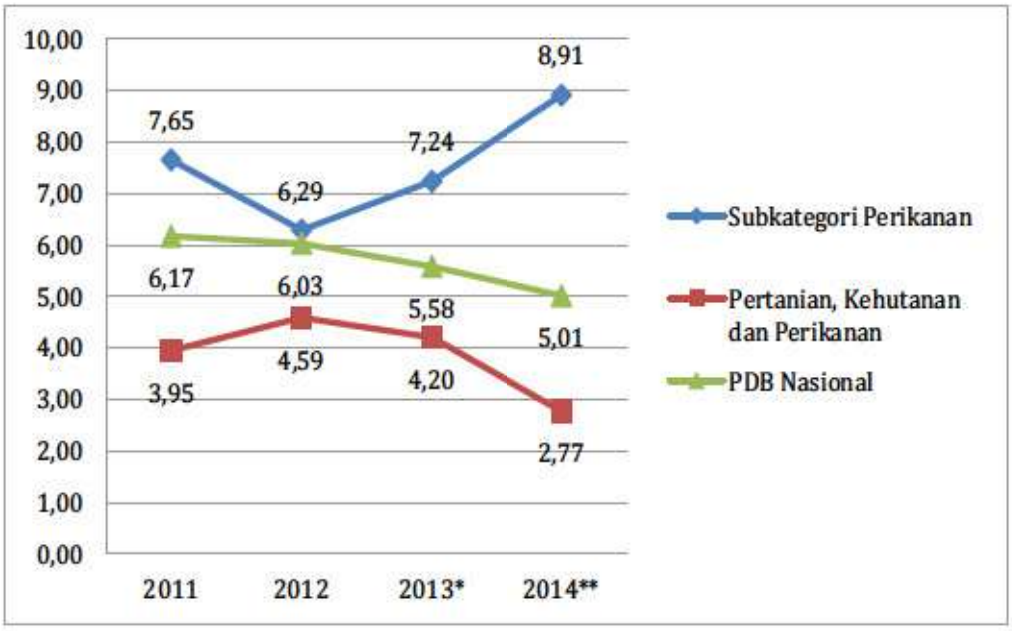

Gambar2.3 Pertumbuhan PDB Subkategori Perikanan, PDB Lapangan Usaha Pertanian, kehutanan dan Perikanan dan PDB Nasional, 2011-2014

Dilihat dari gambar di atas, PDB subkategori perikanan mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi dari tahun 2011 – 2014, kecuali pada tahun 2012 yang sedikit mengalami perlambatan. Sedangkan laju pertumbuhan PDB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan PDB nasional mengalami perlambatan dalam 2 tahun terakhir.

Pada tahun 2010 s.d. 2014 PDB subkategori perikanan mempunyai kontribusi yang terus meningkat terhadap PDB nasional. Untuk tahun 2013 kontribusi dari subkategori perikanan sebesar 2,21 persen, naik pada tahun 2014 menjadi 2,34 persen, yang berarti meningkatnya peranan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya untuk meningkatkan PDB subkategori perikanan, antara lain dapat dilakukan dengan: peningkatan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya; peningkatan mutu hasil perikanan dan produk olahan turunannya; kemudahan investasi dalam melakukan usaha perikanan; peningkatan peran

stakeholder perikanan dalam perluasan pasar. Lebih dari itu proses penghitungan PDB subkategori Perikanan antara lain berdasarkan banyaknya klasifikasi baku lapangan usaha bidang perikanan yang dilakukan dan dipastikan sektor usaha itu menjadi binaan KKP.

Tabel 2.3 PDB Subkategori Perikanan, 2010-2014

Satuan: Triliun Rupiah

	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013*	2014**
Harga Berlaku	**Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**956,12**	**1.058,25**	**1.152,26**	**1.275,05**	**1.410,66**
	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	754,43	832,51	902,13	994,78	1.088,94
	a. Tanaman Pangan	253,33	270,98	305,67	332,11	343,95
	b. Tanaman Hortikultura	110,40	125,29	125,11	137,37	159,52
	c. Tanaman Perkebunan	268,21	303,40	323,36	358,17	397,90
	d. Peternakan	108,40	117,26	130,61	147,98	167,08
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	14,11	15,59	17,37	19,14	20,50
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	58,13	62,25	65,88	69,60	74,62
	Perikanan	**143,56**	**163,48**	**184,25**	**210,67**	**247,09**
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	**6.864,13**	**7.831,73**	**8.615,70**	**9.524,74**	**10.542,69**
	Presentase PDB Perikanan:					
	Presentase terhadap Pertanian, Kehutanan dan	15,01	15,45	15,99	16,52	17,52
	Presentase terhadap PDB Nasional	2,09	2,09	2,14	2,21	2,34
Harga Konstan 2010	**Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**956,12**	**993,86**	**1.039,44**	**1.083,14**	**1.128,45**
	- Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	754,43	780,58	816,30	847,76	879,23
	a. Tanaman Pangan	253,33	250,79	263,08	268,27	268,92
	b. Tanaman Hortikultura	110,40	120,08	117,42	118,21	123,16
	c. Tanaman Perkebunan	268,21	281,47	301,02	319,53	338,15
	d. Peternakan	108,40	113,60	119,25	125,30	132,12
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	14,11	14,65	15,53	16,45	16,88
	- Kehutanan dan Penebangan Kayu	58,13	58,73	58,87	59,23	59,57
	- Perikanan	**143,56**	**154,55**	**164,26**	**176,15**	**189,64**
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	**6.864,13**	**7.287,64**	**7.727,08**	**8.158,19**	**8.568,12**
	Pertumbuhan PDB (y-on-y):					
	Subsektor Perikanan	**-**	**7,65**	**6,29**	**7,24**	**8,91**
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	3,95	4,59	4,20	2,77
	PDB Nasional	-	6,17	6,03	5,58	5,01

Sumber: BPS, 2015 triwulan III

Keterangan:

*) : Angka sementara

**): Angka sangat sementara

PDB Satelit Kelautan dan Perikanan 3

3 PDB Satelit Kelautan dan Perikanan

Untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi nasional maupun menurut lapangan usaha, maka salah satu indikator yang dapat digunakan adalah PDB nominal atau PDB atas dasar harga berlaku. Tabel 3.1 di bawah ini menunjukkan nilai PDB atas dasar harga berlaku yang tercipta di berbagai kegiatan ekonomi yang bergerak di Sektor Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 199,4 triliun dari nilai PDB Indonesia sebesar Rp. 6.864,1 triliun pada periode 2010. Pada tahun 2011, PDB Satelit Kelautan dan Perikanan menjadi sebesar Rp. 227,6 triliun dan meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 255,9 triliun. Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 PDB Satelit Kelautan dan Perikanan mengalami peningkatan masing-masing menjadi Rp. 291,7 triliun dan Rp. 342,7 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai tambah yang terjadi di Sektor Kelautan dan Perikanan terus mengalami peningkatan selama periode 2010-2014.

Tabel3.1 Produk Domestik Bruto Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010=100, 2010-2014 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
I.	**Perikanan**	**143.559.381**	**163.483.947**	**184.254.092**	**210.670.812**	**247.094.248**
	a. Tangkap	78.933.839	86.211.028	92.084.654	101.371.179	113.561.073
	b. Budidaya	64.625.542	77.272.919	92.169.438	109.299.633	133.533.175
II.	**Ekstraksi Garam**	**5.026**	**226.114**	**409 .212**	**213.196**	**435.277**
III.	**Industri Pengolahan Kelautan & Perikanan**	**14.264.513**	**17.185.385**	**18.806.378**	**21.002.330**	**25.036.978**
	a. Industri Besar dan Sedang	10.084.390	11.795.122	12.773.561	14.392.461	17.568.241
	b. Industri Mikro dan Kecil	4.180.123	5.390.263	6.032.817	6.609.870	7.468.737

No	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
IV.	Konstruksi [1)]	N/A	31.338	74.966	208.979	74.357
V.	Perdagangan Besar & Eceran	41.214.405	46.275.315	51.966.846	59.061.493	69.423.952
	a. Hasil Perikanan	31.918.599	35.909.337	40.534.959	46.294.802	54.123.198
	b. Hasil Ekstraksi Garam	635	28.588	52.158	27.249	55.901
	c. Hasil Pengolahan Perikanan	9.295.170	10.337.390	11.379.729	12.739.442	15.244.853
VI.	Jasa Wisata Tirta	338.799	385.140	437.892	499.189	594.694
	PDB SATELIT KELAUTAN DAN PERIKANAN	199.382.122	227.587.238	255.949.387	291.656.000	342.659.507
	PDB INDONESIA	6.864.133.100	7.831.726.000	8.615.705.500	9.524.737.500	10.542.694.500

Keterangan:
*) Angka sementara
**) Angka sangat sangat sementara
[1)] Data konstruksi sebelum tahun 2011 tidak tersedia

Jika dinilai menurut harga konstan tahun 2010, nilai PDB yang tercipta pada tahun 2010 dari berbagai kegiatan ekonomi yang bergerak di Sektor Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 199,4 triliun, dari nilai PDB Indonesia sebesar Rp. 6.864,1 triliun pada periode yang sama. Peningkatan nilai PDB Satelit Kelautan dan Perikanan terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing menjadi sebesar Rp. 214,0 triliun dan Rp. 227,4 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing menjadi Rp. 243,6 triliun dan Rp. 262,0 triliun. Peningkatan yang terjadi pada PDB Satelit Kelautan dan Perikanan atas dasar harga konstan secara eksplisit menunjukkan terjadinya peningkatan volume produksi barang dan jasa pada Sektor Kelautan dan Perikanan. Hal ini karena PDB dihitung dengan harga yang sama dengan harga di tahun dasar atau dianggap tidak terjadi perubahan harga sama sekali. PDB Satelit Kelautan dan Perikanan atas dasar harga konstan 2010 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Produk Domestik Bruto Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010=100, 2010-2014 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
I.	Perikanan	143.559.381	154.545.115	164.264.312	176.149.242	189.643.309
	a. Tangkap	78.933.839	82.675.998	85.712.155	89.490.029	92.622.477
	b. Budidaya	64.625.542	71.869.117	78.552.157	86.659.213	97.020.832
II.	Ekstraksi Garam	5.026	182.82	319.916	169.995	319.209
III.	Industri Pengolahan Kelautan & Perikanan	14.264.513	15.036.134	15.754.907	16.833.302	18.050.753
	a. Industri Besar dan Sedang	10.084.390	10.551.911	11.132.404	11.921.397	12.918.853
	b. Industri Kecil dan Rumah Tangga	4.180.123	4.484.223	4.622.504	4.911.906	5.131.900
IV.	Konstruksi [1)]	N/A	36.97	99.721	215.567	78.521
V.	Perdagangan Besar & Eceran	41.214.405	43.812.678	46.535.695	49.824.281	53.447.269

No	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
	a. Hasil Perikanan	31.918.599	33.990.131	36.238.863	38.853.817	41.704.280
	b. Hasil Ekstraksi Garam	635	23.114	40.776	21.728	40.995
	c. Hasil Pengolahan Perikanan	9.295.170	9.799.433	10.256.056	10.948.736	11.701.994
VI.	**Jasa Wisata Tirta**	**338.799**	**360.975**	**385.247**	**411.909**	**462.718**
	PDB SATELIT KELAUTAN DAN PERIKANAN	**199.382.122**	**213.974.692**	**227.359.799**	**243.604.296**	**262.001.780**
	PDB INDONESIA	**6.864.133.100**	**7.287.635.300**	**7.727.083.400**	**8.158.193.700**	**8.568.115.600**

Keterangan:
*) Angka sementara
**) Angka sangat sangat sementara
1) Data konstruksi sebelum tahun 2011 tidak tersedia

3.1 Peranan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Perekonomian Nasional

Salah satu indikator untuk melihat kinerja suatu lapangan usaha atau bidang pembangunan dalam perekonomian nasional adalah dengan melihat peranannya dalam penciptaan PDB nasional. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa peranan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam penciptaan PDB nasional pada tahun 2010 adalah sebesar 2,90 persen. Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan kontribusi menjadi masing-masing sebesar 2,91 persen dan 2,97 persen. Pada tahun 2013 dan 2014, kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan mengalami peningkatan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni menjadi 3,06 persen dan 3,25 persen.

Tabel33 Peranan PDB Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku terhadap Penciptaan PDB Indonesia Tahun 2010-2014 (Persen)

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
I.	**Perikanan**	**2,09**	**2,09**	**2,14**	**2,21**	**2,34**
	a. Tangkap	1,15	1,10	1,07	1,06	1,08
	b. Budidaya	0,94	0,99	1,07	1,15	1,27
II.	**Ekstraksi Garam**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Industri Pengolahan Kelautan & Perikanan**	**0,21**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,24**
	a. Industri Besar dan Sedang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17
	b. Industri Kecil dan Rumah Tangga	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
IV.	**Konstruksi** [1)]	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Perdagangan Besar & Eceran**	**0,60**	**0,59**	**0,60**	**0,62**	**0,66**
	a. Hasil Perikanan	0,47	0,46	0,47	0,49	0,51
	b. Hasil Ekstraksi Garam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Hasil Pengolahan Perikanan	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
VI.	Jasa Wisata Tirta	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	PDB SATELIT KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,90	2,91	2,97	3,06	3,25
	PDB INDONESIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:
*) Angka sementara
**) Angka sangat sangat sementara
1) Data kontruksi sebelum tahun 2011 tidak tersedia

Bila kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional dilihat secara rinci menurut subkategorinya, maka pada periode 2010-2014 masih didominasi oleh Subkategori Perikanan dengan kontribusi 2,09 sampai 2,34 persen terhadap PDB Indonesia. Usaha perikanan dibedakan menurut jenisnya yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan dengan cara memburu ataupun menangkap ikan dengan menggunakan sarana penangkapan yang dilakukan oleh nelayan ataupun perusahaan penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum seperti sungai, waduk, danau dan rawa. Perikanan budidaya dilakukan melalui pemanfaatan wilayah pesisir pantai yang tenang dan terlindung untuk memelihara komoditas perikanan yang bernilai ekonomis dengan menggunakan teknologi budidaya tertentu. Kegiatan ini dilakukan secara perorangan, kelompok atau perusahaan di laut ataupun melalui proses budidaya yang dilakukan di tambak ataupun di kolam.

Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran yang termasuk dalam Sektor Kelautan dan Perikanan selama periode 2010-2014 memiliki kontribusi 0,60 sampai 0,66 persen terhadap PDB Indonesia. Dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan hasil perikanan, hasil ekstraksi garam dan hasil pengolahan perikanan, tentunya terdapat pihak-pihak yang berperan dalam menyalurkan produk tersebut dari produsen ke konsumen. Pihak tersebut adalah pedagang besar dan pedagang eceran.

Proses penyaluran atau distribusi hasil tangkapan ikan, diawali oleh para nelayan setelah melaut dan tiba di pelabuhan, selanjutnya nelayan menjual ikan hasil tangkapannya dengan cara pelelangan melalui tempat pelelangan ikan

(TPI). Proses pelelangan dilakukan oleh para pedagang pengumpul yang terdapat di TPI tersebut. Proses awal dimulai dari tawar menawar para pedagang pengumpul dan ketika telah menemukan kesepakatan harga yang sesuai, maka nelayan menjual seluruh hasil tangkapan ikan lautnya kepada pedagang pengumpul. Proses distribusi hasil tangkapan ikan, selanjutnya dilakukan oleh pedagang pengumpul kepada pedagang besar. Pedagang besar biasanya menghampiri ke pedagang pengumpul di TPI dan membeli ikan dalam jumlah besar. Ikan yang dibeli oleh pedagang besar dari pedagang pengumpul selanjutnya dijual kepada pedagang pengecer. Pada tahap selanjutnya, pedagang pengecer yang membeli ikan dari pedagang besar menjual ikan daganganya langsung kepada konsumen di pasar.

Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan selama periode 2010-2014 memiliki kontribusi 0,21 sampai 0,24 persen terhadap PDB Indonesia. Pengolahan ikan sangat penting dilakukan karena ikan merupakan komoditas yang tidak tahan lama atau mudah mengalami pembusukan. Untuk itu keberadaan industri perikanan yang dapat mengolah ikan menjadi suatu produk setengah jadi atau produk jadi yang siap dikomsumsi oleh konsumen, menjadi kian penting. Industrialisasi perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sektor Kelautan dan Perikanan.

Subkategori Ekstraksi Garam, Konstruksi dan Jasa Wisata Tirta belum memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Melalui data di atas, terlihat jelas bahwa sebagian besar kegiatan Sektor Kelautan dan Perikanan masih didominasi oleh hasil dari kegiatan primernya. Pemanfaatan potensi perikanan masih belum dapat memberi kekuatan dan peran yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat yang berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan. Semakin bebasnya perdagangan dunia, akan menuntut peningkatan daya saing Sektor Kelautan dan Perikanandi pasar global. Kemampuan bersaing produk di Sektor Kelautan dan Perikanan harus dipahami keterkaitannya dengan sektor hulu dan hilir.

3.2 Laju Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan suatu sektor ekonomi ditandai dengan meningkatnya produksi barang/jasa di sektor tersebut. Dari tabel 3.4 dapat ditunjukkan bahwa ketika ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,17 persen pada tahun 2011, maka Sektor Kelautan dan Perikanan juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 7,32 persen pada tahun yang sama. Ketika perekonomian nasional tumbuh sebesar 6,03 persen pada tahun 2012, Sektor Kelautan dan Perikanan mampu tumbuh sebesar 6,26 persen. Pada saat perekonomian nasional mengalami perlambatan pada tahun 2013 hingga hanya mampu tumbuh sebesar 5,58 persen, Sektor Kelautan dan Perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 7,14 persen dan saat perekonomian nasional tumbuh 5,02 persen pada tahun 2014, Sektor Kelautan dan Perikanan terus mengalami peningkatan pertumbuhan yang mencapai 7,55 persen.

Selain prospek pemasaran hasil produk Sektor Kelautan dan Perikanan yang memang cukup baik, pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan tersebut juga didukung oleh adanya peningkatan konsumsi per kapita dunia untuk ikan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia. Permintaan produk Sektor Kelautan dan Perikanan pada masa yang akan datang, sangat ditentukan oleh jumlah konsumen, pola konsumsi, tingkat pendapatan masyarakat serta tingkat harga yang terjadi di pasar. Pasar domestik tetap merupakan pasar penting produk Sektor Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDB Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
I.	**Perikanan**	**-**	**7,65**	**6,29**	**7,24**	**7,66**
	a. Tangkap	-	4,74	3,67	4,41	3,50
	b. Budidaya	-	11,21	9,30	10,32	11,96
II.	**Ekstraksi Garam**	**-**	**3.537,64**	**74,99**	**-46,86**	**87,78**
III.	**Industri Pengolahan Kelautan & Perikanan**	**-**	**5,41**	**4,78**	**6,84**	**7,23**
	a. Industri Besar dan Sedang	-	4,64	5,50	7,09	8,37
	b. Industri Kecil dan Rumah Tangga	-	7,27	3,08	6,26	4,48

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
IV.	**Konstruksi [1)]**	-	**0,00**	**169,73**	**116,17**	**-63,57**
V.	**Perdagangan Besar & Eceran**	-	**6,30**	**6,22**	**7,07**	**7,27**
	a. Hasil Perikanan	-	6,49	6,62	7,22	7,34
	b. Hasil Ekstraksi Garam	-	3.537,64	76,41	-46,72	88,68
	c. Hasil Pengolahan Perikanan	-	5,42	4,66	6,75	6,88
VI.	**Jasa Wisata Tirta**	-	**6,55**	**6,72**	**6,92**	**12,34**
	PDB SATELIT KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	**7,32**	**6,26**	**7,14**	**7,55**
	PDB INDONESIA	-	**6,17**	**6,03**	**5,58**	**5,02**

Keterangan:
*) Angka sementara
**) Angka sangat sangat sementara
[1)] Data kontruksi sebelum tahun 2011 tidak tersedia

Sektor Kelautan dan Perikanan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat terjadi karena adanya daya dukung berupa: (1) Kapasitas suplainya besar, dengan dukungan permintaan yang terus meningkat; (2) Outputnya berupa ikan dan industri pengolahan perikanan dapat diekspor, pada sisi lain inputnya berasal dari sumber daya domestik; (3) Potensi industri hulu dan hilirnya besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar; serta (4) Produknya memiliki sifat dapat diperbaharui, sehingga mendukung bagi pembangunan yang berkelanjutan.

3.2.1 Pertumbuhan Perikanan

Pertumbuhan Subkategori Perikanan pada tahun 2011 dan 2012 secara berturut-turut sebesar 7,65 persen dan 6,29 persen. Pertumbuhan sebesar itu, didukung oleh adanya pertumbuhan Perikanan Budidaya sebesar 11,21 persen pada tahun 2011 dan 9,30 persen pada tahun 2012. Pada sisi lain, pertumbuhan Perikanan Tangkap pada tahun 2011 sebesar 4,74 persen dan pada tahun 2012 pertumbuhannya mengalami perlambatan menjadi 3,67 persen. Sumberdaya perikanan merupakan salah satu kelompok sumberdaya yang terbarukan (*renewable*), sehingga memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati. Hal ini mengandung makna bahwa apa yang dimanfaatkan saat ini, dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi ketersediaan sumberdaya pada

masa yang akan datang karena jumlah kuantitas fisik dari sumberdaya tersebut mengalami perubahan sepanjang waktu.

Selanjutnya pertumbuhan Subkategori Perikanan pada tahun 2013 dan 2014 secara berturut-turut sebesar 7,24 persen dan 7,66 persen. Bila dilihat lebih jauh pertumbuhan tersebut didukung oleh adanya pertumbuhan Perikanan Budidaya sebesar 10,32 persen pada tahun 2013 dan 11,96 persen pada tahun 2014. Perikanan Tangkap pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 4,41 persen dan pada tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 3,50 persen. Subkategori perikanan memiliki karakteristik yang unik, berbeda dengan sektor yang lainnya sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan tersendiri.

Selain berhadapan dengan sumberdaya yang bergerak, pengelolaan sumberdaya perikanan juga dihadapkan pada masalah hak kepemilikan. Hak kepemilikan dalam perikanan sulit untuk ditentukan, sehingga dalam pemanfaatannya selalu dihadapkan pada eksploitasi yang berlebih yang berakhir pada eksternalitas. Eksternalitas dalam perikanan merupakan dampak dari pemanfaatan yang berlebih, baik untuk konsumsi, produksi, distribusi, maupun industri dari perikanan. Eksternalitas dalam perikanan cenderung ke arah eksternalitas negatif, yakni kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak yang merugikan bagi orang lain.

3.2.2 Pertumbuhan Ekstraksi Garam

Garam menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia, penggunaannya tidak hanya untuk konsumsi manusia melainkan juga sebagai bahan baku bagi industri. Pada tahun 2012, Subkategori Ekstraksi Garam tumbuh sangat tinggi, yaitu 74,99 persen. Akan tetapi pada tahun 2013 Subkategori Ekstraksi Garam mengalami pertumbuhan sebesar negatif 46,86 persen dan pada tahun 2014 pertumbuhannya kembali meningkat yakni mencapai 87,78 persen. Sebagai negara kepulauan yang dikelililingi oleh lautan dan samudera, Indonesia dikenal sebagai penghasil garam yang cukup besar dengan kualitas yang cukup baik. Wilayah Indonesia terdiri dari dua pertiga lautan dalam kondisi normal setiap

tahunnya mengalami iklim kemarau sekitar 6 (enam) bulan dan secara geografis kondisi tersebut merupakan salah satu yang menjadi faktor pendukung produksi garam.

Sejak dahulu kala usaha garam rakyat merupakan mata pencaharian tumpuan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pesisir pantai dan laut. Usaha garam rakyat mempunyai prospek yang cerah pada masa yang akan datang. Permasalahan pergaraman dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaannya. Dari sisi penawaran, pada saat-saat tertentu terdapat kelebihan suplai atau kekurangan suplai, produksi musiman, barang monopolitis atau tidak ada substitusi. Dari sisi permintaan, yaitu permintaannya bersifat berkelanjutan, terus meningkat, in-elastis, serta permintaan yang tersebar dan tidak merata. Selain itu pada saat produksi melimpah, penawaran dihadapkan pada posisi yang lemah, dan sebaliknya sehingga terjadi fluktuasi harga pada setiap tahunnya.

Pengembangan usaha garam rakyat yang dilakukan oleh petani garam, masih tergolong usaha garam rakyat berskala kecil, masih menggunakan teknik produksi garam yang cukup tradisional dengan memanfaatkan sinar matahari, angin dan lainnya. Upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pengembangan jejaring agribisnis pada kelompok petani garam sangat diperlukan. Hal ini disebabkan petani garam masih dalam skala kecil sehingga upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya, tidak dapat dilakukan oleh masing-masing petani garam, namun harus melalui kelompok.

Beberapa keterbatasan sehingga menjadi masalah dalam kehidupan petani garam yang subsisten antara lain: (a) ditinjau dari sisi permodalan kurang mendukung, lemahnya permodalan yang dimiliki menyebabkan kesejahteraan para petani garam sulit meningkat; (b) pengembangan usaha garam rakyat yang dilakukan oleh petani garam masih tergolong usaha berskala kecil, karena masih menggunakan teknik produksi garam yang masih tradisional dengan memanfaatkan sinar matahari, dengan penghasilan yang tidak besar; (c) teknologi masih cukup sederhana menjadikan produksi berkualitas rendah sehingga sangat peka terhadap goncangan pasar.

3.2.3 Pertumbuhan Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan

Pengembangan pada Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan merupakan usaha untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki. Sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Melalui data yang tertera pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa pertumbuhan Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011 mencapai 5,41 persen dan pada tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 4,78 persen. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan secara berturut-turut sebesar 6,84 persen dan 7,23 persen.

Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan yang berbahan baku ikan, perlu dikembangkan sehingga menjadi pendorong bagi perekonomian nasional. Pengembangannya dapat dilakukan dengan cara menghilangkan berbagai penghambat, mengingat potensi sumberdaya yang begitu besar serta pasar yang cukup luas. Pengolahan ikan perlu ditingkatkan baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan harus dikembangkan menjadi makin efisien dan berdaya saing tinggi. Pola produksi di Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan harus berorientasi pada produk yang bernilai tambah tinggi. Persaingan dalam menjual produk yang didasarkan atas sumber daya alam akan semakin meningkat. Oleh karena itu, Indonesia harus beralih menjadi produsen barang-barang industri pengolahan produk ikan yang bermutu tinggi.

Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah produk dari bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi secara mekanik, kimia dan atau mengubah produk dari yang kurang nilainya menjadi produk yang lebih tinggi nilainya dengan maksud mendekatkan produk tersebut kepada konsumen akhir. Pengolahan produk perikanan merupakan industri pengolahan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dari sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga diperoleh nilai manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Kondisi

sumberdaya kelautan dan perikanan yang masih sangat potensial, juga pasar yang relatif cukup besar, menyebabkan Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan masih sangat terbuka lebar untuk dikembangkan di Indonesia.

Pengembangan Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan tidak terlepas ketersediaan bahan baku berupa ikan yang potensinya sangat besar di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pengembangan Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan terkait juga dengan pemasarannya yang menyangkut ekspor hasil perikanan. Dalam rangka memanfaatkan potensi potensi sumberdaya perikanan secara optimal, maka pengembangan Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan perlu diprioritaskan pada berbagai jenis komoditas yang memiliki prospek pemasaran yang cukup baik terutama komoditas ekspor.

Dengan tumbuhnya Subkategori Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan di Indonesia, akan dapat memperluas lapangan kerja serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sehingga para pelaku industri turut menikmati hasil produksi dengan tingkat harga yang layak. Produksi ikan olahan tersebut dihasilkan oleh unit-unit pengolahan ikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Keragaan produksi ikan olahan ini mencakup semua hasil olahan dari semua jenis perlakuan, yaitu: (1) diolah secara tradisional, meliputi: dikeringkan/diasinkan, dipindang, peragian, pengasapan dan lain-lain; (2) pembekuan; (3) pengalengan; dan (4) pembuatan tepung ikan. Pengolahan dengan perlakuan pembekuan, pengalengan, dan pembuatan tepung ikan merupakan bentuk perlakuan pengolahan modern.

3.2.4 Pertumbuhan Konstruksi

Kegiatan Subkategori Konstruksi yang menopang kegiatan perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya merupakan kegiatan strategis yang memainkan peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pada Subkategori Konstruksi yang menopang kegiatan perikanan merupakan usaha untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang

dimiliki. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa pertumbuhan Subkategori Konstruksi yang menopang kegiatan perikanan pada tahun 2012 mencapai 169,73 persen, pada tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 116,17 persen dan pada tahun 2014 pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 63,57 persen. Peran pemerintah dalam mempengaruhi perkembangan Subkategori Konstruksi yang menopang kegiatan perikanan, diwujudkan melalui anggaran yang dikeluarkan baik melalui anggaran pemerintah pusat maupun anggaran pemerintah daerah.

Keberadaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra perikanan tangkap serta saluran irigasi tersier di daerah konsentrasi perikanan budidaya tambak sebagai Subkategori Konstruksi yang menopang kegiatan perikanan, akan semakin menguatkan kegiatan di Subkategori Perikanan. Infrastruktur fisik tersebut menjadi komponen dasar perekonomian dan merupakan salah satu aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di dalam kondisi sektor kelautan dan perikanan yang beragam antar wilayah. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk pembangunan fisik infrastruktur perikanan tersebut akan menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor sehingga infrastruktur perikanan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi termasuk salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi, untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya yang dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan bangunan tersebut terkait dengan kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan. Keberadaan Subkategori Konstruksi yang menopang kegiatan perikanan dalam perekonomian, akan mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan memperlancar perdagangan produk segar maupun ikan olahan.

Seperti halnya pada sektor ekonomi lainnya, pasar konstruksi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh daya beli dari masyarakat dan belanja pemerintah. Daya

beli ini berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi makro Indonesia. Iklim usaha konstruksi yang kondusif sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain melalui dukungan regulasi pemerintah, kebijakan-kebijakan sektoral, good governance, struktur usaha, komposisi besaran *market supply* dan *demand* serta tingkat pertumbuhan ekonomi. Konstruksi menjadi salah satu aktivitas ekonomi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pelabuhan perikanan sebagai salah satu bagian dari aktivitas Subkategori Konstruksi yang menopang kegiatan perikanan, sangat penting peranannya terhadap perikanan laut karena pelabuhan perikanan menjadi tempat pusat pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Peran strategis pelabuhan perikanan dapat digunakan untuk mendorong keberadaan industri perikanan di pelabuhan perikanan. Fungsi utama pelabuhan perikanan adalah berkaitan dengan pelayanan jasa-jasa untuk kapal-kapal yang telah selesai menangkap ikan di daerah penangkapan. Peran pelabuhan perikanan terhadap kapal-kapal penangkapan ikan yaitu terkait dengan fungsinya sebagai tempat yang aman bagi kapal-kapal yang datang untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan. Dalam hal ini pelabuhan menyediakan dermaga, kolam pelabuhan dengan kedalaman yang cukup agar kapal besar dapat bergerak leluasa.

Pelabuhan perikanan juga berperanan penting dalam penanganan hasil tangkapan yang didaratkan. Hasil tangkapan ikan yang didaratkan perlu ditangani secara baik agar mutunya tidak mengalami penurunan. Dengan demikian pelabuhan perikanan hendaknya dapat memberikan jasa-jasanya untuk memberikan penanganan hasil tangkapan. Jasa-jasa tersebut antara lain berupa (a) Penanganan untuk mempertahankan mutu ikan dan memberikan nilai tambah terhadap produksi hasil tangkapan yang didaratkan; (b) Fasilitas pembongkaran secara cepat dan penseleksian ikan secara cermat; (c) Tempat memasarkan ikan yang menguntungkan bagi nelayan maupun pedagang melalui aktivitas pelelangan ikan serta (d) Tempat melakukan pendataan produksi hasil tangkapan yang didaratkan melalui sistem pendataan.

3.2.5 Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

Dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan perikanan, terdapat pihak-pihak yang berperan di dalamnya guna memperlancar proses produksi mereka yang disebut dengan distribusi. Distribusi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu produk dialokasikan sehingga tersedia bagi konsumen akhir. Pihak yang berperan dalam pengalokasian produk yang dihasilkan oleh Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pedagang besar dan eceran. Data pada tabel 3.4 memperlihatkan laju pertumbuhan Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran yang termasuk dalam Sektor Kelautan dan Perikanan. Dengan memperhatikan tabel 3.4 tersebut, dapat diketahui bahwa pertumbuhan Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran yang termasuk dalam Sektor Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011 mencapai 6,30 persen dan pada tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 6,22 persen. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran yang termasuk dalam Sektor Kelautan dan Perikanan secara berturut-turut sebesar 7,07 persen dan 7,27 persen.

Setelah kegiatan usaha di Sektor Kelautan dan Perikanan menghasilkan produk berupa hasil perikanan, hasil ekstraksi garam dan hasil pengolahan perikanan, maka kegiatan pendistribusiannya juga perlu diperhatikan. Masalah yang timbul adalah semakin banyak pedagang yang mendistribusikan hasil dari kegiatan Sektor Kelautan dan Perikanan, maka harga yang diterima oleh para pelaku ekonomi tersebut menjadi rendah sedangkan para konsumen harus membayar dengan harga yang cukup mahal. Perbedaan harga beli dan harga jual antara pelaku ekonomi yang bergerak di Sektor Kelautan dan Perikanan dengan pedagang besar maupun pedagang eceran menunjukkan adanya marjin perdagangan yang diterima oleh para pedagang. Marjin perdagangan yang semakin besar akan menyebabkan persentase bagian yang diterima oleh produsen di Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi semakin kecil.

Panjang-pendeknya mata rantai perdagangan yang harus dilalui oleh suatu produk di Sektor Kelautan dan Perikanan, sangat dipengaruhi: (a) Jarak antara

produsen dan konsumen. Makin jauh jarak antara produsen dan konsumen, maka makin panjang saluran yang ditempuh oleh produk; (b) Cepat tidaknya produk rusak. Produk yang cepat rusak harus segera diterima oleh konsumen. Produk tersebut memerlukan saluran perdagangan yang pendek; (c) Skala produksi. Bila produksi dilakukan dalam skala kecil, maka jumlah produk yang dihasilkan pun berukuran kecil sehingga tidak akan menguntungkan produsen bila langsung dijual ke pasar. Dalam keadaan seperti ini, kehadiran pedagang perantara sangat dibutuhkan, akan tetapi saluran yang akan dilalui produk makin panjang.

Sebelum sampai ke konsumen akhir, produk yang dihasilkan oleh Sektor Kelautan dan Perikanan umumnya melalui beberapa saluran. Pergerakan hasil produk dari produsen ke konsumen pada dasarnya menggambarkan proses pengumpulan maupun penyebaran yang terdiri dari beberapa pihak, antara lain:

a. Produsen yang merupakan penghasil produk kelautan dan perikanan.

b. Pedagang besar sebagai pengumpul dan terkadang produsen berperan ganda menjadi pedagang besar. Penjualan pedagang besar biasanya dalam jumlah yang besar dan umumnya melayani pedagang kecil untuk dijual kembali.

c. Pedagang eceran yang merupakan agen penyalur produk dari pedagang besar ke konsumen.

3.2.6 Pertumbuhan Jasa Wisata Tirta

Pariwisata kini menjadi komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu. Hal ini karena aktivitas berwisata bagi seseorang dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu dan kesehatan kesehatan. Usaha jasa wisata tirta merupakan salah satu aktivitas usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Usaha jasa wisata tirta menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lain yang dikelola secara komersial di perairan air, pantai, sungai, danau dan waduk. Sarana wisata tirta mencakup kegiatan penyediaan pelayanan rekreasi wisata di bawah

air, di pantai, di perairan air, sungai, danau, dan waduk serta pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

Data pada tabel 3.4 memperlihatkan laju pertumbuhan Subkategori Jasa Wisata Tirta selama periode 2011-2014. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan Jasa Wisata Tirta mencapai 6,55 persen dan pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 7,72 persen. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan Jasa Wisata Tirta secara berturut-turut sebesar 6,92 persen dan 12,34 persen. Dengan meningkatnya waktu luang sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan didukung oleh meningkatnya penghasilan masyarakat, aktivitas kepariwisataan semakin meningkat. Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata ini, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata.

Dengan berkembangnya usaha Jasa Wisata Tirta di suatu daerah, mampu mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, baik secara ekonomis, sosial dan budaya. Beberapa contoh usaha Jasa Wisata Tirta diantaranya: (a) Gelanggang renang atau kolam renang; (b) Permandian Alam; (c) Kolam Pemancingan; (d) Usaha Marina; (e) Usaha Wisata Selam dan (f) Usaha Rekreasi Air. Pariwisata telah menjadi salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lainnya.

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Dari sudut ekonomi, kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata.

Produksi Perikanan Indonesia 4

Produksi Perikanan Indonesia 4

4.1 Produksi Perikanan Indonesia Tahun 2015

Produksi perikanan Indonesia hingga triwulan III-2015 (angka sementara) mencapai 14,79 juta ton. Produksi tersebut merupakan kontribusi dari produksi perikanan tangkap mencapai 4,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 10,07 juta ton. Produksi perikanan tangkap dihasilkan dari produksi perikanan tangkap di laut mencapai 4,39 juta ton dan produksi perikanan tangkap di perairan umum mencapai 325 ribu ton.

Produksi perikanan Indonesia dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 (angka sementara) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,26 persen dengan rata-rata produksi sebesar 4,93 juta ton dan standar deviasi sebesar 620 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa produksi perikanan Indonesia secara total mengalami peningkatan dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015. Dengan perincian sebagai berikut: produksi perikanan tangkap dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,36 persen dengan rata-rata produksi sebesar 1,57 juta ton dan standar deviasi sebesar 162 ribu ton, sedangkan produksi perikanan budidaya dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,69 persen dengan rata-rata produksi sebesar 3,35 juta ton dan standar deviasi sebesar 461 ribu ton.

Apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2014, produksi perikanan Indonesia hingga triwulan III tahun 2015 (angka sementara) mengalami peningkatan sebesar 2,36 persen, dengan perincian produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 0,94 persen dan produksi perikananan budidaya juga mengalami peningkatan sebesar 3,98 persen. Perincian tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Produksi Perikanan Indonesia Hingga Triwulan III 2014-2015

Parameter	2014	2015 *	Pertumbuhan (%)
Produksi Perikanan	**14.453.295**	**14.794.174**	**2,36**
Produksi Perikanan Tangkap	**4.764.835**	**4.720.160**	**-0,94**
-. Laut	4.430.104	4.394.970	-0,79
-. Umum	334.731	325.190	-2,85
Produksi Perikanan Budidaya	**9.688.460**	**10.074.014**	**3,98**

Keterangan: *. Angka sementara

4.1.1 Produksi Perikanan Tangkap

Untuk komoditas perikanan tangkap seperti tuna dan tongkol mengalami rata-rata pertumbuhan produksi dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 masing-masing sebesar 27,22 persen dan 19,94 persen dengan rata-rata produksi masing-masing sebesar 79 ribu ton dan 241 ribu ton. Pertumbuhan yang paling sinifikan untuk komoditas tuna adalah albakor, tuna sirip biru dan tuna mata besar. Albakor mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari triwulan I hingga III, hal tersebut ditunjukkan dengan perbandingan nilai standar deviasi produksi dengan nilai rata-rata produksi sebesar 103,36 persen, sedangkan untuk tuna sirip biru dan tuna mata besar ditunjukkan melalui perbandingan nilai standard deviasi produksi dengan nilai rata-rata produksi masing-masing sebesar 68,58 persen dan 18,38 persen.

Pertumbuhan yang paling signifikan untuk komoditas tongkol adalah kenyar, lisong dan tongkol komo. Perbandingan nilai standar deviasi produksi dengan nilai rata-rata produksi untuk kenyar, lisong dan tongkol komo masing-masing sebesar 69,75 persen, 34,84 persen, dan 27,96 persen. Nilai standar

deviasi produksi yang lebih besar dari rata-rata produksi menunjukkan bahwa produksi pada masing-masing triwulan mengalami perubahan yang sangat fluktuatif. Perincian komoditas tersebut terdapat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Tahun 2015

Komoditas	Produksi (Ton)			Pertumbuhan (%)	Rata-rata Produksi (Ton)	Standard Deviasi (Ton)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan I - Triwulan III		
Tuna	**75.590**	**71.150**	**90.520**	**27,22**	**79.087**	**10.147**
-. Albakora	860	1.530	6.420	319,61	2.937	3.035
-. Madidihang	56.620	51.460	59.800	16,21	55.960	4.209
-. Tuna sirip biru	650	170	280	64,71	367	251
-. Tuna mata besar	17.460	17.990	24.020	33,52	19.823	3.644
Tongkol	**219.880**	**228.980**	**274.630**	**19,94**	**241.163**	**29.338**
-. Tongkol krai	49.550	53.030	54.580	2,92	52.387	2.576
-. Tongkol komo	31.990	40.430	55.530	37,35	42.650	11.926
-. Tongkol abu-abu	16.550	16.800	18.230	8,51	17.193	906
-. Cakalang	117.680	112.520	137.560	22,25	122.587	13.221
-. Lisong	3.890	5.970	8.050	34,84	5.970	2.080
-. Kenyar	220	230	680	195,65	377	263

Keterangan: Angka sementara

Produksi perikanan tangkap Indonesia hingga triwulan III tahun 2015 (angka sementara) bila dibandingkan periode yang sama tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dengan perincian produksi perikanan tangkap di laut mengalami penurunan sebesar 0,79 persen dan produksi perikanan tangkap di perairan umum mengalami penurunan sebesar 2,85 persen. Meskipun produksi perikanan tangkap mengalami penurunan namun produksi komoditas utama seperti tuna, tongkol dan cakalang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 15,47 persen, 5,65 persen, dan 15,79 persen. Perincian dapat dilihat dalam gambar 4.1.

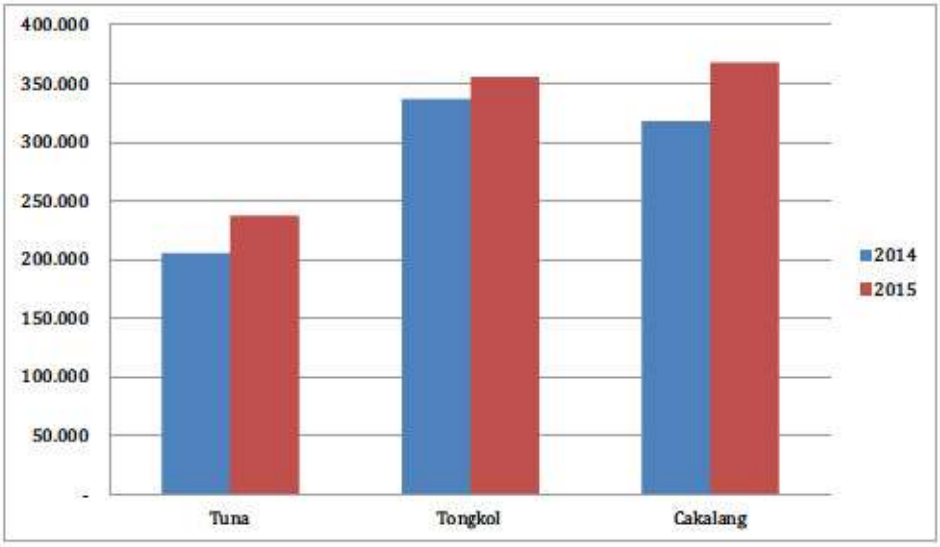

Gambar4.1 Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Triwulan 1-III 2014-2015

4.1.2 Produksi Perikanan Budidaya

Komoditas perikanan budidaya yang mengalami peningkatan pertumbuhan dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 antara lain rumput laut, udang windu, nila, patin, lele, kerapu, tawes, dan nilem. Rumput laut merupakan komoditas yang terus mengalami pertumbuhan produksi dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 16,94 persen dan rata-rata produksi sebesar 2,47 juta ton dengan standar deviasi sebesar 401 ribu ton. Pertumbuhan rumput laut dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 menunjukkan triwulan II mengalami pertumbuhan sebesar 10,22 persen dibanding triwulan I dan triwulan III mengalami pertumbuhan sebesar 23,65 persen dibanding triwulan II. Patin juga merupakan komoditas yang terus mengalami pertumbuhan produksi dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 11,53 persen dan rata-rata produksi sebesar 85 ribu ton dengan standar deviasi sebesar 9,58 ribu ton. Pertumbuhan patin dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 menunjukkan triwulan II mengalami pertumbuhan sebesar 7,42 persen dibanding triwulan I dan triwulan III mengalami pertumbuhan sebesar 15,63 persen dibanding triwulan II.

Untuk udang windu mengalami pertumbuhan produksi dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 22,02 persen dan rata-rata produksi sebesar 26 ribu ton dengan standar deviasi sebesar 7,23 ribu ton, meskipun pada triwulan III mengalami penurunan produksi sebesar 26,90 persen dibandingkan triwulan II. Begitu pula untuk nila dan lele masing-masing mengalami pertumbuhan produksi dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 sebesar 22,75 persen dan 11,53 persen, meskipun pada triwulan III mengalami penurunan produksi masing-masing sebesar 12,30 persen dan 22,02 persen dibandingkan triwulan II.

Produksi perikanan budidaya triwulan III tahun 2015 menunjukkan penurunan produksi pada beberapa komoditas, kecuali rumput laut yang mengalami peningkatan sebesar 23,65 persen. Penurunan produksi pada beberapa komoditas menunjukkan penurunan yang tidak signifikan, seperti nila, patin, lele, ikan mas, gurame dan udang. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai standar deviasi produksi pada masing-masing komoditas, nilai standar deviasi tidak terlalu besar (dibawah 30 persen) menunjukkan bahwa perubahan produksi pada masing-masing triwulan tidak mengalami perubahan yang fluktuatif.

Tabel 4.3 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2015

Komoditas	Produksi (Ton)			Pertumbuhan (%)	Rata-rata Produksi (Ton)	Standard Deviasi (Ton)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan I - Triwulan III		
Total	**2.915.013**	**3.324.450**	**3.834.551**	**14,69**	**3.358.005**	**460.686**
Udang	103.416	122.886	99.035	-0,29	108.446	12.696
-. Windu	20.106	34.370	25.126	22,02	26.534	7.236
-. Vaname	75.100	72.046	63.349	-8,07	70.165	6.097
-. Lainnya	8.210	16.470	10.560	32,36	11.747	4.256
Rumput Laut	2.143.516	2.362.622	2.921.389	16,94	2.475.842	401.105
Nila	149.509	235.944	206.912	22,75	197.455	43.987
Patin	77.281	83.015	95.991	11,53	85.429	9.586
Lele	110.263	160.848	125.428	11,93	132.180	25.959
Mas	80.534	74.094	72.985	-4,75	75.871	4.076
Gurame	22.863	24.121	20.922	-3,88	22.635	1.612
Kakap	1.460	882	903	-18,61	1.082	328
Kerapu	2.678	2.055	4.240	41,55	2.991	1.126
Bandeng	137.111	146.011	131.447	-1,74	138.190	7.342

Komoditas	Produksi (Ton)			Pertumbuhan (%)	Rata-rata Produksi (Ton)	Standard Deviasi (Ton)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan I - Triwulan III		
Bawal Bintang	180	1	1	-59,01	61	103
Kekerangan	10.300	14.426	12.000	11,62	12.242	2.074
Tawes	2.430	7.118	4.500	78,08	4.683	2.350
Nilem	1.220	7.690	4.650	245,41	4.520	3.237
Toman	120	6.072	6.200	2480,87	4.131	3.474
Gabus	1.120	3.877	3.815	122,29	2.937	1.574
Lainnya	71.011	72.789	124.133	36,52	89.311	30.170

Keterangan: Angka sementara

Kondisi yang berbeda dengan produksi perikanan tangkap, bila dibandingkan periode yang sama tahun 2014, produksi perikanan budidaya hingga triwulan III tahun 2015 (angka sementara) mengalami peningkatan sebesar 3,98 persen. Komoditas yang mengalami peningkatan produksi antara lain rumput laut, kekerangan, tawes dan nilem, masing-masing sebesar 10,83 persen, 16,18 persen, 24,83 persen, dan 7,19 persen. Perincian dapat dilihat dalam gambar 4.2 dan 4.3.

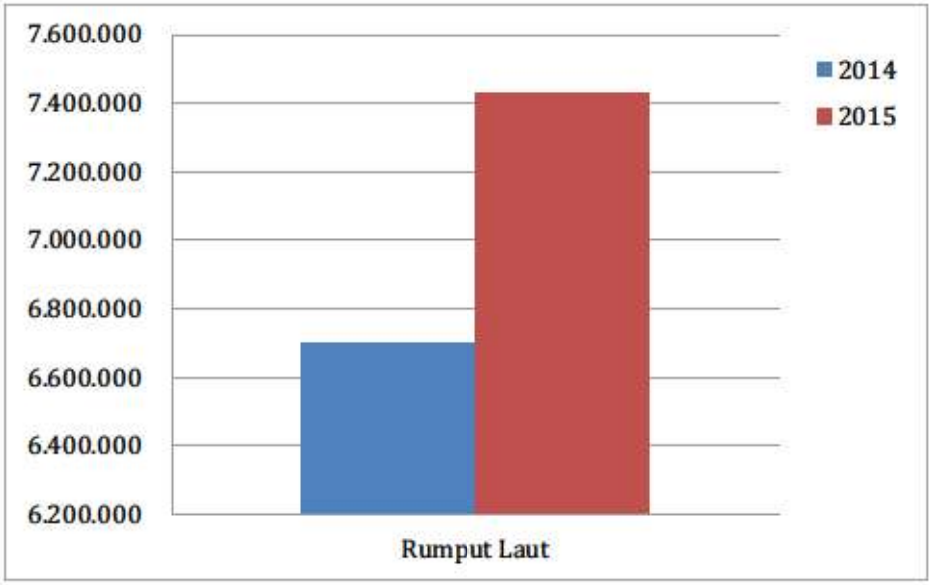

Gambar 4.2 Produksi Rumput Laut Triwulan I-III 2014-2015

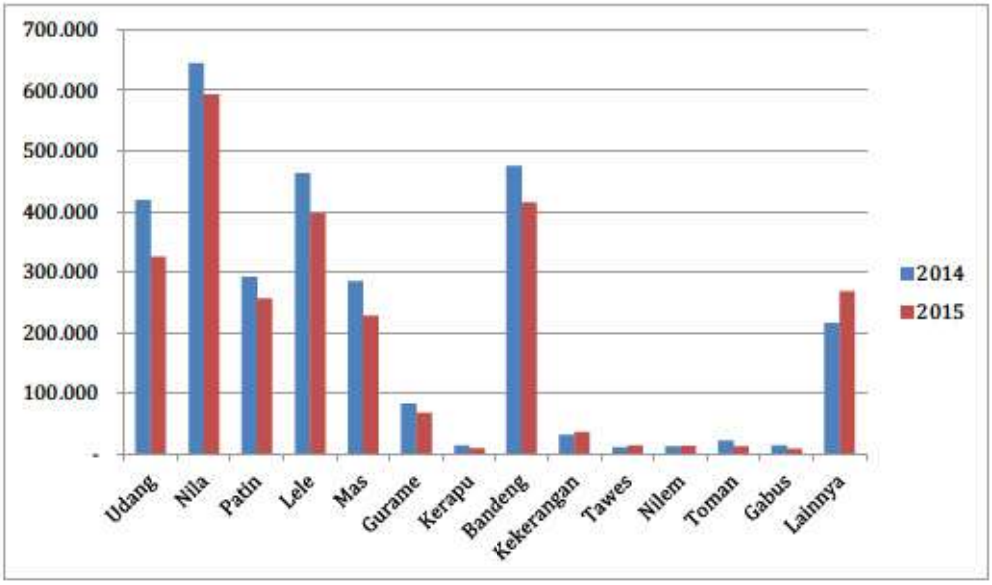

Gambar 4.3 Produksi Komoditas Perikanan Budidaya Triwulan I-III 2014-2015

4.2 Produksi Perikanan Indonesia, 2010-2014

Produksi perikanan Indonesia tahun 2014 mencapai 20,84 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,42 juta ton atau meningkat sebesar 7,35 persen dibandingkan tahun 2013. *Trend* produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2010 dengan kenaikan rata-rata tahun 2010-2014 sebesar 15,80 persen, rata-rata produksi perikanan sebesar 16,21 juta ton dan standar deviasi 3,86 juta ton. Melalui 95persen *Confident Interval* (CI) produksi perikanan tahun 2010-2014 berada diantara 11,42 juta - 21,0 juta ton, artinya produksi perikanan Indonesia tahun 2010-2014 mengalami kenaikan yang stabil karena masih berada dalam interval tersebut. Sedangkan *trend* produksi perikanan Indonesia dalam kurun waktu tahun 2003-2014 yang mengalami kenaikan signifikan, dengan kenaikan rata-rata sebesar 12,28 persen, rata-rata produksi sebesar 11,19 juta ton, standar deviasi sebesar 5,11 juta ton, dan 95persen *Confident Interval* (CI) diantara 7,95 juta - 14,44 juta ton, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2003-2014 terdapat produksi

perikanan Indonesia yang mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu tahun 2012 (15,51 juta ton), tahun 2013 (19,42 juta ton), dan tahun 2014 (20,83 juta ton).

Kontribusi produksi perikanan tangkap terhadap produksi perikanan nasional tahun 2014 sebesar 31,11 persen sedangkan kontribusi perikanan budidaya sebesar 68,89 persen. Kontribusi perikanan budidaya terus meningkat sejak tahun 2010 dengan kontribusi yang tumbuh sebesar 6,42 persen dan rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 62,35 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, perikanan budidaya memiliki potensi yang cukup besar bagi produksi perikanan Indonesia. Produksi perikanan Indonesia tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 Produksi Perikanan Menurut Jenis Perairan/ Jenis Lahan, 2010-2014

Satuan: Ton
Unit: Ton

Rincian - Item			TAHUN - *YEAR* 2010	2011	2012	2013	2014
Volume Produksi - *Production Volume*			**11.662.341**	**13.643.234**	**15.506.912**	**19.416.283**	**20.843.475**
Perikanan Tangkap *Capture Fisheries*	**Sub Jumlah / *Sub Total***		**5.384.418**	**5.714.271**	**5.831.359**	**6.115.377**	**6.484.346**
	Perikanan laut	- *Marine fisheries*	5.039.446	5.345.729	5.435.633	5.707.013	6.037.654
	Perairan umum	- *Inland open water*	344.972	368.542	395.726	408.364	446.692
Perikanan Budidaya *Aquaculture Fisheries*	**Sub Jumlah / *Sub Total***		**6.277.923**	**7.928.963**	**9.675.553**	**13.300.906**	**14.359.129**
	Budidaya Laut	- *Marine Culture*	3.514.702	4.605.827	5.769.737	8.386.271	9.034.756
	Tambak	- *Brackishwater pond*	1.416.038	1.602.748	1.756.799	2.337.671	2.428.389
	Kolam	- *Freshwater pond*	819.809	1.127.127	1.433.820	1.774.407	1.963.589
	Karamba	- *Cage*	121.271	131.383	178.367	200.006	221.304
	Jaring Apung	- *Floating Net*	309.499	375.430	455.012	505.248	500.873
	Jaring Tancap	- *Pen culture*	-	-	-	-	65.955
	Mina Padi	- *Paddy Field*	96.605	86.448	81.818	97.303	144.263

Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya

Nilai produksi perikanan Indonesia tahun 2014 mencapai Rp. 236 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 213 triliun atau meningkat sebesar 10,96 persen dibandingkan tahun 2013. *Trend* produksi perikanan Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 17,14 persen, rata-rata sebesar Rp 173 triliun, standar deviasi sebesar Rp. 48 trilliun, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) sebesar Rp. 144 trilliun - Rp. 233 trilliun. Nilai produksi perikanan Indonesia terdapat dalam gambar 4.4.

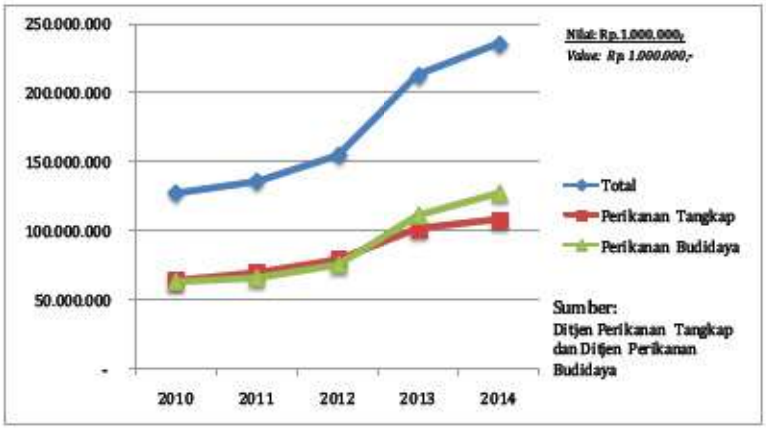

Gambar 4.4 Nilai Produksi Perikanan, 2010-2014

Kontribusi nilai produksi perikanan tangkap terhadap nilai produksi perikanan nasional tahun 2014 sebesar 45,94 persen sedangkan kontribusi perikanan budidaya sebesar 54,06 persen, sedangkan secara rata-rata kontribusi perikanan tangkap sebesar 49,28 persen dan perikanan budidaya sebesar 50,72 persen. Kontribusi nilai produksi perikanan nasional tahun 2010-2014 terdapat dalam gambar 4.5.

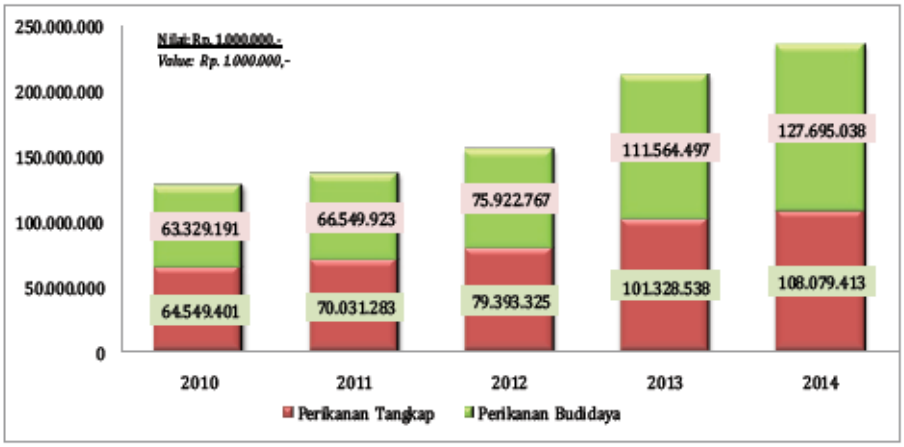

Gambar 4.5 Gambar Proporsi Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Perikanan, 2010-2014

4.2.1 Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,03 persen atau mencapai 6,48 juta ton dibandingkan tahun 2013, dengan pertumbuhan produksi perikanan tangkap di laut sebesar 5,79 persen atau mencapai 6,04 juta ton dan perikanan tangkap di perairan umum sebesar 9,39 persen atau mencapai 446 ribu ton.

Trend pertumbuhan produksi perikanan tangkap tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan sebesar 4,77 persen dengan rata-rata produksi sebesar 5,90 juta ton, standar deviasi sebesar 416 ribu ton, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) antara 5,38 juta - 6,42 juta ton. 95persen *Confidence Interval* (CI) tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan yang signifikan tahun 2014 sebesar sebesar 6,48 juta ton. Kenaikan produksi tahun 2014 disebabkan oleh kenaikan yang signifikan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum.

Trend pertumbuhan produksi perikanan tangkap di laut dan di perairan umum menunjukkan bahwa tren pertumbuhan produksi perikanan tangkap di laut sebesar 4,64 persen dengan rata-rata produksi sebesar 5,51 juta ton, standar deviasi sebesar 378 ribu ton, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) antara 5,04 juta - 5,98 juta ton. 95persen *Confidence Interval* (CI) tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap di laut mengalami kenaikan yang signifikan tahun 2014 sebesar 6,04 juta ton. *Trend* pertumbuhan produksi perikanan tangkap di perairan umum sebesar 6,69 persen dengan rata-rata produksi sebesar 392 ribu ton, standar deviasi sebesar 38 ribu ton, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) antara 344 ribu - 440 ribu ton. 95persen *Confidence Interval* (CI) tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap di perairan umum mengalami kenaikan yang signifikan tahun 2014 sebesar sebesar 446 ribu ton.

Nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 mencapai Rp. 108 trilliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,66 persen dibandingkan tahun 2013, dengan produksi perikanan tangkap di laut mencapai Rp. 99 trillliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,75 persen dan produksi perikanan tangkap di

perairan umum mencapai sebesar Rp 8,1 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Trend pertumbuhan nilai produksi perikanan tangkap tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan sebesar 14,05 persen, rata-rata sebesar Rp. 85 trilliun, standar deviasi sebesar 19 trilliun dan 95persen *Confidence Interval* (CI) sebesar Rp. 61 trilliun - Rp. 109 trilliun. 95persen *Confidence Interval* (CI) tersebut menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, karena nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 masih berada dalam interval. Hal ini berarti meskipun produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan yang signifikan (produksi tahun 2014 berada di luar interval), namun secara nilai produksi tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Faktor harga komoditas perikanan tangkap yang tidak mengalami kenaikan yang signifikan merupakan faktor yang memepengaruhi hal tersebut.

Trend pertumbuhan nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar 14,01 persen , rata-rata sebesar Rp. 78 trilliun, standard deviasi sebesar Rp. 17 trilliun dan 95persen *Confidence Interval* (CI) sebesar Rp. 56 trilliun - Rp. 100 trilliun. *Trend* pertumbuhan di perikanan tangkap di perairan umum sebesar 15,14 persen, rata-rata sebesar Rp. 7 trilliun, standar deviasi sebesar Rp. 2 trilliun dan 95persen *Confidence Interval* (CI) sebesar Rp. 5 trilliun - Rp. 9 trilliun. Nilai Produksi Perikanan Tangkap tahun 2010 – 2014 dapat dilihat dalam gambar 4.6.

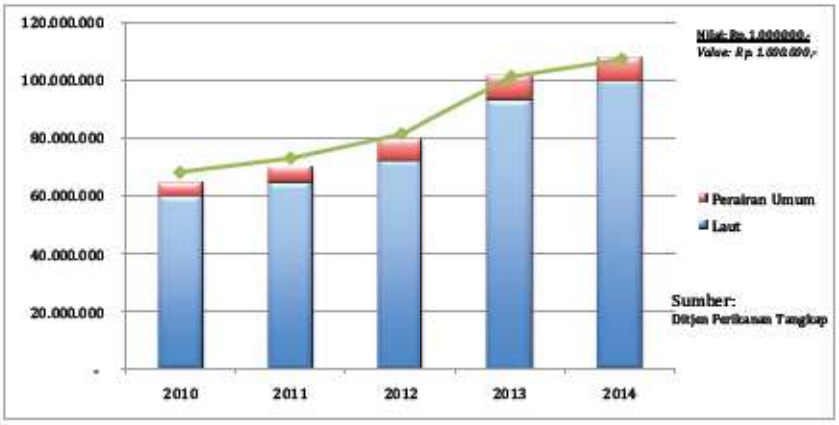

Gambar 4.6 Nilai Produksi Perikanan Tangkap, 2010-2014

Kontribusi nilai produksi perikanan tangkap masih di dominasi nilai produksi perikanan tangkap di laut dengan rata-rata sebesar 92 persen.

4.2.1.1 Produksi Berdasarkan Komoditas Utama

Produksi tuna, tongkol, dan cakalang tahun 2014 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,76 persen, 14,31 persen, dan 3,26 persen dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan tuna, tongkol dan cakalang sejak tahun 2010 masing-masing sebesar 18,25 persen, 7,27 persen, dan 9,33 persen dengan rata-rata produksi masing-masing sebesar 261 ribu ton, 441 ribu ton, dan 426 ribu ton. Diantara ketiga jenis ikan di atas, produksi tongkol merupakan jenis komoditas utama yang paling meningkat di tahun 2014, hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan produksi tahun 2013-2014 lebih besar daripada pertumbuhan produksi tahun 2010-2014.

Begitu pula untuk udang, produksi udang tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,67 persen dibandingkan tahun 2013. Udang mengalami pertumbuhan produksi sejak tahun 2010 sebesar 4,95 persen, dengan rata-rata produksi sebesar 255 ribu ton dan standar deviasi 17 ribu ton. Pertumbuhan produksi udang tahun 2013-2014 lebih besar daripada pertumbuhan produksi tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa produksi udang tahun 2014 mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan. Jenis udang yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah udang putih dan udang windu. Udang putih mengalami pertumbuhan sejak tahun 2010 sebesar 4,50 persen dengan rata-rata produksi 83 ribu ton dan mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2013 sebesar 14,52 persen (89 ribu ton). Produksi udang windu tahun 2014 mencapai 34 ribu ton atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,07 persen dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan udang windu sejak tahun 2010 sebesar 5,56 persen dengan rata-rata produksi sebesar 30 ribu ton. Tabel produksi komoditas utama perikanan tangkap dapat dilihat dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5 Produksi Komoditas Utama Perikanan Tangkap, 2010-2014

Satuan: Ton
Unit: Ton

Jenis Ikan - *Species*	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Produksi Total	**5.039.446**	**5.345.729**	**5.435.633**	**5.707.013**	**6.037.654**
Ikan - *Fishes*	**4.540.145**	**4.713.439**	**4.821.574**	**5.085.561**	**5.314.690**
1. Tuna - *Tunas*	166.208	241.364	275.778	305.435	313.873
2. Cakalang - *Skipjack Tunas*	348.897	372.211	429.024	481.014	496.682
3. Tongkol - *Eastern Little Tunas*	390.595	415.331	432.138	451.048	515.571
4. Ikan Lainnya - *Other Fishes*	3.634.445	3.684.533	3.684.634	3.848.064	3.988.564
Binatang Berkulit Keras - *Crustaceans*	**302.544**	**343.644**	**337.439**	**338.708**	**361.290**
1. Udang - *Shrimp*	227.326	260.618	263.032	251.343	273.133
2. Binatang Berkulit Keras Lainnya - *Other Crustaceans*	75.218	83.026	74.407	87.365	88.157
Lainnya - *Others*	**196.757**	**288.646**	**276.620**	**282.744**	**361.674**

Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap

4.2.1.2 Produksi Berdasarkan Provinsi

Provinsi dengan produksi perikanan tangkap terbesar tahun 2014 antara lain Provinsi Sumatera Utara (572 ribu ton – *share* 8,82 persen), Provinsi Maluku (538 ribu ton– *share* 8,30 persen), Provinsi Jawa Timur (399 ribu ton – *share* 6,16 persen), Provinsi Sulawesi Selatan (302 ribu ton – *share* 4,66 persen), dan Provinsi Papua (300 ribu ton – *share* 4,63 persen). *Share* adalah persentase kontribusi produksi perikanan tangkap provinsi terhadap total produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap menurut provinsi terdapat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi

Satuan: Ton

PROVINSI *PROVINCE*	TAHUN - *YEAR*				
	2010	2011	2012	2013	2014
JUMLAH - *TOTAL*	**5.384.418**	**5.714.271**	**5.829.194**	**6.115.377**	**6.484.346**
SUMATERA	**1.481.798**	**1.657.717**	**1.728.565**	**1.756.025**	**1.808.479**
Aceh	127.913	145.971	150.115	155.271	159.484
Sumatera Utara	365.928	502.824	563.134	555.311	572.149
Sumatera Barat	202.599	205.456	207.866	221.376	225.198
Riau	89.293	104.045	111.677	110.735	125.689
Jambi	50.949	51.840	54.091	55.258	55.234
Sumatera Selatan	93.151	94.836	95.530	96.587	101.563
Bengkulu	45.062	40.757	45.935	52.286	62.391
Lampung	150.849	162.008	150.342	169.361	164.155

Satuan: Ton

PROVINSI *PROVINCE*	TAHUN - *YEAR*				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kep. Bangka Belitung	159.421	192.474	202.565	199.243	203.285
Kep. Riau	196.633	157.506	147.310	140.597	139.331
J A W A	**1.012.430**	**1.089.498**	**1.155.349**	**1.123.181**	**1.173.264**
DKI Jakarta	172.422	180.198	219.836	209.733	226.060
Jawa Barat	190.790	196.993	211.711	218.609	219.004
Jawa Tengah	231.119	270.619	275.559	243.942	261.017
D.I. Yogyakarta	5.101	5.002	5.629	4.998	6.996
Jawa Timur	352.779	375.827	381.805	386.895	399.371
Banten	60.219	60.859	60.809	59.004	60.816
BALI - NUSATENGGARA	**310.916**	**346.927**	**283.911**	**353.184**	**460.301**
B a l i	105.567	101.374	81.737	103.593	118.242
Nusa Tenggara Barat	115.164	143.416	136.169	145.766	230.644
Nusa Tenggara Timur	90.185	102.137	66.005	103.825	111.415
KALIMANTAN	**525.933**	**510.443**	**548.572**	**657.517**	**696.133**
Kalimantan Barat	95.921	103.903	112.752	163.533	192.919
Kalimantan Tengah	92.280	81.574	94.955	101.891	104.084
Kalimantan Selatan	178.023	179.283	192.532	241.705	244.583
Kalimantan Timur	159.709	145.683	148.333	150.388	154.547
SULAWESI	**958.372**	**997.308**	**1.014.628**	**1.105.910**	**1.169.454**
Sulawesi Utara	222.256	231.651	281.349	285.300	296.367
Sulawesi Tengah	141.347	145.832	197.203	262.460	267.315
Sulawesi Selatan	223.258	237.808	259.883	292.241	302.193
Sulawesi Tenggara	227.238	233.194	148.794	127.777	153.519
Gorontalo	73.095	76.369	85.397	92.322	103.343
Sulawesi Barat	71.178	72.454	42.002	45.810	46.717
MALUKU - PAPUA	**1.094.969**	**1.112.378**	**1.098.169**	**1.119.560**	**1.176.715**
Maluku	559.049	567.963	537.271	551.845	538.148
Maluku Utara	148.028	150.232	150.970	151.541	218.097
Papua Barat	116.844	117.299	120.657	122.004	120.203
Papua	271.048	276.884	289.271	294.170	300.267

Sumber / *Source* : Ditjen Perikanan Tangkap KKP

Analisis cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis cluster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama. Cluster-cluster yang terbentuk memiliki homogenitas internal yang tinggi dan heterogenitas eksternal yang tinggi. Ciri suatu cluster yang baik yaitu mempunyai:

a. Homogenitas internal (*within cluster*) yaitu kesamaan antar anggota dalam cluster.

b. Heterogenitas external (*between cluster*) yaitu perbedaan antara cluster yangs atu dengan yang lain.

Adapun metode pengelompokan dalam analisis cluster meliputi :

a. Metode Hirarkis; memulai pengelompokan dengan dua atau lebih obyek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian diteruskan pada obyek yang lain dan seterusnya hingga cluster akan membentuk semacam 'pohon' dimana terdapat tingkatan (hirarki) yang jelas antar obyek, dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Alat yang membantu untuk memperjelas proses hirarki ini disebut "dendogram".

b. Metode Non-Hirarkis; dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan (dua, tiga, atau yang lain). Metode ini biasa disebut "K-Means Cluster".

Berdasarkan analisis cluster melalui Metode Non-Hirarkris (K-Means Cluster), produksi perikanan tangkap tahun 2010-2014 dapat dibedakan berdasarkan 4 (empat) kelompok, yaitu:

a. Kelompok 1 merupakan provinsi dengan rata-rata produksi kurang dari 120 ribu ton, rincian provinsi kelompok 1 terdapat dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7 Provinsi dalam Kelompok 1 (Produksi Perikanan Tangkap)

Satuan: Ton

Provinsi	Tahun					Rata-rata Produksi
	2010	2011	2012	2013	2014	
Riau	89.293	104.045	111.677	110.735	125.689	108.288
Jambi	50.949	51.840	54.091	55.258	55.234	53.474
Sumatera Selatan	93.151	94.836	95.530	96.587	101.563	96.333
Bengkulu	45.062	40.757	45.935	52.286	62.391	49.286
D.I. Yogyakarta	5.101	5.002	5.629	4.998	6.996	5.545
Banten	60.219	60.859	60.809	59.004	60.816	60.341
Bali	105.567	101.374	81.737	103.593	118.242	102.103
Nusa Tenggara Timur	90.185	102.137	66.005	103.825	111.415	94.713
Kalimantan Tengah	92.280	81.574	94.955	101.891	104.084	94.957
Gorontalo	73.095	76.369	85.397	92.322	103.343	86.105
Sulawesi Barat	71.178	72.454	42.002	45.810	46.717	55.632
Papua Barat	116.844	117.299	120.657	122.004	120.203	119.401

b. Kelompok 2 merupakan provinsi dengan rata-rata produksi antara 120 - 220 ribu ton, rincian provinsi kelompok 2 terdapat dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8 Provinsi dalam Kelompok 2 (Produksi Perikanan Tangkap)

Satuan: Ton

Provinsi	Tahun					Rata-rata Produksi
	2010	2011	2012	2013	2014	
Kalimantan Barat	95.921	103.903	112.752	163.533	192.919	133.806
Aceh	127.913	145.971	150.115	155.271	159.484	147.751
Kalimantan Timur	159.709	145.683	148.333	150.388	154.547	151.732
Nusa Tenggara Barat	115.164	143.416	136.169	145.766	230.644	154.232
Kep. Riau	196.633	157.506	147.310	140.597	139.331	156.275
Lampung	150.849	162.008	150.342	169.361	164.155	159.343
Maluku Utara	148.028	150.232	150.970	151.541	218.097	163.774
Sulawesi Tenggara	227.238	233.194	148.794	127.777	153.519	178.104
Kep. Bangka Belitung	159.421	192.474	202.565	199.243	203.285	191.398
DKI Jakarta	172.422	180.198	219.836	209.733	226.060	201.650
Sulawesi Tengah	141.347	145.832	197.203	262.460	267.315	202.831
Kalimantan Selatan	178.023	179.283	192.532	241.705	244.583	207.225
Jawa Barat	190.790	196.993	211.711	218.609	219.004	207.421
Sumatera Barat	202.599	205.456	207.866	221.376	225.198	212.499

c. Kelompok 3 merupakan provinsi dengan rata-rata produksi antara 220 - 400 ribu ton, rincian provinsi kelompok 3 terdapat dalam tabel 4.9.

Tabel 4.9 Provinsi dalam Kelompok 3 (Produksi Perikanan Tangkap)

Satuan: Ton

Provinsi	Tahun					Rata-rata Produksi
	2010	2011	2012	2013	2014	
Jawa Tengah	231.119	270.619	275.559	243.942	261.017	256.451
Jawa Timur	352.779	375.827	381.805	386.895	399.371	379.335
Sulawesi Utara	222.256	231.651	281.349	285.300	296.367	263.385
Sulawesi Selatan	223.258	237.808	259.883	292.241	302.193	263.077
Papua	271.048	276.884	289.271	294.170	300.267	286.328

d. Kelompok 4 merupakan provinsi dengan rata-rata produksi diatas 400 ribu ton, rincian provinsi kelompok 4 terdapat dalam tabel 4.10.

Tabel 4.10 Provinsi dalam Kelompok 4 (Produksi Perikanan Tangkap)

Satuan: Ton

Provinsi	Tahun					Rata-rata Produksi
	2010	2011	2012	2013	2014	
Sumatera Utara	365.928	502.824	563.134	555.311	572.149	511.869
Maluku	559.049	567.963	537.271	551.845	538.148	550.855

4.2.2 Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya mencapai 14,3 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 7,96 persen dibandingkan tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,3 juta ton tahun 2014. *Trend* produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan sejak tahun 2010, kenaikan tahun 2010-2014 sebesar 23,44 persen dan tahun 2013-2014 sebesar 7,96 persen. *Trend* pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2010-2014 ditunjukkan dengan rata-rata kenaikan produksi sebesar 23,44 persen, rata-rata produksi sebesar 10,31 juta ton, standar deviasi sebesar 3,4 ribu ton, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) antara 6,02 juta – 14,59 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2010-2014 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan yang stabil, karena dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat produksi perikanan budidaya yang berada diluar interval.

Jenis produksi budidaya yang berkontribusi terbesar pada produksi perikanan budidaya tahun 2014 adalah produksi budidaya laut sebesar 63 persen (9,04 juta ton), selanjutnya budidaya tambak sebesar 17 persen, (2,4 juta ton), budidaya kolam sebesar 14 persen (1,9 juta ton), budidaya jaring apung sebesar 3,5 persen (500 ribu ton), budidaya karamba sebesar 1,5 persen (221 ribu ton), budidaya mina padi sebesar 1 persen (144 ribu ton) dan budidaya jaring tancap sebesar 0,46 persen (65 ribu ton). Statistik perikanan budidaya tahun 2010-2014 terdapat dalam tabel 4.11.

Tabel 4.11 Statistik Perikanan Budidaya, 2010-2014

Satuan: 1.000 ton
Unit: 1.000 tons

Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-Rata *Increasing Average*		*Average*	St. Deviasi	*Coeff. Variance* (%)	95% CI *Confidence Interval*	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014	2013-2014				*Lower*	*Upper*
Perikanan Budidaya	6.278	7.929	9.676	13.301	14.359	23,44	7,96	10.308	3.452	33,49	6.022	14.595
Budidaya Laut - *Mariculture*	3.515	4.606	5.770	8.386	9.035	27,35	7,73	6.262	2.384	38,07	3.302	9.222
Budidaya Tambak - *Brackishwater Pond*	1.416	1.603	1.757	2.338	2.428	14,94	3,88	1.908	451	23,63	1.348	2.468
Budidaya Kolam - *Freshwater Pond*	820	1.127	1.434	1.774	1.964	24,78	10,66	1.424	466	32,7	846	2.002
Budidaya Karamba - *Cage*	121	131	178	200	221	16,72	10,65	170	43	25,35	117	224
Budidaya Jaring Apung - *Floating Cage Net*	309	375	455	505	501	13,17	-0,87	429	85	19,77	324	535
Budidaya Jaring Tancap - *Pen culture*					66	-	-	66	-	-	-	-
Budidaya Mina Padi - *Rice fish*	97	86	82	97	144	12,83	48,26	101	25	24,6	70	132

Nilai produksi perikanan budidaya tahun 2014 mencapai Rp 128 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,46 persen dibandingkan tahun 2013. *Trend* nilai produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan sejak tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 20,14 persen dengan rata-rata sebesar Rp 81 triliun. Jenis budidaya yang berkontribusi terbesar pada nilai produksi perikanan budidaya tahun 2014 adalah nilai produksi budidaya tambak sebesar 38,02 persen (Rp 42,5 triliun), selanjutnya budidaya kolam sebesar 28,2 persen, (Rp 35,9 triliun), budidaya laut sebesar 19,94 persen (Rp 25,5 triliun), budidaya jaring apung sebesar 7,09 persen (Rp 7,1 triliun), budidaya karamba sebesar 3,68 persen (Rp 4,7 triliun) dan budidaya mina padi sebesar 2,16 persen (Rp 2,7 triliun).

Jenis budidaya yang berkontribusi terhadap kenaikan nilai produksi sejak tahun 2010 adalah budidaya tambak dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,89 persen atau rata-rata Rp 31 triliun dan budidaya kolam dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,61 persen atau rata-rata Rp 21,5 triliun. Nilai produksi perikanan budidaya tahun 2010-2014 terdapat dalam gambar 4.7.

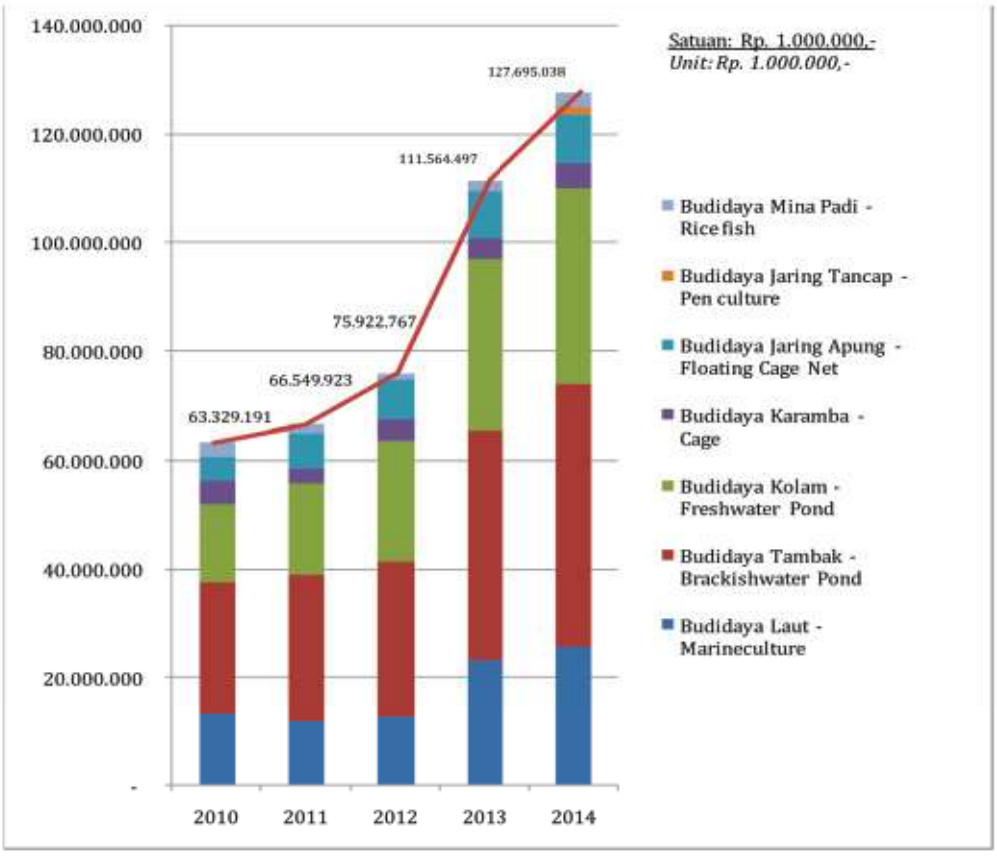

Gambar 4.7 Nilai Produksi Perikanan Budidaya, 2010-2014

4.2.2.1 Produksi Menurut Komoditas

Produksi rumput laut tahun 2014 mencapai 14,35 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 8,37 persen dibandingkan tahun 2013. *Trend* pertumbuhan produksi rumput laut tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan sebesar 27,29 persen, rata-rata produksi sebesar 6,99 juta ton, standar deviasi sebesar 2,63 juta ton, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) antara 3,72 juta – 10,27 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2010-2014 produksi rumput laut mengalami kenaikan yang stabil, karena dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat produksi rumput laut yang berada diluar interval.

Produksi udang tahun 2014 mencapai 639 ribu ton atau mengalami penurunan sebesar 1,02 persen dibandingkan tahun 2013. *Trend* pertumbuhan produksi rumput laut tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan sebesar 15,82 persen, rata-rata produksi sebesar 496 ribu ton, standar deviasi sebesar 134 ribu ton, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) antara 330 ribu – 663 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2010-2014 produksi udang mengalami kenaikan yang stabil, karena dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat produksi udang yang berada diluar interval.

Produksi rumput laut tahun 2010-2014 berkontribusi 67,86 persen terhadap produksi perikanan budidaya, kemudian diikuti dengan nila (7,06 persen), bandeng (5,17 persen), udang (4,82 persen), ikan mas (3,56 persen), patin (3,01 persen), dan komoditas lainnya (3 persen). Produksi perikanan budidaya berdasarkan komoditas terdapat dalam tabel 4.12.

Tabel 4.12 Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Komoditas, 2010-2014

Satuan: Ton

Jenis Ikan - *Species*	Tahun - *Year*				
	2010	2011	2012	2013	2014
Total Produksi	**6.277.923**	**7.928.962**	**9.675.553**	**13.300.906**	**14.359.129**
1. Rumput Laut - *Seaweed*	3.915.017	5.170.201	6.514.854	9.298.474	10.076.992
2. Udang - *Shrimp*	380.972	400.385	415.703	645.955	639.369
3. Kerapu - *Groupers*	10.398	10.580	11.950	18.864	13.346
4. Kakap - *Giant seaperch*	5.738	5.236	6.198	6.735	5.447
5. Bandeng - *Milk fish*	421.757	467.449	518.939	627.333	631.125
6. Ikan Mas - *Common carp*	282.695	332.206	374.366	412.703	434.653
7. Nila - *Nile Tilapia*	464.191	567.078	695.063	914.778	999.695
8. Lele - *Catfish*	242.811	337.577	441.217	543.774	679.379
9. Patin - *Catfish*	147.888	229.267	347.000	410.883	418.002
10. Gurame - *Giant Gouramy*	56.889	64.252	84.681	94.605	118.776
11. Lainnya - *Others*	349.568	344.731	265.580	326.801	342.347

Sumber: Ditjen Perikanan Budidaya

4.2.2.2 Produksi Menurut Provinsi

Provinsi dengan produksi perikanan budidaya terbesar tahun 2014 antara lain Provinsi Sulawesi Selatan (3,10 juta ton – *share* 21,61 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,97 juta ton– *share* 13,72 persen), Provinsi Sulawesi Tengah

(1,21 juta ton – *share* 8,49 persen), Provinsi Jawa Timur (1,04 juta ton – *share* 7,27 persen), dan Provinsi Sulawesi Tenggara (1,03 juta ton – *share* 7,22 persen). *Share* adalah persentase kontribusi produksi perikanan budidaya provinsi terhadap total produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya menurut provinsi terdapat dalam tabel 4.13.

Tabel 4.13 Produksi Perikanan Budidaya menurut Provinsi, 2010-2014

Satuan: Ton

PROVINSI *PROVINCE*	TAHUN - *YEAR*				
	2010	2011	2012	2013	2014
JUMLAH - *TOTAL*	**6.277.925**	**7.928.962**	**9.675.553**	**13.300.906**	**14.359.129**
SUMATERA	**698.229**	**845.459**	**1.077.198**	**1.262.870**	**1.396.839**
Aceh	46.811	34.451	41.557	47.209	58.824
Sumatera Utara	119.106	125.607	144.247	193.757	204.756
Sumatera Barat	102.617	131.554	181.360	206.870	262.863
Riau	44.383	61.337	68.794	74.343	86.053
Jambi	31.905	34.369	37.268	74.842	50.610
Sumatera Selatan	217.397	291.375	404.923	435.001	487.199
Bengkulu	18.628	33.806	44.916	45.985	62.661
Lampung	98.074	119.228	120.744	152.539	152.310
Kep. Bangka Belitung	2.490	6.474	8.108	2.939	4.199
Kep. Riau	16.818	7.257	25.281	29.383	27.366
J A W A	**1.609.959**	**1.824.260**	**2.114.156**	**2.527.853**	**2.732.301**
DKI Jakarta	50.365	34.142	8.054	6.764	9.990
Jawa Barat	622.961	695.104	778.999	970.568	1.006.017
Jawa Tengah	175.995	242.865	261.736	397.106	501.809
D.I. Yogyakarta	39.582	44.542	50.260	58.025	64.964
Jawa Timur	634.279	715.865	927.974	995.962	1.043.886
Banten	86.777	91.741	87.134	99.428	105.635
BALI - NUSATENGGARA	**672.171**	**880.180**	**1.104.590**	**2.730.396**	**2.959.973**
Bali	107.495	119.371	155.950	161.565	102.466
Nusa Tenggara Barat	214.971	381.410	547.059	719.358	887.395
Nusa Tenggara Timur	349.705	379.399	401.582	1.849.473	1.970.112
KALIMANTAN	**262.899**	**310.365**	**461.803**	**570.047**	**677.640**
Kalimantan Barat	27.200	29.972	37.084	79.522	87.936
Kalimantan Tengah	24.733	31.772	42.579	54.600	60.849
Kalimantan Selatan	63.462	76.903	91.029	96.646	118.256
Kalimantan Timur	147.504	171.718	291.112	339.279	410.600
SULAWESI	**2.683.136**	**3.354.454**	**4.249.427**	**5.431.890**	**5.913.751**
Sulawesi Utara	75.287	151.549	212.160	322.863	429.543
Sulawesi Tengah	744.279	781.378	929.215	1.324.445	1.218.406
Sulawesi Selatan	1.357.366	1.633.274	2.235.007	2.592.136	3.103.434

Satuan: Ton

PROVINSI *PROVINCE*	TAHUN - *YEAR*				
	2010	2011	2012	2013	2014
Sulawesi Tenggara	404.123	647.836	712.597	1.010.927	1.037.416
Gorontalo	72.281	100.103	111.934	126.446	57.404
Sulawesi Barat	29.800	40.315	48.514	55.074	67.549
MALUKU - PAPUA	**351.531**	**714.245**	**668.378**	**777.850**	**678.625**
Maluku	275.754	612.505	477.484	592.053	501.582
Maluku Utara	51.690	67.799	122.900	99.265	103.975
Papua Barat	21.749	4.157	61.086	77.395	62.525
Papua	2.338	29.784	6.908	9.136	10.543

Sumber / *Source* : Ditjen Perikanan Budidaya KKP

Berdasarkan analisis cluster melalui Metode Non-Hirarkris (K-Means Cluster), produksi perikanan budidaya tahun 2010-2014 dapat dibedakan berdasarkan 3 (empat) kelompok, yaitu:

a. Kelompok 1 merupakan provinsi dengan rata-rata produksi kurang dari 370 ribu ton, rincian provinsi kelompok 1 terdapat dalam tabel 4.14.

Tabel 4.14 Provinsi dalam Kelompok 1 (Produksi Perikanan Budidaya)

Satuan: Ton

Provinsi	Tahun					Rata-rata Produksi
	2010	2011	2012	2013	2014	
Aceh	46.811	34.451	41.557	47.209	58.824	45.770
Sumatera Utara	119.106	125.607	144.247	193.757	204.756	157.495
Sumatera Barat	102.617	131.554	181.360	206.870	262.863	177.053
Riau	44.383	61.337	68.794	74.343	86.053	66.982
Jambi	31.905	34.369	37.268	74.842	50.610	45.799
Sumatera Selatan	217.397	291.375	404.923	435.001	487.199	367.179
Bengkulu	18.628	33.806	44.916	45.985	62.661	41.199
Lampung	98.074	119.228	120.744	152.539	152.310	128.579
Kep. Bangka Belitung	2.490	6.474	8.108	2.939	4.199	4.842
Kep. Riau	16.818	7.257	25.281	29.383	27.366	21.221
DKI Jakarta	50.365	34.142	8.054	6.764	9.990	21.863
Jawa Tengah	175.995	242.865	261.736	397.106	501.809	315.902
D.I. Yogyakarta	39.582	44.542	50.260	58.025	64.964	51.475
Banten	86.777	91.741	87.134	99.428	105.635	94.143
Bali	107.495	119.371	155.950	161.565	102.466	129.369
Kalimantan Barat	27.200	29.972	37.084	79.522	87.936	52.343

Satuan: Ton

Provinsi	Tahun 2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Produksi
Kalimantan Tengah	24.733	31.772	42.579	54.600	60.849	42.907
Kalimantan Selatan	63.462	76.903	91.029	96.646	118.256	89.259
Kalimantan Timur	147.504	171.718	291.112	339.279	410.600	272.043
Sulawesi Utara	75.287	151.549	212.160	322.863	429.543	238.280
Gorontalo	72.281	100.103	111.934	126.446	57.404	93.634
Sulawesi Barat	29.800	40.315	48.514	55.074	67.549	48.250
Maluku Utara	51.690	67.799	122.900	99.265	103.975	89.126
Papua Barat	21.749	4.157	61.086	77.395	62.525	45.383
Papua	2.338	29.784	6.908	9.136	10.543	11.742

b. Kelompok 2 merupakan provinsi dengan rata-rata produksi antara 490 ribu – 1 juta ton, rincian provinsi kelompok 2 terdapat dalam tabel 4.15.

Tabel 4.15 Provinsi dalam Kelompok 2 (Produksi Perikanan Budidaya)

Satuan: Ton

Provinsi	Tahun 2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Produksi
Jawa Barat	622.961	695.104	778.999	970.568	1.006.017	814.730
Jawa Timur	634.279	715.865	927.974	995.962	1.043.886	863.593
Nusa Tenggara Barat	214.971	381.410	547.059	719.358	887.395	550.038
Nusa Tenggara Timur	349.705	379.399	401.582	1.849.473	1.970.112	990.054
Sulawesi Tengah	744.279	781.378	929.215	1.324.445	1.218.406	999.544
Sulawesi Tenggara	404.123	647.836	712.597	1.010.927	1.037.416	762.580
Maluku	275.754	612.505	477.484	592.053	501.582	491.876

c. Kelompok 3 merupakan provinsi dengan rata-rata produksi diatas 2 juta ton, rincian provinsi kelompok 3 terdapat dalam tabel 4.16.

Tabel 4.16 Provinsi dalam Kelompok 3 (Produksi Perikanan Budidaya)

Satuan: Ton

Provinsi	Tahun 2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Produksi
Sulawesi Selatan	1.357.366	1.633.274	2.235.007	2.592.136	3.103.434	2.184.243

Produksi Garam Indonesia 5

Produksi Garam Indonesia 5

5.1 Neraca Garam Nasional

Neraca garam nasional merupakan perbandingan antara kebutuhan, produksi, ekspor, dan impor komoditas garam secara nasional dalam suatu periode tertentu. Dengan menyusun neraca garam nasional, dapat dilihat gambaran secara umum dan menyeluruh terhadap kegiatan ekonomi komoditas garam, yang meliputi parameter kebutuhan, produksi, ekspor, dan impor sehingga sangat bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan yang akan datang.

Secara rutin setiap tahun neraca garam nasional disusun secara bersama-sama oleh 4 (empat) instasi yang mengelola komoditas garam baik dari segi kebutuhan, produksi, perdagangan (ekspor dan impor) maupun pendataannya. Keempat instansi tersebut diantaranya adalah Kementerian Perindustrian (sisi kebutuhan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (sisi produksi), Kementerian Perdagangan (ekspor dan impor), dan Badan Pusat Statistik (sisi pendataan).

Tabel 5.1 Neraca Garam Nasional Tahun 2011-2014

Satuan: Ton

No	Uraian	Tahun				Kenaikan Rata-Rata (Persen)	
		2011	2012	2013	2014	2011-2014	2013-2014
A	**Kebutuhan**	**3.228.750**	**3.270.086**	**3.573.954**	**3.611.990**	**3,88**	**1,06**
	Garam Konsumsi	**1.426.000**	**1.466.336**	**1.546.454**	**1.483.115**	**1,40**	**-4,10**
	a. Rumah Tangga	747.000	732.645	746.454	511.390	-10,51	-31,49
	b. Industri Aneka Pangan	269.000	282.000	300.000	446.725	20,04	48,91
	c. Industri Pengasinan Ikan	410.000	451.691	500.000	525.000	8,62	5,00
	Garam Industri	**1.802.750**	**1.803.750**	**2.027.500**	**2.128.875**	**5,82**	**5,00**
	a. Industri CAP dan Farmasi	1.600.000	1.601.000	1.822.500	1.913.625	6,30	5,00
	b. Industri Non CAP (perminyakan, kulit, tekstil, sabun dsb)	202.750	202.750	205.000	215.250	2,04	5,00
B	**Produksi**	**1.113.118**	**2.071.601**	**1.087.715**	**2.192.168**	**46,72**	**101,54**
	a. PT. Garam (Persero)	156.713	307.348	156.829	315.000	49,33	100,86
	b. Garam Rakyat	956.405	1.764.253	930.886	1.877.168	46,29	101,65
C	**Ekspor**	**1.917**	**2.624**	**2.849**	**2.166**	**7,16**	**-23,97**
D	**Impor**	**2.615.202**	**2.314.844**	**2.020.933**	**2.251.577**	**-4,26**	**11,41**
	Garam Konsumsi	923.756	495.073	277.475	473.133	-6,62	70,51
	Garam Industri CAP dan Non CAP	1.691.446	1.819.771	1.743.458	1.778.444	1,80	2,01

Catatan :

1 Sumber Data : KKP, Kemenperin, Kemendag dan BPS

2 Produksi Garam Rakyat tahun 2014 sebesar 2.502.891,19 ton dengan penyusutan 25% = 1.877.168 ton

3 Tahun 2014 Impor garam konsumsi hanya peruntukan Garam Industri Aneka Pangan Tertentu, rekomendasi Rakor 6 Juni 2014 hanya 283.040 ton, khusus *seasoning dan noodle*

4 Total Impor garam tahun 2014 sebesar 2.251.577 ton, dengan rincian Industri Aneka Pangan 473.133 ton, Industri Farmasi 2.370,6 ton, Industri CAP 1.666.145,7 ton, Industri lain-lain 109.927,8 ton (Kemendag, 31 Desember 2014)

5 Pertumbuhan Kebutuhan garam rata-rata per tahun sebesar 5%

Kebutuhan garam Nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun dimana kebutuhan garam dibagi atas 2 (dua) macam yaitu (1) garam konsumsi adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku produksi bagi industri garam konsumsi beryodium (garam meja), untuk aneka pangan (memiliki NaCl minimal 94,7 persen) dan pengasinan ikan; (2) garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri dengan kadar NaCl minimal 97 persen. Garam industri belum dapat diproduksi didalam negeri sehingga semuanya berasal dari impor.

Kebutuhan garam nasional tahun 2014 mencapai 3,61 juta ton, terdiri dari garam konsumsi sebesar 1,48 juta ton dan garam industri 2,13 juta ton. Dari tahun 2011, pertumbuhan kebutuhan garam industri rata-rata mencapai 5,82 persen per tahun sedangkan pertumbuhan garam konsumsi rata-rata mencapai 1,40 persen per tahun. Kebutuhan garam konsumsi terdiri dari kebutuhan rumah tangga sebanyak 511 ribu ton, kebutuhan industri aneka pangan sebanyak 447 ribu ton, dan industri pengasinan ikan sebanyak 525 ribu ton. Sedangkan kebutuhan garam industri terdiri dari industri *Chlor Alkali Plant* (CAP) dan farmasi sebesar 1,91 juta ton, dan industri non CAP sebesar 215 ribu ton.

Kebutuhan garam industri sebagian besar dipenuhi oleh pasokan impor untuk industri CAP dan non CAP sebesar 1,78 juta ton atau mencapai 83,54 persen. Artinya produksi garam industri di dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam industri nasional. Hal ini terkait dengan kadar NaCl untuk garam industri cukup tinggi dibandingkan garam konsumsi, sehingga perlu pembinaan dari sisi teknologi kepada produsen garam di dalam negeri untuk dapat menghasilkan garam industri agar tidak tergantung kepada pasokan impor. Meskipun demikian, pembinaan kepada produsen garam konsumsi juga tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan terutama teknologi perebusan garam sebagai antisipasi terhadap cuaca yang sering kali tidak mendukung.

Produksi garam konsumsi nasional tahun 2014 mencapai 2,19 juta ton, berasal dari PT Garam (Persero) sebesar 315 ribu ton dan garam rakyat sebesar 1,88 juta ton. Garam rakyat merupakan produksi yang berasal dari kabupaten/kota Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan Non PUGAR (swadaya masyarakat). Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,50 juta ton, untuk mendapatkan garam siap pakai maka garam rakyat masih melalui proses penguapan sampai garam benar-benar kering sehingga volume produksi akan berkurang 25 persen. Sehingga volume produksi garam rakyat tahun 2014 menjadi 1,88 juta ton.

Berdasarkan neraca garam nasional, kebutuhan garam konsumsi nasional telah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri bahkan mengalami surplus sebanyak 394 ribu ton. Impor garam konsumsi sebanyak 473 ribu ton hanya peruntukkan garam industri Aneka Pangan tertentu khusus *seasoning* dan *noodle*. Sedangkan jumlah garam yang diekspor mencapai 2,16 ribu ton.

Kegiatan ekspor dan impor komoditas garam terekam dalam kode HS 2501.00.10.00; 2501.00.20.00; 2501.00.50.00; 2501.00.90.10; dan 2501.00.90.90. Khusus terkait impor komoditas garam, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang ketentuan impor garam. Tabel berikut menyajikan data hasil kegiatan ekspor dan impor komoditas garam menurut negara tujuan dan negara asal yang bersumber dari http://comtrade.un.org/data/.

Tabel 5.2 Ekspor Komoditas Garam Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2012-2014

Satuan: Kg

No	Negara Tujuan	Tahun			Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2012-2014
1	Timor-Leste	1.434.367	1.944.717	1.670.042	10,73
2	Philippines	713.000	620.000	620.000	-6,52
3	Japan	300.227	235.436	208.423	-16,53
4	Germany	20	2.000	24.500	5.512,50
5	Malaysia		1.000	8.999 -	
6	Lainnya	176.822	45.934	13.832	-71,95
	Total	2.624.436	2.849.087	2.545.796	-1,04

Sumber: http://comtrade.un.org/data/

Tabel 5.3 Impor Komoditas Garam Berdasarkan Negara Asal Tahun 2012-2014

Satuan: Kg

No	Negara Asal	Tahun			Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2012-2014
1	Australia	1.648.541.000	1.588.514.023	2.004.025.008	11,26
2	India	565.731.000	330.750.000	235.736.169	-35,13
3	China	5.980.918	496.049	24.471.771	2.370,82
4	New Zealand	1.574.000	1.727.975	2.188.000	18,20
5	Thailand	173.791	195.142	487.045	80,94
6	Lainnya	1.005.046	1.246.521	1.252.697	12,26
	Total	2.223.005.755	1.922.929.710	2.268.160.690	2,23

Sumber: http://comtrade.un.org/data/

5.2 Garam Rakyat

Produksi garam rakyat secara nasional merupakan total dari produksi hasil program PUGAR dan Non PUGAR. Produksi garam rakyat pada tahun 2015 mencapai 2,92 juta ton yang dihasilkan dari tambak garam yang terdapat di 44 kabupaten/kota dengan total luas tambak mencapai 26 ribu hektar. Berdasarkan volume produksi dan luas tambak tersebut maka produktivitas tambak secara nasional dapat dihitung sebesar 112,87 ton/hektar.

Tabel 5.4 Produksi Tambak Garam Rakyat, 2011-2015

URAIAN	Tahun					Kenaikan Rata-Rata (Persen)	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015	2014-2015
Produksi (ton)	1.623.786	2.473.716	1.163.608	2.502.891	2.915.461	32,74	16,48
Luas Lahan (ha)	20.066	22.632	25.098	23.411	25.830	6,82	10,34
Produktivitas Lahan (ton/ha)	67,27	91,70	39,62	89,72	112,87	32,94	25,80
Jumlah Tenaga Kerja (orang)	13.639	30.668	28.723	20.106	21.050	23,30	4,70
Musim Panas	4 bulan	5 bulan	2 bulan	5 bulan	6 bulan		

Keterangan:
1. Sumber: Ditjen PRL - KKP (diolah)
2. Produksi PUGAR dan Non PUGAR

Selama tahun 2011 sampai dengan 2015, produksi garam rakyat mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 32,74 persen per tahun. Pada tahun 2011 produksi garam rakyat secara nasional sebesar 1,62 juta ton meningkat menjadi 2,92 juta ton pada tahun 2015. Penurunan produksi garam rakyat pada tahun 2013 merupakan produksi paling rendah selama 5 tahun terakhir, yaitu hanya mencapai 1,16 juta ton dengan produktivitas sebesar 39,62 ton/hektar/musim. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pendeknya musim panas pada tahun tersebut, yaitu hanya sekitar 2 (dua) bulan. Produksi garam rakyat nasional masih sangat bergantung pada cuaca dan iklim yang terjadi sepanjang tahun, jika musim kemarau pendek maka akan langsung berdampak pada produksi garam yang menurun.

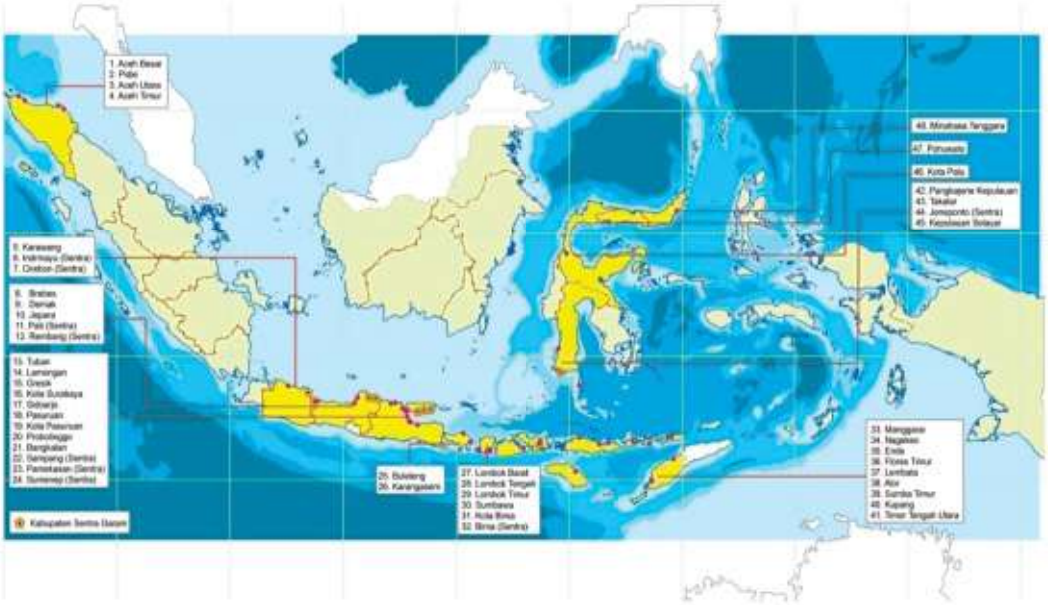

Gambar 5.1 Peta Lokasi Produksi Garam Rakyat 2015

Berdasarkan hasil produksi menurut kabupaten/kota tahun 2015, maka produksi garam tertinggi terdapat di Kabupaten Cirebon yaitu 438 ribu ton dengan luas tambak garam mencapai 3.858 hektar sekaligus merupakan daerah dengan tambak garam terluas. Sedangkan produksi terendah ada di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan volume sebesar 315,10 ton yang dihasilkan dari tambak garam seluas 17,00 hektar.

Tabel 5.5 Produksi, Luas Lahan, dan Produktivitas Garam Rakyat Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2015

No.	Kabupaten/ Kota	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Keterangan
1	Aceh Utara	1.781,00	13,00	137,00	Rebusan
2	Aceh Besar	800,00	67,60	11,83	Rebusan
3	Aceh Timur	554,84	18,13	30,60	Rebusan
4	Pidie	6.000,00	24,72	242,72	Rebusan
5	Karawang	8.446,00	161,00	52,46	
6	Cirebon	435.439,00	3.858,00	112,87	
7	Indramayu	317.122,36	2.714,00	116,85	
8	Brebes	53.629,50	430,00	124,72	
9	Demak	130.118,00	1.271,00	102,37	
10	Jepara	56.614,30	501,02	113,00	
11	Pati	381.704,00	2.838,11	134,49	
12	Rembang	218.491,00	1.568,65	139,29	
13	Tuban	29.425,14	272,06	108,16	
14	Lamongan	38.804,00	213,00	182,18	
15	Pasuruan	19.354,40	266,55	72,61	
16	Kota Pasuruan	12.490,00	116,00	107,67	
17	Probolinggo	23.004,51	359,82	63,93	
18	Gresik	16.535,73	163,52	101,12	
19	Sidoarjo	17.720,52	242,95	72,94	
20	Kota Surabaya	86.226,86	894,54	96,39	
21	Bangkalan	9.500,00	178,84	53,12	
22	Sampang	398.983,61	3.064,55	130,19	
23	Pamekasan	123.534,65	929,00	132,98	
24	Sumenep	236.117,96	2.068,00	114,18	
25	Karangasem	720,14	10,42	69,11	Rebusan
26	Buleleng	9.827,48	33,45	293,80	Rebusan
27	Sumbawa	3.306,35	101,93	32,44	
28	Kota Bima	1.688,10	29,40	57,42	
29	Bima	152.439,20	1.743,02	87,46	
30	Lombok Barat	4.355,00	142,10	30,65	Rebusan
31	Lombok Tengah	2.788,23	55,56	50,18	Rebusan
32	Lombok Timur	12.228,70	263,80	46,36	
33	Kupang	2.350,70	54,78	42,91	
34	Ende	351,00	22,32	15,73	
35	Timor Tengah Utara	1.100,70	7,50	146,76	Rebusan tidak dominan
36	Alor	315,10	17,00	18,54	
37	Sumba Timur	846,13	42,00	20,15	
38	Manggarai	441,00	10,00	44,10	
39	Nagekeo	2.478,89	180,00	13,77	
40	Pohuwato	709,83	87,20	8,14	Rebusan
41	Pangkep	42.268,31	420,98	100,40	
42	Takalar	14.243,00	104,00	136,95	
43	Jeneponto	40.274,30	434,66	92,66	
44	Kep, Selayar	331,65	15,00	22,11	
	Total	**2.915.461,17**	**25.830,34**	**112,87**	

Keterangan:
1. Sumber: Ditjen PRL, diolah
2. Produksi PUGAR dan Non PUGAR

Jika dilihat dari produktivitas lahannya, Kabupaten Buleleng memiliki produktivitas lahan tertinggi yaitu 293,80 ton/hektar. Produktivitas lahan dapat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari (musim), jumlah tenaga kerja, ketinggian pasang-surut air laut, dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Sementara itu produktivitas lahan paling rendah terdapat di Kabupaten Pohuwato yaitu sebesar 8,14 ton/hektar.

Dalam mewujudkan Swasembada Garam Nasional, mulai tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebagai bagian dari PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan PUGAR yang baru dimulai pada tahun 2011 sudah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui pemenuhan garam konsumsi didalam negeri yang selama ini masih dipenuhi oleh garam impor, sejak tahun 2012 Indonesia sudah tidak melakukan importasi garam konsumsi sehingga swasembada garam konsumsi sudah tercapai.

Program PUGAR bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat serta kesejahteraan petambak garam rakyat melalui prinsip pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui prinsip *bottom-up*, artinya masyarakat petambak garam secara partisipatif berperan aktif mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan lahan dan air laut, penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemilihan dan pemanfaatan teknologi, sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. Tabel berikut menyajikan keragaan PUGAR selama tahun 2011 sampai dengan 2014.

Tabel 5.6 Keragaan PUGAR Tahun 2011-2014

No.	Rincian	2011		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kabupaten	40	40	40	40	42	42	43	43
2	Jumlah Kelompok	750	1.728	3.035	3.473	3.347	3.521	898	2.268
3	Jumlah Petambak	14.400	16.399	29.746	32.610	22.422	32.447	6.289	18.802
4	Jumlah BLM (Rp. 000)	72.000.000	69.021.870	84.736.300	84.541.835	54.952.400	54.394.803	37.192.500	36.326.344
5	Luas Lahan Produksi (Ha)	4.365	10.973	16.570	20.871	22.043	24.208	26.834	27.898
6	Produksi Garam (Ton)	349.200	856.357	1.326.018	2.020.110	1.845.000	1.041.473	2.500.000	2.502.891
7	Produktivitas (Ton/Ha)	80,00	78,04	80,03	96,79	83,70	43,02	93,17	89,72
8	Musim Panas		4 bulan		5 bulan		2 bulan		5 bulan

Sumber: Laporan Akhir PUGAR (2014)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa produksi garam PUGAR sangat bergantung pada lama tidaknya musim panas yang terjadi sepanjang tahun. Realisasi produksi garam PUGAR pada tahun 2013 merupakan produksi yang paling rendah dibandingkan dengan tahun lainnya sebagai akibat dari pendeknya musim panas yang terjadi pada tahun tersebut. Sementara itu, peran anggaran pemerintah terhadap produksi garam PUGAR dirasa masih belum maksimal. Hal ini terlihat pada anggaran BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) di tahun 2014 yang merupakan anggaran terendah (Rp 36,33 milyar) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi produksi garam PUGAR merupakan yang tertinggi (2,50 juta ton) dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, secara umum hasil kinerja PUGAR selama ini sudah memberikan kontribusi positif. Keberhasilan ini perlu ditunjang dengan regulasi yang berpihak kepada petambak garam agar produksi garam para petambak dapat dilindungi dan terserap pasar, sehingga para petambak akan sejahtera.

Regulasi terkait dengan importasi garam sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 58/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 4 September 2012. Pada regulasi garam impor tersebut, masih perlu ada penyempurnaan, terutama ada ketegasan para importir garam untuk menyerap garam setempat. Demikian juga untuk menghindari rembesan garam industri yang diimpor tidak merembes ke pasar perlu ada pebedaan dalam penomoran "HS", antara garam industri dan garam konsumsi. Juga terkait dengan usulan agar dalam penentuan dalam masa panen raya, penentuan impor dan stok garam konsumsi cukup diwakili dinas teknis, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota.

5.3 Nilai Tukar Petambak garam

Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) merupakan rasio antara indeks harga komoditas yang diterima petambak garam (It) dari usahanya dengan indeks harga komoditas yang dibeli (Ib) petambak garam untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksinya. It NTPG menunjukkan kenaikan harga garam, baik garam tambak maupun rebusan, dibandingkan dengan tahun dasar (2014). Sedangkan Ib NTPG menunjukkan kenaikan harga komoditas

barang dan jasa yang dikonsumsi petambak garam baik untuk kebutuhan rumah tangga (IKRT) maupun kebutuhan produksi garam (BPPBM) dibandingkan dengan tahun 2014 sebagai tahun dasar. NTPG mencerminkan kemampuan atau daya tukar garam yang diproduksi oleh petambak garam terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan produksinya.

Dengan asumsi bahwa kuantitas barang dan jasa baik yang diterima maupun dibeli oleh petambak garam itu sama dengan tahun dasar, maka NTPG=100 artinya antara pendapatan dan pengeluaran petambak garam mengalami impas. Sedangkan jika NTPG<100 artinya pengeluaran petambak garam untuk kebutuhan KRT dan BPPBM lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari hasil usaha garamnya, atau mengalami defisit. NTPG>100 berarti bahwa penerimaan dari hasil usaha garam lebih besar dari pengeluarannya, atau mengalami *surplus*.

Secara rata-rata, NTPG tahun 2015 sampai dengan triwulan III adalah 100,42 dengan It 105,02 dan Ib 104,58. Artinya petambak garam masih mengalami surplus dari hasil usahanya. Dilihat dari It maka harga garam baik tambak maupun rebusan naik 5,02 persen dibandingkan dengan tahun dasar, begitu juga dengan Ib yang menunjukkan bahwa harga komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi petambak garam mengalami kenaikan 4,58 persen. Kenaikan harga produksi garam diikuti oleh naiknya harga-harga barang yang dibeli petambak garam, namun perbedaan kenaikan harga produksi garam yang sedikit lebih besar dari barang dan jasa untuk konsumsi membuat petambak garam tetap mendapatkan kelebihan dari hasil usahanya.

Tabel 5.7 Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2015

URAIAN	2015						
	Triwulan I	Perubahan (persen)	Triwulan II	Perubahan (persen)	Triwulan III	Perubahan (persen)	Kenaikan Rata-Rata
Indeks Harga yang Diterima	**102,54**	**5,31**	**108,06**	**5,38**	**104,46**	**-3,33**	**1,03**
Garam Tambak	102,59	5,56	108,38	5,64	104,49	-3,59	1,03
Garam Rebusan	101,61	0,38	101,13	-0,47	103,81	2,65	1,09
Indeks Harga yang Dibayar	**103,59**	**1,10**	**104,34**	**0,72**	**105,82**	**1,42**	**1,07**
KRT	104,72	1,83	105,61	0,85	107,67	1,95	1,40
BPPBM	101,87	-0,02	102,41	0,53	103,01	0,59	0,56
Nilai Tukar Petambak Garam	**98,99**	**4,17**	**103,56**	**4,62**	**98,71**	**-4,68**	**-0,03**

Sumber: Ditjen PRL - KKP (diolah)

Berdasarkan periode triwulanan, NTPG tertinggi terjadi pada triwulan II yaitu sebesar 103,56 naik 4,62 persen dari triwulan sebelumnya. It pada triwulan II adalah 108,06 dan Ib 104,34. Kenaikan It adalah sebesar 5,38 persen dari triwulan I, lebih tinggi dari kenaikan Ib sebesar 0,72 persen. Tingginya It dibandingkan Ib didorong oleh indeks harga garam tambak yang mencapai 108,38 meningkat 5,64 persen, sedangkan garam rebusan turun 0,47 persen menjadi 101,13. Diperkirakan pada periode ini terjadi puncak musim kemarau sehingga produksi garam tambak meningkat. Sedangkan garam rebusan cenderung tidak banyak mengalami kenaikan harga karena dalam proses produksinya tidak begitu dipengaruhi oleh musim.

NTPG terendah terjadi pada triwulan III sebesar 98,71 atau turun 4,68 persen, dengan It 104,46 dan Ib 105,82. Indeks harga garam tambak sebesar 104,49 mengalami penurunan 3,59 persen, sedangkan garam rebusan naik 2,65 persen menjadi 103,81. Pada triwulan III ini diperkirakan bahwa produksi tambak garam menurun akibat masuknya musim hujan.

NTPG Triwulan I adalah 98,99 tumbuh 4,17 persen dibandingkan triwulan akhir 2014, dengan It 102,54 dan Ib 103,59. It triwulan I merupakan yang terendah selama satu tahun, terutama garam tambak yang mencapai 102,59. Rendahnya It diperkirakan karena garam yang dijual merupakan sisa atau persediaan dari hasil panen pada akhir tahun sebelumnya, karena pada awal tahun 2015 merupakan tahap persiapan untuk memulai proses produksi menjelang musim kemarau.

Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 6

6 Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

6.1 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu proxy indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan nelayan di pedesaan pada tahun dan bulan tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTN kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTN sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

It NTN adalah indeks harga komoditas ikan yang dihasilkan nelayan. It NTN terdiri dari penangkapan ikan di Laut, dan penangkapan ikan di Perairan Umum. Perubahan It dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan harga dari sekelompok jenis ikan hasil tangkapan nelayan baik di laut maupun perairan umum, sehingga perubahan It dapat dipandang sebagai inflasi harga ikan di tingkat produsen.

Ib NTN merupakan indeks harga barang yang dibelanjakan oleh nelayan baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi dan penambahan barang modal. Ib NTN terdiri dari Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT), dan Indeks Barang Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBPPBM). Perubahan IKRT dari waktu ke waktu menggambarkan perubahan harga dari sekelompok barang/jasa yang dikonsumsi oleh nelayan di pedesaan untuk kebutuhan rumah tangganya, sehingga IKRT dapat dikatakan sebagai inflasi harga konsumen pedesaan untuk masyarakat nelayan.

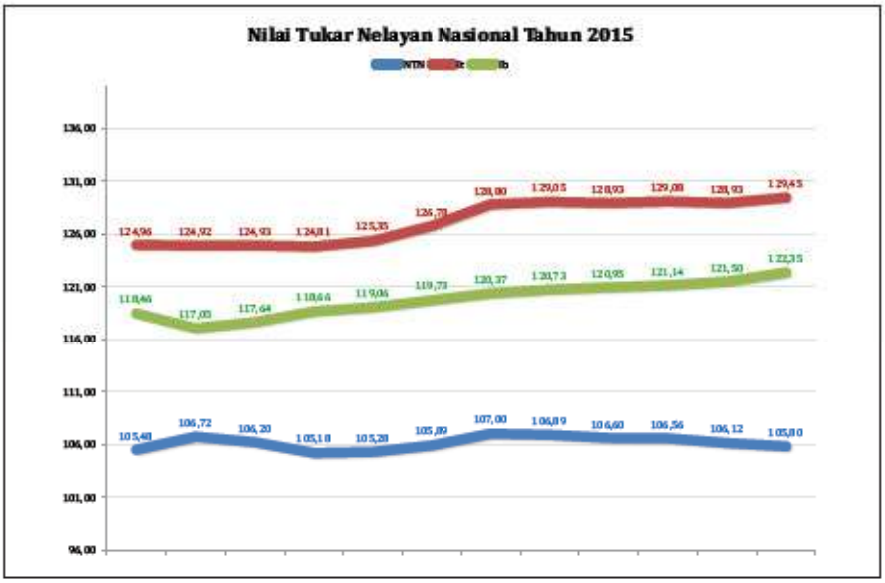

Gambar 6.1 Nilai Tukar Nelayan Nasional 2015

Tahun 2015 NTN nasional bergerak fluktuatif dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,03 persen mengikuti pergerakan harga kelompok komoditas barang/jasa pada It dan Ib. Pertumbuhan NTN tersebut akibat dari kenaikan rata-rata It sebesar 0,32 persen yang sedikit lebih tinggi dari kenaikan rata-rata Ib yaitu 0,30 persen. Artinya meskipun harga komoditas yang dibelanjakan nelayan rata-rata mengalami kenaikan dalam satu tahun namun tidak lebih besar dari kenaikan harga ikan hasil tangkapannya. Jika dilihat dari komponen Ib, secara rata-rata selama satu tahun transportasi untuk kebutuhan produksi mengalami penurunan 1,54 persen sedangkan Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain mengalami

kenaikan 2,27 persen. Sedangkan komponen It, kenaikan rata-rata pada penangkapan di laut adalah sebesar 0,32 persen dan penangkapan perairan umum mencapai 0,33 persen. Kenaikan harga komoditas ikan hasil tangkapan di laut sedikit lebih rendah dari kenaikan harga komoditas ikan hasil tangkapan di perairan umum.

Berdasarkan kenaikan per bulan, kenaikan tertinggi NTN terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 1,18 persen dari 105,48 pada bulan Januari menjadi 106,72. Hal ini disebabkan oleh perubahan Ib secara negatif dari Januari sebesar 6,57 persen, penurunan tersebut dipicu oleh transportasi dan komunikasi untuk kebutuhan rumah tangga turun 2,91 persen serta bahan makanan turun 1,03 persen.

Dilihat dari nilai indeksnya, rata-rata NTN nasional adalah sebesar 106,14. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 secara rata-rata nelayan mengalami surplus dari hasil usahanya dibandingkan dengan pengeluarannya akibat dari kenaikan harga produksi (It) lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksinya (Ib) terhadap tahun dasar. Rata-rata It adalah sebesar 127,17 artinya harga ikan hasil tangkapan nelayan mengalami kenaikan sebesar 27,17 persen dibandingkan dengan harga pada tahun dasar untuk jenis ikan yang sama dan kuantitas yang sama. Sedangkan rata-rata Ib adalah sebesar 119,80 berarti bahwa harga barang/jasa yang dibelanjakan nelayan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi mengalami kenaikan 19,80 persen dibandingkan dengan tahun dasar untuk jenis barang/jasa yang sama dan kuantitas yang sama.

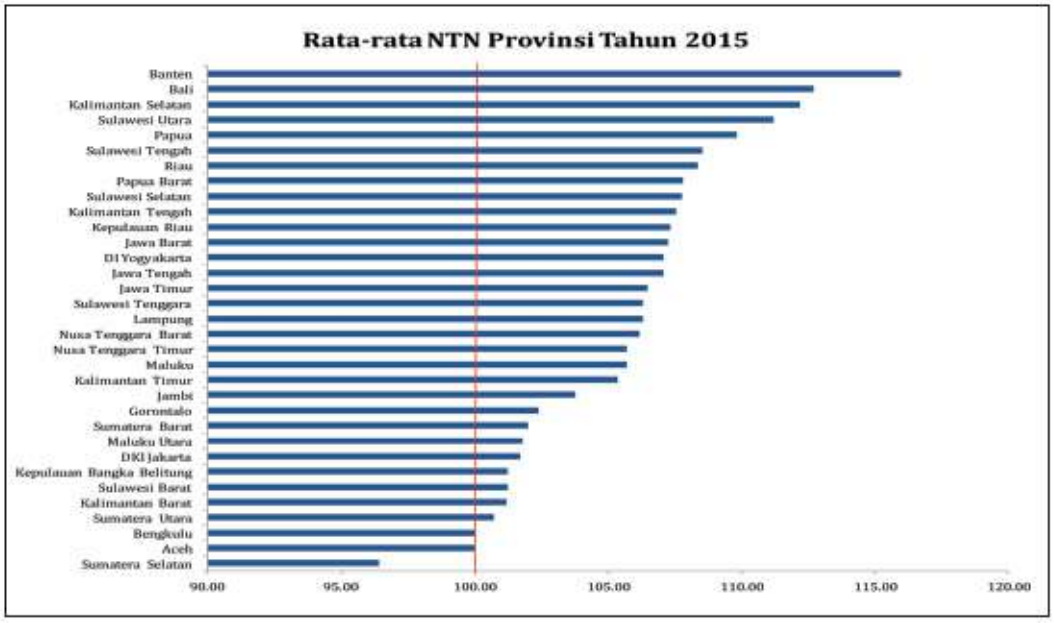

Gambar 6.2 Rata-Rata NTN Provinsi Tahun 2015

Provinsi dengan rata-rata NTN di bawah 100 adalah Sumatera Selatan sebesar 96,16 dan Nangroe Aceh Darussalam yaitu 99,97. Rata-rata It NTN Sumatera Selatan adalah 114,31 dengan indeks Penangkapan Perairan Umum sebesar 124,88 dan Penangkapan Laut sebesar 107,07. Sedangkan Ib-nya mencapai 117,83 dengan indeks KRT 120,18 dan indeks BPPBM mencapai 116,25.

Jika dilihat dari kenaikan rata-ratanya maka provinsi dengan kenaikan NTN tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,25 persen, sedangkan provinsi dengan penurunan NTN terbesar adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,68 persen.

6.2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Seperti halnya NTN, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan pembudidaya ikan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga

maupun kebutuhan produksinya. NTPi merupakan rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTPi lebih dari 100 artinya pembudidaya ikan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTPi kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran pembudidaya ikan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTPi sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

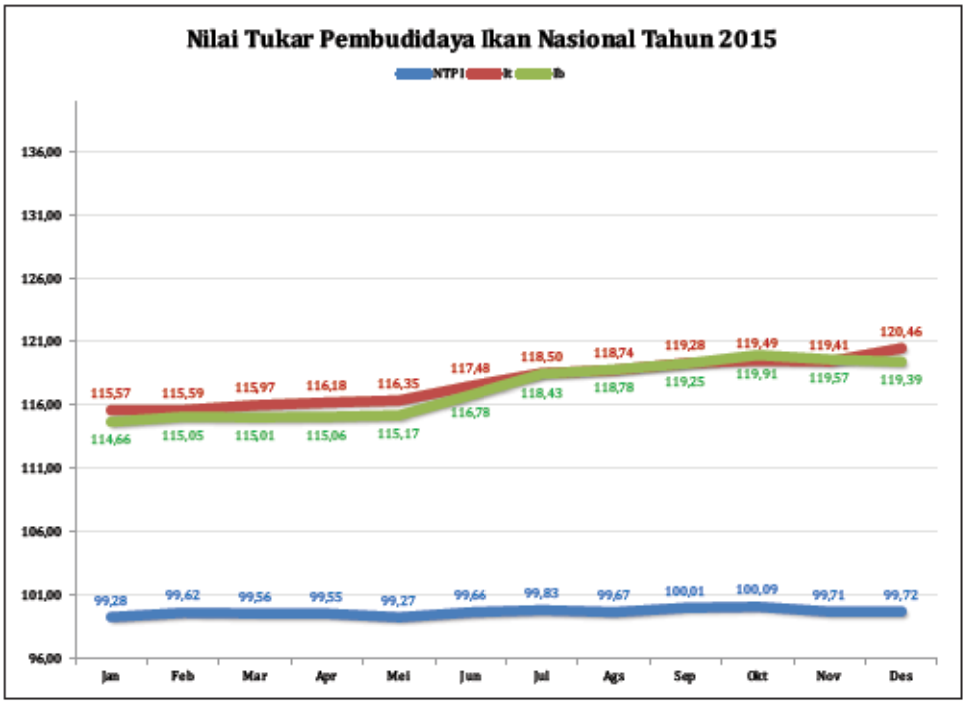

Gambar 6.3 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Nasional 2015

Tahun 2015 kenaikan rata-rata NTPi nasional adalah sebesar 0,04 persen mengikuti pergerakan harga kelompok komoditas barang/jasa pada It dan Ib-nya. Pertumbuhan NTPi tersebut disebabkan oleh kenaikan rata-rata It sebesar 0,38 persen yang sedikit lebih tinggi dari kenaikan rata-rata Ib yaitu 0,34 persen. Artinya meskipun harga komoditas yang dibelanjakan pembudidaya ikan rata-

rata mengalami kenaikan dalam satu tahun namun tidak lebih besar dari kenaikan harga ikan hasil budidayanya. Jika dilihat dari komponen Ib, secara rata-rata selama satu tahun transportasi untuk kebutuhan produksi mengalami penurunan 1,39 persen sedangkan Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain mengalami kenaikan 2,02 persen. Sedangkan komponen It, kenaikan rata-rata pada budidaya air tawar adalah sebesar 0,43 persen, budidaya laut sebesar 0,19 persen, dan budidaya air payau mencapai 0,37 persen. Kenaikan harga komoditas ikan hasil budidaya air tawar merupakan yang tertinggi di antara dua jenis budidaya lainnya.

Berdasarkan kenaikan per bulan, kenaikan tertinggi NTPi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 0,4 persen dari 99,27 pada bulan Mei menjadi 99,66. Hal ini disebabkan oleh perubahan Ib (0,57 persen) lebih kecil dari perubahan It (0,97 persen).

Dilihat dari nilai indeksnya, rata-rata NTPi nasional adalah sebesar 99,66. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 secara rata-rata Pembudidaya Ikan mengalami defisit dari hasil usahanya dibandingkan dengan pengeluarannya akibat dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksinya (Ib) lebih besar dari kenaikan harga produksi (It) terhadap tahun dasar. Rata-rata It adalah sebesar 117,75 artinya harga ikan hasil budidaya mengalami kenaikan sebesar 17,75 persen dibandingkan dengan harga pada tahun dasar untuk jenis ikan yang sama dan kuantitas yang sama. Sedangkan rata-rata Ib adalah sebesar 118,15 berarti bahwa harga barang/jasa yang dibelanjakan pembudidaya ikan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi mengalami kenaikan 18,15persen dibandingkan dengan tahun dasar untuk jenis barang/jasa yang sama dan kuantitas yang sama.

Hanya sebanyak 11 provinsi yang memiliki rata-rata NTPi di atas 100, antara lain: Jawa Tengah (100,22), Sumatera Selatan (101,02), Sulawesi Selatan (102,08), Riau (102,42), Kalimantan Selatan (102,66), Jawa Timur (104,94), DIY (105,29), Sumatera Barat (108,22), Kepulauan Riau (108,44), Maluku (108,81), dan Maluku Utara (109,19). Sedangkan 22 provinsi lainnya memiliki rata-rata NTPi kurang dari 100. Jika dilihat dari kenaikan rata-ratanya maka provinsi dengan kenaikan NTPi tertinggi adalah Bali sebesar 1,54 persen, sedangkan provinsi dengan penurunan NTPi terbesar adalah Maluku Utara sebesar 1,58 persen.

Angka Konsumsi Ikan Dalam Negeri 7

Angka Konsumsi Ikan Dalam Negeri 7

7.1 Penyediaan Ikan Konsumsi

Penyediaan konsumsi ikan diperoleh dari penjumlahan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, dan impor ikan dikurangi dengan ekspor ikan. Penyediaan ikan ini berguna untuk mengetahui seberapa banyak jumlah ikan untuk konsumsi yang dapat disediakan oleh pemerintah untuk kebutuhan konsumsi.

Penyediaan konsumsi ikan untuk konsumsi domestik tahun 2014 mencapai 13,07 juta ton atau meningkat sebesar 10,01 persen dibandingkan tahun 2013. Peningkatan penyediaan ikan diikuti juga dengan peningkatan penyediaan ikan per kapita yang mencapai 51,80 Kg/Kap/Tahun atau meningkat sebesar 8,44 persen dibandingkan tahun 2013. *Trend* penyediaan ikan untuk konsumsi tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan sebesar 9,50 persen, rata-rata penyediaan ikan sebesar 11,18 juta ton, standar deviasi sebesar 1,52 juta ton, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) antara 9,29 juta – 13,08 juta ton.

Trend penyediaan ikan per kapita tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan sebesar 7,85 persen, rata-rata penyediaan ikan per kapita sebesar 45,53 Kg/Kap/Tahun, standar deviasi sebesar 5,18 Kg/Kap/Tahun, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) antara 39,10 – 51,97 Kg/Kap/Tahun. Berdasarkan statistik tersebut dapat diketahui bahwa meskipun penyediaan ikan untuk konsumsi domestik tahun 2014 meningkat sebesar 10,01 persen

dibandingkan tahun 2013 dan penyediaan ikan per kapita tahun 2014 meningkat sebesar 8,44 persen dibandingkan tahun 2013, namun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan.

Tabel7.1 Penyediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Angka Konsumsi Ikan, 2010-2014

Rincian - Item		Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
Penyediaan Ikan	Total (1000 Ton)	9.119	10.282	11.588	11.882	13.072
	Per Kapita (Kg/Kap/Th)	38,39	42,49	47,22	47,77	51,80
Konsumsi Ikan	Per Kapita (Kg/Kap/Th)	30,48	32,25	33,89	35,21	38,14

Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP

7.2 Angka Konsumsi Ikan

Berdasarkan perhitungan angka konsumsi ikan yang dihitung dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dapat diketahui angka konsumsi riil rumah tangga pedesaan dan perkotaan, angka konsumsi riil rumah tangga berdasarkan komoditas perikanan, dan mampu menggambarkan kondisi suatu wilayah sebagai wilayah target pasar atau wilayah target produksi.

Peningkatan penyediaan ikan tahun 2014 sudah mulai diikuti dengan peningkatan konsumsi ikan, hal ini terlihat dari peningkatan penyediaan ikan (kg/kap/tahun) tahun 2013-2014 sebesar 8,44 persen sedangkan peningkatan konsumsi ikan (kg/kap/tahun) tahun 2013-2014 sebesar 8,32 persen. Bahkan peningkatan konsumsi ikan tahun 2013-2014 lebih besar dari peningkatan ikan tahun 2010-2014 (5,78 persen).

Trend peningkatan konsumsi ikan tahun 2010-2014 menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,78 persen, rata-rata konsumsi ikan sebesar 33,99 kg/kap/tahun, standar deviasi sebesar 2,92 kg/kap/tahun, dan 95persen *Confidence Interval* (CI) antara 30,37 – 37,62 Kg/Kap/Tahun. Statistik tersebut menunjukkan bahwa konsumsi ikan (kg/kap/tahun) tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan, karena pencapaian tahun 2014 terletak di atas batas atas interval. Peningkatan konsumsi ikan selama 5 tahun terakhir merupakan

hasil dukungan dari berbagai kegiatan atau kampanye tentang gemar ikan kepada masyarakat. Penyediaan ikan dan konsumsi ikan (kg/kap/tahun) tahun 2010-2014 terdapat dalam gambar 7.1.

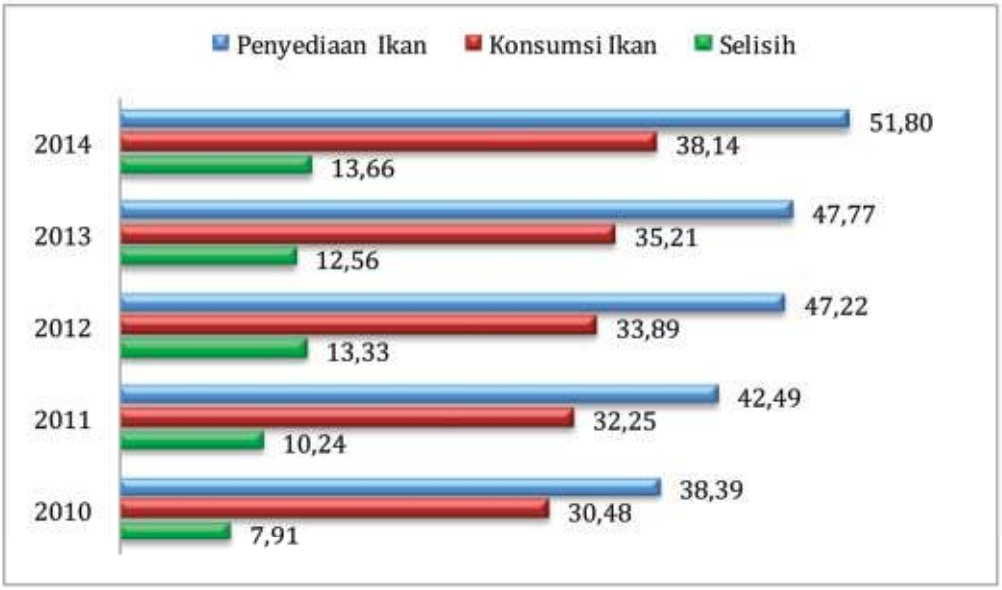

Gambar 7.1 Penyediaan Ikan dan Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun), 2010-2014

10 (sepuluh) jenis ikan yang dikonsumsi masyarakat tertinggi berdasarkan preferensi di rumah tangga nasional tahun 2013 antara lain tuna, tongkol, cakalang (12,71 persen), konsumsi ikan dalam makanan jadi (8,63 persen), kembung (6,91 persen), teri awet/asin (4,99 persen), bandeng (4,91 persen), mujair/nila (4,90 persen), selar (3,47 persen), lele (3,30 persen), ikan mas(2,59 persen), dan gabus (2,40 persen).

Produksi ikan terhadap sumber protein hewani lainnya, terdapat dalam tabel 7.2.

Tabel 7.2 Perbandingan Produksi Ikan sebagai Sumber Protein Hewani dibandingan Produk Lainnya (Ton)

Satuan: Ton

Komoditas	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Daging	55.331	2.070	2.170	2.093	1.164	1.163	1.198
Susu Sapi Perah	341.000	577.000	636.000	574.000	679.000	927.000	925.000
Telur	1.148.000	1.133.000	1.297.000	1.390.000	1.404.000	1.378.000	1.432.000
Ikan	6.869.543	7.488.708	8.238.300	8.858.315	9.816.534	11.662.342	12.385.850

Kandungan omega 3 yang terdapat dalam ikan lebih tinggi dibandingkan daging lainnya. Perbandingan tersebut terdapat dalam tabel 7.3.

Tabel 7.3 Perbandingan Kandungan Omega 3 Ikan dengan Daging Lainnya

BAHAN BAKU	KANDUNGAN OMEGA 3 *
Seafood :	>> 100
- Ikan	210
- Tiram	150
- Udang	120
- Lobster	105
Daging Sapi	22
Daging Ayam	19
Daging Kambing	18
Daging Babi	0

*) Mg/100 Gr bahan baku

Sumber: Word Health & Seafood Congress 2005

Konsumsi ikan terbesar tahun 2014 (angka sementara) terdapat pada Provinsi Maluku (54,12 kg/kap/tahun), Provinsi Sulawesi Tenggara (50,77 kg/kap/tahun), Provinsi Kep. Riau (49,24 kg/kap/tahun), Provinsi Maluku Utara (48,88 kg/kap/tahun), Provinsi Papua Barat (48,16 kg/kap/tahun), dan Provinsi Sulawesi Utara (47,83 kg/kap/tahun). Konsumsi ikan tersebut sesuai dengan pengeluaran perkapita dalam setahun Provinsi Maluku sebesar Rp. 575.904,-; Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 546.942,-; Provinsi Kep. Riau sebesar Rp. 725.724,-; Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 575.904,-; Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 676.578,- dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 606.222,-.

Perincian pengeluaran perkapita dalam setahun provinsi-provinsi tersebut terdapat dalam gambar 7.2.

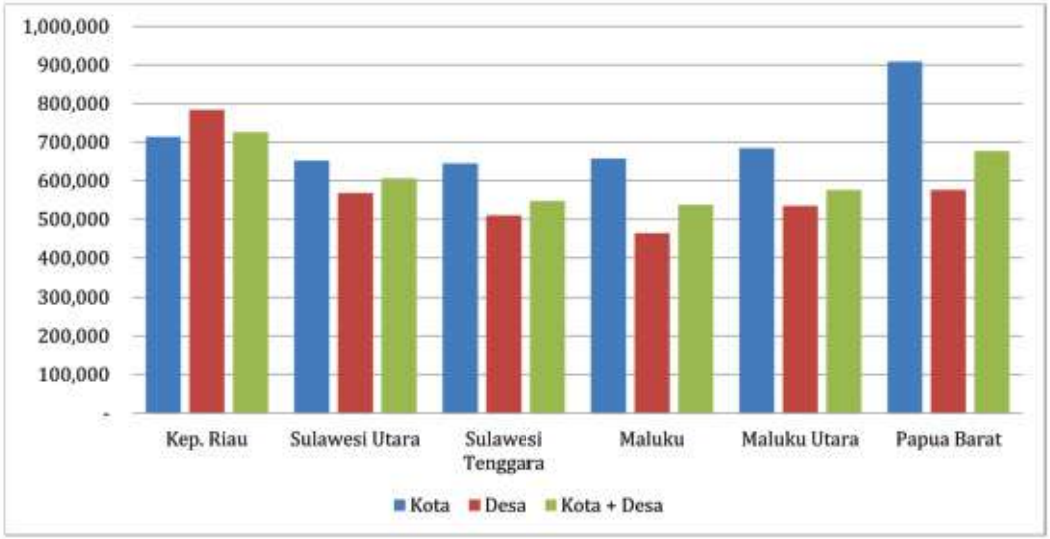

Gambar 7.2 Perincian Pengeluaran Perkapita dalam Setahun (Rupiah)

Berdasarkan pertumbuhan konsumsi ikan tahun 2013-2014, provinsi dengan pertumbuhan terbesar (pertumbuhan diatas 10 persen) antara lain Provinsi DI Yogyakarta (30,96 persen), Provinsi Bengkulu (15,05 persen), Provinsi Jawa Timur (14,02 persen), Provinsi Bali (13,69 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (13,24 persen), Provinsi Sumatera Selatan (10,49 persen). Berdasarkan pertumbuhan konsumsi ikan tahun 2010-2014, provinsi dengan pertumbuhan terbesar (pertumbuhan diatas 10 persen) antara lain Provinsi DI Yogyakarta (22,28 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (14,78 persen), Provinsi Jawa Tengah (12,31 persen), Provinsi DKI (11,46 persen), dan Provinsi Jawa Timur (10,12 persen). Hal ini menujukkan bahwa meskipun Provinsi DI Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan konsumsi ikan rendah (21,74 kg/kap/tahun) namun berdasarkan pertumbuhan tahun 2010-2014 dan tahun 2013-2014, Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki potensi untuk mampu meningkatkan konsumsi terhadap komoditas ikan. Konsumsi ikan menurut provinsi tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam tabel 7.2.

Tabel 7.4 Konsumsi Ikan Menurut Provinsi, 2010-2014 (kg/kap/ tahun)

No	Provinsi	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Nasional	**30,48**	**32,25**	**33,89**	**35,21**	**38,14**
1	Aceh	40,49	40,96	41,69	43,34	45,83
2	Sumatera Utara	33,18	35,54	35,59	36,58	39,06
3	Sumatera Barat	29,27	29,53	31,18	33,32	34,16
4	Riau	37,19	37,85	38,04	39,07	41,74
5	Jambi	29,73	31,55	31,94	34,31	33,52
6	Sumatera Selatan	29,32	30,42	35,31	35,85	39,61
7	Bengkulu	23,38	25,52	26,8	27,97	32,18
8	Lampung	21,65	22,31	24,41	25,30	26,61
9	Kep. Bangka Belitung	37,54	38,82	45,75	45,93	47,04
10	Kep. Riau	44,33	46,86	45,96	47,26	49,24
11	DKI Jakarta	21,44	25,14	31,31	32,95	32,55
12	Jawa Barat	19,52	20,79	22,67	25,28	24,56
13	Jawa Tengah	12,81	15,51	17,71	19,16	20,27
14	DI Yogyakarta	9,92	13,60	14,55	16,60	21,74
15	Jawa Timur	19,01	21,41	23,35	24,46	27,89
16	Banten	21,50	24,89	28,36	28,98	30,65
17	Bali	23,25	24,40	24,75	27,91	31,73
18	Nusa Tenggara Barat	18,54	26,09	28,67	29,23	31,15
19	Nusa Tenggara Timur	20,06	21,21	23,16	24,70	27,97
20	Kalimantan Barat	28,73	31,53	32,88	34,49	36,58
21	Kalimantan Tengah	44,07	44,36	44,97	46,78	46,19
22	Kalimantan Selatan	39,36	42,69	44,63	44,97	46,47
23	Kalimantan Timur	36,07	37,99	39,18	39,37	41,81
24	Sulawesi Utara	38,26	41,71	43,08	43,75	47,83
25	Sulawesi Tengah	37,21	38,35	40,25	41,55	43,40
26	Sulawesi Selatan	41,22	42,08	41,77	44,30	47,13
27	Sulawesi Tenggara	44,45	46,09	47,51	48,77	50,77
28	Gorontalo	40,66	40,91	43,73	44,07	47,74
29	Sulawesi Barat	39,07	42,76	44,76	44,93	46,16
30	Maluku	48,16	48,87	49,86	50,67	54,12
31	Maluku Utara	44,86	45,19	46,37	46,71	48,88
32	Papua Barat	41,29	41,83	42,73	44,02	48,16
33	Papua	32,80	33,62	34,58	36,04	35,90

Sumber: Ditjen PDSPKP

Analisis cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis cluster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama. Cluster-cluster yang terbentuk memiliki homogenitas internal yang tinggi dan heterogenitas eksternal yang tinggi.

Ciri suatu cluster yang baik yaitu mempunyai:

a. Homogenitas internal (*within cluster*) yaitu kesamaan antar anggota dalam cluster.
b. Heterogenitas external (*between cluster*) yaitu perbedaan antara cluster yang satu dengan yang lain.

Adapun metode pengelompokan dalam analisis cluster meliputi :

a. Metode Hirarkis; memulai pengelompokan dengan dua atau lebih obyek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian diteruskan pada obyek yang lain dan seterusnya hingga cluster akan membentuk semacam 'pohon' dimana terdapat tingkatan (hirarki) yang jelas antar obyek, dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Alat yang membantu untuk memperjelas proses hirarki ini disebut "*dendogram*".
b. Metode Non-Hirarkis; dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan (dua, tiga, atau yang lain). Metode ini biasa disebut "*K-Means Cluster*".

Konsumsi ikan menurut provinsi dapat dikelompokan berdasarkan pencapaian konsumsi ikan. Hasil dari analisis cluster ini sama dengan ketentuan pengelompokan dari Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dimana pengelompokan didasarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok konsumsi ikan tinggi: Angka konsumsi diatas 31,4 kg/kap/tahun;

2. Kelompok konsumsi ikan sedang: Angka konsumsi antara 20 kg/kap/tahun - 31,4 kg/kap/tahun; dan

3. Kelompok konsumsi ikan rendah: Angka konsumsi dibawah 20 kg/kap/tahun.

Berdasarkan analisis cluster terhadap konsumsi ikan menurut provinsi tahun 2010-2014, konsumsi ikan menurut provinsi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Konsumsi Ikan diatas 35 kg/kap/tahun, antara lain Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Kep. Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat (penulisan berdasarkan urutan provinsi bukan berdasarkan pencapaian konsumsi ikan).

2. Kelompok Konsumsi Ikan dibawah 35 kg/kap/tahun, antara lain Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Kalimantan Barat (penulisan berdasarkan urutan provinsi bukan berdasarkan pencapaian konsumsi ikan).

Ekspor dan Impor Hasil Perikanan 8

Ekspor dan Impor Hasil Perikanan 8

8.1 Ekspor dan Impor Hasil Perikanan Tahun 2015

Total volume ekspor hasil perikanan Indonesia pada periode Januari-Oktober 2015 turun 16,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dimana volume ekspor hasil perikanan Indonesia periode Januari-Oktober 2014 sebesar 1,05 juta ton turun menjadi 872 ribu ton pada periode yang sama tahun 2015. Sedangkan jika dilihat dari segi nilai, ekspor hasil perikanan Indonesia mengalami penurunan sebesar 14,59 persen, yaitu dari US$ 3,83 milyar pada periode Januari-Oktober 2014 turun menjadi US$ 3,27 milyar pada periode yang sama tahun 2015.

Jika dilihat dari kontribusi masing-masing komoditas terhadap nilai ekspor hasil perikanan, maka udang merupakan penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan periode Januari-Oktober 2015 yaitu sebesar US$ 1,37 milyar (41,87 persen) dari total nilai ekspor hasil perikanan Indonesia. Peringkat ke-2 diduduki oleh komoditas tuna, tongkol, cakalang yaitu sebesar US$ 492 juta (15,03 persen), selanjutnya yaitu kepiting sebesar US$ 266 juta (8,12 persen).

Nilai ekspor komoditas makarel pada periode Januari-Oktober tahun 2015 meningkat 101,98 persen menjadi US$ 31,53 juta, dimana nilai ekspor makarel pada periode yang sama tahun 2014 sebesar US$ 15,61 juta. Kenaikan nilai ekspor terbesar kedua setelah komoditas makarel ditempati oleh ikan salem, yaitu naik sebesar 60,66 persen. Nilai ekspor ikan salem pada periode Januari-Oktober 2014

sebesar US$ 42,78 juta meningkat menjadi US$ 68,73 juta pada periode yang sama tahun 2015. Adapun komoditas lain yang mengalami peningkatan nilai ekspor pada periode ini adalah cumi-cumi, sotong, dan gurita (27,63 persen), kerapu (16,54 persen) dan mutiara (9,81 persen).

Sedangkan jika dilihat dari segi volume ekspor hasil perikanan, komoditas makarel mempunyai peningkatan volume ekspor paling tinggi yaitu sebesar 86,17 persen. Pada periode Januari-Oktober 2014, volume ekspor komoditas makarel sebesar 9,23 juta ton meningkat menjadi 17,19 juta ton pada periode yang sama tahun 2015. Urutan kedua ditempati oleh komoditas mutiara dengan peningkatan volume ekspor sebesar 52,67 persen, dimana volume ekspor mutiara pada periode Januari-Oktober 2014 sebesar 406 ribu ton meningkat menjadi 619 ribu ton pada periode yang sama tahun 2015. Adapun komoditas lain yang mengalami peningkatan volume ekspor pada periode ini diantaranya adalah cumi-cumi, sotong, dan gurita (23,47 persen), rumput laut dan ganggang lainnya (5,01 persen), dan udang (1,11 persen).

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) telah menetapkan bahwa persentase nilai impor hasil perikanan harus lebih kecil 20 persen dari total nilai ekspor, dengan memperhatikan standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri. Pada periode Januari-Oktober 2015, nilai impor dan ekspor hasil perikanan Indonesia masing-masing sebesar US$ 331 juta dan US$ 3,27 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan nilai impor dan nilai ekspor pada periode Januari-Oktober 2015 adalah sebesar 10,12 persen, masih dibawah 20 persen sesuai ketetapan Ditjen PDSPKP, KKP.

Realisasi nilai impor hasil perikanan turun sebesar 5,34 persen pada bulan Oktober tahun 2015 dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Oktober 2015, nilai impor hasil perikanan Indonesia turun menjadi US$ 331 juta (sebesar 257 ribu ton), dimana nilai impor hasil perikanan pada periode yang sama tahun 2014 sebesar US$ 350 juta (sebesar 254 ribu ton).

Komposisi komoditas impor hasil perikanan terbesar pada periode Januari-Oktober 2015 adalah jenis tepung, tepung kasar, dan pellet dengan volume sebesar 122 ribu ton (47,42 persen) dari total volume impor hasil perikanan, diikuti oleh makarel sebesar 61 ribu ton (23,61 persen), serta ikan sarden sebesar 19 ribu ton (7,38 persen). Meskipun demikian, impor komoditas tepung, tepung kasar, dan pellet pada periode ini mengalami penurunan sebesar 2,58 persen, yaitu dari US$ 117 juta pada periode Januari-Oktober 2014 menjadi US$ 144 juta pada periode yang sama tahun 2015. Hal ini diikuti juga dengan penurunan nilai impor komoditas makarel sebesar 0,86 persen, dimana nilai impor makarel pada periode Januari-Oktober 2014 sebesar US$ 55,25 juta turun menjadi US$ 54,78 juta. Sedangkan nilai impor ikan sarden mengalami penurunan terbesar dibandingkan dengan komoditas lainnya, yaitu sebesar 34,49 persen. Pada periode Januari-Oktober 2014, nilai impor ikan sarden sebesar US$ 20,86 juta turun menjadi US$ 13,67 juta pada periode yang sama tahun 2015.

Komoditas mutiara mengalami kenaikan volume ekspor sebesar 52,67 persen pada periode Januari-Oktober 2015. Disisi lain volume impor komoditas mutiara menunjukan penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 71,75 persen pada periode yang sama. Hal ini menunjukan bahwa komoditas ini memiliki prospek yang sangat baik dalam perdagangan ekspor internasional.

Berbanding terbalik dengan komoditas mutiara, komoditas ikan hias justru mengalami penurunan volume ekspor yang signifikan yaitu sebesar 15 persen. Pada periode Januari-Oktober 2014 volume ekspor ikan hias sebesar 1.380 ton turun menjadi 1.169 ton pada periode yang sama tahun 2015. Sementara itu, impor ikan hias menunjukan kondisi yang kontraproduktif yaitu mengalami peningkatan sebesar 122,84 persen. Pada periode Januari sampai dengan Oktober 2014 volume ekspor ikan hias sebesar 2 ton meningkat menjadi 5 ton pada periode yang sama tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa komoditas ikan hias belum dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Tabel 8.1 Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Tahun 2015

No	Komoditi	Volume (Kg)		Nilai (US$)		Trend (%)		Kontribusi Volume (%)		Kontribusi Nilai (%)	
		2014	2015	2014	2015	Volume	Nilai	2014	2015	2014	2015
1	Udang	158.875.834	160.639.740	1.743.452.232	1.370.466.390	1,11	-21,39	15,14	18,41	45,50	41,87
2	Tuna, Tongkol, Cakalang	173.830.492	142.023.097	576.281.781	491.981.470	-18,30	-14,63	16,57	16,28	15,04	15,03
3	Kepiting atau Rajungan	23.628.367	19.936.594	345.880.705	265.911.128	-15,62	-23,12	2,25	2,29	9,03	8,12
4	Rumput Laut dan Ganggang Lainnya	168.533.214	176.980.020	230.932.974	178.090.553	5,01	-22,88	16,06	20,29	6,03	5,44
5	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita	60.376.483	74.546.146	122.515.154	156.360.406	23,47	27,63	5,76	8,55	3,20	4,78
6	Tilapia	14.214.472	12.307.367	79.389.572	73.504.637	-13,42	-7,41	1,35	1,41	2,07	2,25
7	Ikan Salem	23.998.886	21.998.582	42.781.645	68.731.060	-8,33	60,66	2,29	2,52	1,12	2,10
8	Makarel	9.234.914	17.192.499	15.610.263	31.529.200	86,17	101,98	0,88	1,97	0,41	0,96
9	Sarden	14.089.489	12.572.108	31.771.362	27.320.455	-10,77	-14,01	1,34	1,44	0,83	0,83
10	Kerapu	8.688.159	5.588.484	22.849.563	26.628.342	-35,68	16,54	0,83	0,64	0,60	0,81
11	Mutiara	405.583	619.206	23.902.552	26.247.554	52,67	9,81	0,04	0,07	0,62	0,80
12	Ikan Hias	1.380.492	1.169.176	17.072.371	16.354.168	-15,31	-4,21	0,13	0,13	0,45	0,50
13	Lainnya	391.825.305	226.806.469	579.585.818	539.959.946	-42,12	-6,84	37,35	26,00	15,12	16,50
	Jumlah	**1.049.081.690**	**872.379.488**	**3.832.025.992**	**3.273.085.306**	**-16,84**	**-14,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Tabel 8.2 Impor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Tahun 2015

No	Komoditas	Volume (Kg)		Nilai US$		Trend (%)		Kontribusi Volume (%)		Kontribusi Nilai (%)	
		2014	2015	2014	2015	Volume	Nilai	2014	2015	2014	2015
1	Tepung, Tepung Kasar, Pellet	119.319.147	121.735.287	116.832.964	113.814.725	2,02	-2,58	46,93	47,42	33,39	34,36
2	Makarel	58.159.917	60.606.257	55.255.657	54.781.306	4,21	-0,86	22,87	23,61	15,79	16,54
3	Kepiting atau Rajungan	4.435.934	3.771.692	42.983.195	34.048.278	-14,97	-20,79	1,74	1,47	12,28	10,28
4	Tuna, Tongkol, Cakalang	6.266.916	11.432.900	13.736.178	18.320.515	82,43	33,37	2,46	4,45	3,93	5,53
5	Sarden	28.925.901	18.952.974	20.861.422	13.666.814	-34,48	-34,49	11,38	7,38	5,96	4,13
6	Ikan Salem	1.608.930	2.135.883	8.057.437	13.532.700	32,75	67,95	0,63	0,83	2,30	4,09
7	Lemak dan Minyak Ikan	7.888.834	5.759.403	16.121.575	12.179.222	-26,99	-24,45	3,10	2,24	4,61	3,68
8	Udang	1.805.054	1.411.102	13.013.903	9.361.106	-21,82	-28,07	0,71	0,55	3,72	2,83
9	Ikan Pedang	1.672.581	1.259.731	11.980.433	9.241.199	-24,68	-22,86	0,66	0,49	3,42	2,79
10	Rumput Laut dan Ganggang Lainnya	709.513	633.195	6.193.312	7.620.344	-10,76	23,04	0,28	0,25	1,77	2,30
11	Mutiara	4.640	1.311	156.893	107.585	-71,75	-31,43	0,00	0,00	0,04	0,03
12	Ikan Hias	2.246	5.005	32.705	116.718	122,84	256,88	0,00	0,00	0,01	0,04
13	Lainnya	23.472.745	29.011.081	44.674.295	44.423.334	23,59	-0,56	9,23	11,30	12,77	13,41
	Jumlah	**254.272.358**	**256.715.821**	**349.899.969**	**331.213.846**	**0,96**	**-5,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Keterangan:
1. Sumber BPS diolah Ditjen PDSPKP
2. Data sampai dengan bulan Oktober (Januari - Oktober 2015/2014)

Peranan ekspor hasil perikanan terhadap total ekspor produk non migas pada tahun 2015 adalah sebesar 0,23 persen (volume) dan 2,98 persen (nilai), seperti terlihat pada tabel 8.3. Peranan volume dan nilai tersebut terlihat relatif stabil sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2015.

Tabel83 Peranan Ekspor Hasil Perikanan Terhadap Ekspor Produk Non Migas 2015

Bulan	Ekspor Produk Ikan		Ekspor Non Migas		Peranan % Terhadap Non migas	
	Volume (Juta Kg)	Nilai (Juta US$)	Volume (Juta Kg)	Nilai (Juta US$)	Volume	Nilai
Januari	86,01	330,43	39.889,44	11.285,91	0,22	2,93
Februari	77,35	307,18	36.402,77	10.419,41	0,21	2,95
Maret	89,30	352,94	44.336,04	11.645,44	0,20	3,03
April	88,73	354,85	40.370,91	11.645,49	0,22	3,05
Mei	86,11	326,60	37.089,63	11.319,94	0,23	2,89
Juni	87,36	334,35	36.930,04	12.066,19	0,24	2,77
Juli	72,93	257,72	37.286,17	10.043,94	0,20	2,57
Agustus	91,64	321,02	37.828,38	11.195,91	0,24	2,87
Septenber	92,22	320,17	37.248,39	11.134,80	0,25	2,88
Oktober	101,06	357,06	39.796,99	10.742,51	0,25	3,32
November	101,83	340,31	36.522,05	9.581,44	0,28	3,55
Total	**974,55**	**33.602,63**	**423.700,81**	**121.080,98**	**0,23**	**2,98**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Peranan nilai ekspor hasil perikanan terhadap nilai ekspor produk non migas ke beberapa negara tujuan mengalami peningkatan, diantaranya adalah ke negara tujuan China, Malaysia, Singapura, Italia, dan Hongkong.

Tabel 8.4 Nilai Ekspor Produk Ikan Menurut Negara Tujuan (JutaUS$)

Satuan : Juta US$

Nagara Tujuan	2014			2015		
	Ekspor Non Migas	Ekspor Produk Ikan	Peranan (%)	Ekspor Non Migas	Ekspor Produk Ikan	Peranan (%)
United States	15.856,98	1.843,81	11,63	13.983,82	1.342,92	9,6
Japan	14.565,75	733,03	5,03	11.906,02	575,78	4,84
China	16.459,09	410,83	2,50	12.028,35	316,14	2,63
Malaysia	6.397,24	106,45	1,66	5.739,58	128,93	2,25
Vietnam	2.436,34	132,62	5,44	2.445,66	124,57	5,09
Singapore	10.065,90	98,46	0,98	7.977,63	102,84	1,29
Thailand	5.002,92	165,27	3,30	4.277,44	96,67	2,26
United Kingdom	1.658,61	112,63	6,79	1.403,92	87,07	6,2
Italy	2.286,52	94,89	4,15	1.745,98	81,74	4,68
Hongkong	2.777,56	88,82	3,20	1.914,34	74,79	3,91
Lainnya	68.454,31	855,10	1,25	57.658,24	671,18	1,16
Total	**145.961,21**	**4.641,91**	**3,18**	**121.080,98**	**3.602,63**	**2,98**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 8.5 Peranan Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Negara Tujuan 2015

Satuan: Juta Kg

Negara Tujuan	2014			2015		
	Ekspor Non Migas	Ekspor Produk Ikan	Peranan (%)	Ekspor Non Migas	Ekspor Produk Ikan	Peranan (%)
United States	5.445,94	168,02	3,09	4.730,28	148,63	3,14
Japan	40.569,49	108,85	0,27	34.512,70	99,85	0,29
China	122.182,99	344,37	0,28	82.312,38	233,92	0,28
Malaysia	18.405,51	58,06	0,32	18.833,05	60,75	0,32
Vietnam	3.236,33	75,95	2,35	3.852,98	70,59	1,83
Singapore	13.808,35	39,39	0,29	11.878,66	35,60	0,30
Thailand	18.960,55	198,87	1,05	18.917,11	66,92	0,35
United	430,64	17,33	4,02	453,82	13,43	2,96
Italy	5.231,36	18,57	0,35	4.450,97	17,09	0,38
Hongkong	12.792,10	16,77	0,13	9.265,20	15,40	0,17
Lainnya	266.659,08	228,82	0,09	234.493,66	212,38	0,09
Total	**507.722,33**	**1.274,98**	**0,25**	**423.700,81**	**974,55**	**0,23**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sedangkan jika dari sisi volume, peranan ekspor hasil perikanan terhadap ekspor produk non migas ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Malaysia, Singapura, Italia, dan Hongkong mengalami peningkatan (tabel 8.5).

Berdasarkan tabel 8.4 dan tabel 8.5 diatas, terlihat bahwa peranan ekspor hasil perikanan terhadap ekspor produk non migas ke beberapa negara tujuan seperti China, Malaysia, Singapura, Italia, dan Hongkong meningkat baik ditinjau dari segi nilai maupun volumenya. Hal ini memberi indikasi bahwa ke-5 negara tersebut sangat potensial untuk dijadikan sebagai pasar produktif ekspor hasil perikanan Indonesia pada masa yang akan datang.

8.2 Ekspor dan Impor Hasil Perikanan Tahun 2009-2014

8.2.1 Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas

Total volume ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2009 sebesar 881 ribu ton, sedangkan pada tahun 2014 volume ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai 1,3 juta ton. Pertumbuhan rata-rata volume ekspor hasil perikanan Indonesia selama tahun 2009 sampai 2014 adalah sebesar 8 persen per tahun. Komoditi yang berkontribusi terbesar pada interval waktu tersebut adalah udang dan lobster serta tuna, tongkol, cakalang. Kedua jenis komoditi tersebut masing-masing mempunyai rata-rata pertumbuhan volume ekspor

sebesar 5,66 persen dan 10,70 persen per-tahun. Total volume ekspor udang dan lobster pada tahun 2009 sebesar 151 ribu ton, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 197 ribu ton. Volume ekspor komoditi tuna, tongkol, cakalang pada tahun 2009 sebesar 132 ribu ton, meningkat menjadi 207 ribu ton pada tahun 2014.

Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2009 sampai 2014 cukup signifikan yaitu sebesar 13,61 persen per tahun. Pada tahun 2009, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sebesar US$ 2,5 milyar meningkat menjadi US$ 4,6 milyar pada akhir tahun 2014. Peningkatan ini banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan rata-rata nilai ekspor per tahun beberapa komoditi utama, seperti kepiting, TTC, serta udang dan lobster. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditi kepiting selama 2009 sampai 2014 adalah sebesar 21,72 persen per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan komoditi TTC serta udang dan lobster berturut-turut sebesar 16,36 persen dan 16,93 persen per tahun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.6.

Sementara itu, perubahan kondisi ekspor hasil perikanan pada tahun 2014 dibandingkan dengan 2013 ditandai dengan adanya peningkatan baik volume maupun nilai ekspor hasil perikanan. Pada tahun 2013, capaian volume ekspor hasil perikanan Indonesia sebesar 1.258.180 ton meningkat 1,34 persen menjadi 1.274.982 ton pada tahun 2014. Sedangkan jika dilihat dari segi nilai, ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2014 meningkat sebesar 11 persen dibandingkan capaian pada tahun 2013. Pada tahun 2014, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sebesar US$ 4,6 milyar meningkat dari US$ 4,2 milyar pada tahun 2013.

Meskipun demikian, capaian ekspor komoditi jenis tuna, tongkol, dan cakalang (TTC) mengalami penurunan baik dilihat dari parameter volume maupun nilai ekspor. Pada tahun 2013 volume ekspor komoditi tuna, tongkol, cakalang sebesar 209 ribu ton (senilai US$ 765 juta) turun menjadi 207 ribu ton (senilai US$ 692 juta). Tingkat penurunan volume dan nilai komoditi tuna, tongkol, cakalang pada tahun 2014 terhadap 2013 berturut-turut sebesar 1,2 persen dan 9,48 persen.

Tabel 8.6 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Komoditi Utama, 2009-2014

NO.	KOMODITI UTAMA	VOLUME (Ton)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	Udang dan Lobster	150.989	145.092	158.062	162.068	167.565	196.623	5,66	17,34
2.	Tuna, Tongkol, Cakalang	131.550	122.450	141.774	201.159	209.072	206.553	10,70	-1,20
3.	Ikan Lainnya (termasuk darat)	430.513	622.932	621.632	538.723	524.752	502.027	4,85	-4,33
4.	Kepiting	18.673	21.537	23.089	28.212	34.173	28.091	9,61	-17,80
5.	Lainnya	149.688	191.564	214.793	298.952	322.618	341.689	18,62	5,91
	TOTAL	**881.413**	**1.103.575**	**1.159.350**	**1.229.114**	**1.258.180**	**1.274.982**	**8,00**	**1,34**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

NO.	KOMODITI UTAMA	NILAI (US$ 1000)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	Udang dan Lobster	1.007.481	1.056.399	1.309.674	1.304.149	1.684.086	2.140.862	16,93	27,12
2.	Tuna, Tongkol, Cakalang	352.300	383.230	498.591	749.992	764.791	692.281	16,36	-9,48
3.	Ikan Lainnya (termasuk darat)	723.523	898.039	1.100.576	965.062	831.603	792.006	3,15	-4,76
4.	Kepiting	156.993	208.424	262.321	329.724	359.304	414.372	21,72	15,33
5.	Lainnya	225.904	317.738	349.930	504.731	542.074	602.392	22,71	11,13
	TOTAL	**2.466.201**	**2.863.830**	**3.521.092**	**3.853.658**	**4.181.858**	**4.641.913**	**13,61**	**11,00**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

8.2.2 Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi

Selama tahun 2009 sampai 2014, volume ekspor hasil perikanan Indonesia didominasi oleh 5 (lima) provinsi, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Rata-rata pertumbuhan volume ekspor hasil perikanan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sampai 2014 adalah sebesar 2,49 persen per tahun. Volume ekspor hasil perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 sebesar 334 ribu ton, meningkat menjadi 377 ribu ton pada akhir tahun 2014. Sementara Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai 2014 mempunyai rata-rata pertumbuhan volume ekspor hasil perikanan sebesar 7,01 persen per tahun. Pada tahun 2009 volume ekspor hasil perikanan DKI Jakarta sebesar 197 ribu ton, meningkat menjadi 271 ribu ton pada tahun 2014. Data volume ekspor hasil perikanan menurut Provinsi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.7 di bawah.

Apabila ditinjau lebih lanjut, volume ekspor hasil perikanan dari masing-masing provinsi tersebut di atas memiliki angka relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pelabuhan-pelabuhan besar yang aktif melakukan kegiatan ekspor hasil perikanan ke luar negeri di provinsi-provinsi tersebut. Seperti halnya provinsi Jawa Timur memiliki pelabuhan Tanjung Perak yang berkontribusi sebesar 372 ribu ton (dari total 377 ribu ton) pada tahun 2014. Begitu juga dengan Provinsi DKI Jakarta, Pelabuhan Tanjung Priok berkontribusi sebesar 240 ribu ton (dari total 271 ribu ton) pada tahun 2014. Kemudian Provinsi Maluku dengan pelabuhan yang tertinggi menyumbangkan ekspornya, yaitu Tual sebesar 97 ribu ton (dari total 162 ribu ton). Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelabuhan yang tertinggi berkontribusi menyumbangkan ekspor yaitu Ujung Pandang sebesar 135 ribu ton (dari total 140 ribu ton), disusul Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Pelabuhan Belawan dan berkontribusi menyumbangkan ekspor sebesar 77 ribu ton (dari total 82 ribu ton).

Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan nilai ekspor hasil perikanan, 5 (lima) provinsi yang mendominasi nilai ekspor hasil perikanan adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Berikut

adalah penjelasan nilai ekspor hasil perikanan yang berasal dari 5 (lima) Provinsi tersebut.

a. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang nilai ekspor hasil perikanan tertinggi secara nasional pada tahun 2014, yaitu sebesar US$ 1,7 milyar. Nilai tersebut terutama disumbangkan oleh komoditi udang dan lobster sebesar US$ 939 juta, kemudian diikuti Tuna, Tongkol, dan Cakalang (TTC) sebesar US$ 212 juta, dan kepiting sebesar US$ 138 juta. Sedangkan jika dilihat berdasarkan Negara tujuan ekspor Provinsi Jawa Timur, Amerika Serikat menjadi negara tertinggi dalam memberikan nilai ekspor hasil perikanannya, yaitu sebesar US$ 758 juta. Peringkat kedua ditempati oleh negara Jepang dengan nilai sebesar US$ 336 juta dan disusul oleh negara Cina sebesar US$ 103 juta.

b. Provinsi DKI Jakarta

Komoditi yang menyumbangkan nilai ekspor hasil perikanan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 adalah udang dan lobster dengan nilai sebesar US$ 534 juta. Posisi kedua ditempati oleh komoditi tuna, tongkol, dan cakalang (TTC) sebesar US$ 254 juta, kemudian diikuti komoditi kepiting diurutan ketiga dengan nilai sebesar US$ 88 juta. Negara tujuan yang memberikan sumbangan nilai ekspor hasil perikanan terbesar dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 adalah Amerika Serikat dengan nilai sebesar US$ 520 juta. Urutan kedua ditempati oleh negara Cina sebesar US$ 117 juta, kemudian diikuti oleh negara Jepang dengan nilai sebesar US$ 105 juta.

c. Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 356 juta. Komoditi yang menyumbangkan nilai ekspor hasil perikanan tertinggi di Provinsi Sumatera Utara ini adalah udang dan lobster dengan nilai sebesar US$ 113 juta. Posisi kedua ditempati oleh kepiting sebesar US$ 57 juta, kemudian diikuti komoditi cumi-cumi,

sotong, dan gurita diurutan ketiga dengan nilai sebesar US$ 48 juta. Negara tujuan yang memberikan sumbangan nilai ekspor hasil perikanan terbesar dari Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 adalah Amerika Serikat, dengan nilai sebesar US$ 179 juta. Urutan kedua ditempati oleh negara Italia dengan nilai ekspor sebesar US$ 26 juta, kemudian diikuti oleh negara Malaysia sebesar US$ 17 juta.

d. Provinsi Lampung

Pada tahun 2014 provinsi Lampung memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sebesar US$ 352 juta. Komoditi yang menyumbangkan nilai ekspor tertinggi di Provinsi Lampung ini adalah udang dan lobster dengan nilai sebesar US$ 315 juta. Posisi kedua ditempati oleh komoditi kepiting sebesar US$ 34 juta, kemudian diikuti komoditi cumi-cumi, sotong, dan gurita diurutan ketiga dengan nilai sebesar US$ 1,8 juta. Negara tujuan yang memberikan sumbangan nilai ekspor hasil perikanan terbesar dari Provinsi Lampung pada tahun 2014 adalah Amerika Serikat, dengan nilai sebesar US$ 194 juta. Urutan kedua ditempati oleh Belanda dengan nilai ekspor sebesar US$ 51 juta, kemudian diikuti oleh negara Jepang sebesar US$ 50 juta.

e. Provinsi Sulawesi Selatan

Kontribusi nilai ekspor hasil perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 adalah sebesar US$ 277 juta. Komoditi yang menyumbangkan nilai ekspor tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah rumput laut dan ganggang lainnya dengan nilai sebesar US$ 153 juta. Posisi kedua ditempati oleh komoditi udang dan lobster sebesar US$ 47 juta, kemudian diikuti komoditi kepiting diurutan ketiga dengan nilai sebesar US$ 23 juta. Negara tujuan yang memberikan sumbangan nilai ekspor hasil perikanan terbesar dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 adalah Cina, dengan nilai sebesar US$ 112 juta. Urutan kedua ditempati oleh Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar US$ 50 juta, kemudian diikuti oleh negara Jepang sebesar US$ 32 juta.

Tabel 8.7 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Provinsi, 2009-2014

NO.	PROVINSI	VOLUME (Ton)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	Sumatera Utara	78.280	68.385	70.676	77.975	74.783	81.545	1,20	9,04
2.	DKI Jakarta	197.349	210.165	263.455	274.762	283.555	271.363	7,01	-4,30
3.	Jawa Timur	334.196	343.039	341.775	352.839	348.634	376.903	2,49	8,11
4.	Sulawesi Selatan	44.631	67.677	90.051	91.125	103.759	139.702	26,88	34,64
5.	Maluku	72.879	135.222	145.931	187.143	203.976	162.285	22,05	-20,44
6.	Lainnya	154.078	279.088	247.461	245.270	243.473	243.184	13,61	-0,12
	Total	**881.413**	**1.103.576**	**1.159.349**	**1.229.114**	**1.258.180**	**1.274.982**	**8,00**	**1,34**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

NO.	PROVINSI	NILAI (US$ 1000)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	Sumatera Utara	220.652	228.186	265.105	281.918	307.356	355.735	10,14	15,74
2.	Lampung	230.653	210.598	306.149	250.745	298.845	352.016	11,11	17,79
3.	DKI Jakarta	522.157	642.843	849.048	1.035.652	1.147.789	1.197.781	18,47	4,36
4.	Jawa Timur	967.244	1.090.980	1.307.351	1.364.269	1.474.754	1.719.600	12,34	16,60
5.	Sulawesi Selatan	109.262	152.850	187.626	204.382	210.581	276.935	21,22	31,51
6.	Lainnya	416.234	538.374	605.812	716.692	742.533	739.846	12,68	-0,36
	Total	**2.466.202**	**2.863.831**	**3.521.091**	**3.853.658**	**4.181.858**	**4.641.913**	**13,61**	**11,00**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

8.2.3 Ekspor Hasil Perikanan Menurut Negara Tujuan

Berdasarkan volume ekspor hasil perikanan, pada tahun 2009 sampai 2014 ekspor hasil perikanan Indonesia banyak didominasi ke negara tujuan Cina, Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, dan Uni Eropa. Cina menjadi negara tujuan ekspor dengan volume ekspor hasil perikanan tertinggi sepanjang tahun 2009 sampai 2014. Rata-rata pertumbuhan volume ekspor hasil perikanan ke negara tujuan Cina dari 2009 sampai 2014 adalah sebesar 18,92 persen per tahun. Pada tahun 2009 volume ekspor hasil perikanan ke negara tujuan Cina sebesar 149 ribu ton, meningkat menjadi 344 ribu ton pada tahun 2014. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan volume ekspor hasil perikanan ke negara tujuan Thailand dari tahun 2009 sampai dengan 2014 sebesar 31,31 persen per tahun. Pada tahun 2009 volume ekspor hasil perikanan ke negara tujuan Thailand sebesar 79 ribu ton, meningkat menjadi 199 ribu ton pada tahun 2014. Data selengkapnya mengenai volume ekspor hasil perikanan berdasarkan negara tujuan dapat dilihat pada tabel 8.8 di bawah.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan nilai ekspor hasil perikanan, Amerika Serikat menempati posisi teratas sebagai negara tujuan ekspor hasil perikanan dengan kontribusi nilai tertinggi. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan ke Amerika Serikat selama tahun 2009 sampai dengan 2014 sebesar 19,47 persen per tahun. Pada tahun 2009, nilai ekspor hasil perikanan ke Amerika Serikat sebesar US$ 773 juta meningkat menjadi US$ 1,84 milyar pada tahun 2014. Negara tujuan ekspor yang mendominasi nilai ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2009 sampai 2014 setelah Amerika Serikat adalah Jepang, Uni Eropa, Cina, Thailand, dan Vietnam.

Pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan ke Jepang 2009-2014 adalah sebesar 3,92 persen per tahun. Meskipun pertumbuhan nilai ekspor negara Jepang relatif kecil dibandingkan 4 (empat) negara lainnya, Jepang menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat dalam hal sumbangan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia. Pada tahun 2009 nilai ekspor hasil perikanan Indonesia ke Jepang sebesar US$ 618 juta, meningkat menjadi US$ 733 juta pada tahun 2014.

Tabel 8.8 Volume Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2009-2014

NO.	NEGARA TUJUAN	VOLUME (Ton)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	China	149.280	213.055	242.397	295.486	336.648	344.374	18,92	2,30
2.	Thailand	78.653	193.723	160.471	216.407	227.947	198.871	31,31	-12,76
3.	United States	125.929	127.792	126.931	133.476	136.847	168.017	6,25	22,78
4.	Japan	118.639	126.514	123.830	118.732	115.594	108.847	-1,62	-5,84
5.	Vietnam	46.806	56.751	87.047	80.304	66.257	75.950	12,80	14,63
6.	Uni Eropa	75.006	71.533	92.892	76.348	94.736	94.948	6,35	0,22
7.	Lainnya	287.100	314.208	325.781	308.361	280.151	283.976	0,00	1,37
	Total	**881.413**	**1.103.576**	**1.159.349**	**1.229.114**	**1.258.180**	**1.274.982**	**8,00**	**1,34**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

NO.	NEGARA TUJUAN	NILAI (US$ 1000)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	China	97.036	150.371	220.998	284.664	409.637	410.833	34,99	0,29
2.	Thailand	61.196	98.666	112.550	207.054	205.962	165.273	27,80	-19,76
3.	United States	772.650	869.858	1.070.484	1.147.191	1.332.635	1.843.813	19,47	38,36
4.	Japan	617.775	691.749	806.060	842.118	792.135	733.029	3,92	-7,46
5.	Vietnam	47.182	71.346	125.110	136.348	118.363	132.623	26,88	12,05
6.	Uni Eropa	297.406	302.492	422.985	386.581	500.499	536.849	13,93	7,26
7.	Lainnya	572.957	679.349	762.904	849.702	822.627	819.492	7,74	-0,38
	Total	**2.466.202**	**2.863.831**	**3.521.091**	**3.853.658**	**4.181.858**	**4.641.913**	**13,61**	**11,00**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

Uni Eropa menduduki peringkat ketiga dalam hal sumbangan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia selama tahun 2009 sampai 2014. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan ke negara-negara Uni Eropa selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 13,93 persen per-tahun. Pada tahun 2009 nilai ekspor hasil perikanan Indonesia ke Uni Eropa sebesar US$ 297 juta, meningkat cukup signifikan menjadi US$ 537 juta pada tahun 2014.

Sementara itu, Cina menduduki peringkat keempat dalam hal sumbangan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia selama tahun 2009 sampai 2014. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan ke negara Cina selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 34,99 persen per-tahun. Pada tahun 2009 nilai ekspor hasil perikanan Indonesia ke Cina sebesar US$ 97 juta, meningkat sangat signifikan menjadi US$ 411 juta pada tahun 2014.

Sedangkan diperingkat kelima diduduki oleh negara Thailand yang mempunyai rata-rata pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan per tahun selama 2009 sampai 2013 sebesar 27,80 persen. Pada tahun 2009 nilai ekspor hasil perikanan Indonesia ke negara Thailand sebesar US$ 61 juta, meningkat cukup signifikan menjadi US$ 165 juta pada tahun 2014.

Peringkat keenam diduduki oleh negara Vietnam dengan rata-rata pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan selama 2009 sampai 2013 adalah sebesar 26,88 persen per-tahun. Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia ke Vietnam pada tahun 2009 adalah sebesar US$ 47 juta, meningkat menjadi US$ 133 juta di akhir tahun 2014.

Perubahan ekspor hasil perikanan pada tahun 2013 dan 2014 ditandai dengan menurunnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan ke negara tujuan Thailand dan Jepang. Tingkat penurunan volume ekspor hasil perikanan ke negara tujuan Thailand dan Jepang pada tahun 2013-2014 masing-masing sebesar 12,76 persen dan 5,84 persen. Sedangkan tingkat penurunan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2013-2014 pada kedua negara tersebut adalah sebesar 19,76 persen (Thailand) dan 7,46 persen (Jepang).

8.2.4 Impor Hasil Perikanan Menurut Komoditas

Ditjen PDSPKP menetapkan bahwa persentase nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri adalah lebih kecil 20 persen dari nilai ekspor. Pada tahun 2014, nilai impor dan ekspor hasil perikanan Indonesia masing-masing sebesar US$ 418 juta dan US$ 4,64 milyar. Hal ini menunjukan bahwa perbandingan nilai impor dan nilai ekspor pada tahun 2014 adalah sebesar 9,01 persen, masih dibawah 20 persen sesuai ketetapan Ditjen P2HP, KKP.

Pemerintah akan terus mengendalikan volume impor perikanan agar hasil produksi perikanan dalam negeri meningkat. Dengan upaya tersebut, realisasi volume impor hasil perikanan turun sebesar 13,06 persen pada tahun 2014 dibanding tahun 2013. Pada tahun 2014, volume impor hasil perikanan Indonesia sebesar 307 ribu ton (senilai US$ 418 juta) turun dari 353 ribu ton (senilai US$ 457 juta) pada tahun 2013.

Komoditi yang mendominasi volume impor hasil perikanan Indonesia selama tahun 2009 sampai 2014 adalah komoditi ikan segar/beku dan tepung ikan. Pada tahun 2009 Indonesia mengimpor komoditi ikan segar/beku sebanyak 130 ribu ton dan sedikit menurun menjadi 121 ribu ton pada tahun 2014. Sedangkan komoditi tepung ikan pada tahun 2009 diimpor sebanyak 66 ribu ton turun menjadi 40 ribu ton pada tahun 2014.

Meskipun demikian, penurunan volume impor komoditi hasil perikanan ini tidak diikuti oleh penurunan nilai impor hasil perikanan. Nilai impor komoditi ikan segar/beku dan tepung ikan pada tahun 2009 sampai dengan 2014 masing-masing memiliki rata-rata peningkatan sebesar 8,29 persen dan 6,86 persen per tahun. Pada tahun 2009, nilai impor komoditi ikan segar/beku sebesar US$ 103 juta meningkat menjadi US$ 132 juta pada tahun 2014. Sementara itu, nilai impor komoditi tepung ikan pada tahun 2009 sebesar US$ 39,95 juta meningkat menjadi US$ 47,98 juta pada tahun 2014.

Tabel 8.9 Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Komoditi Utama, 2009-2014

NO.	KOMODITI	VOLUME (Ton)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1	Tepung Ikan yang Tidak Baik Dimakan Manusia	65.601	55.068	63.465	64.394	56.046	40.038	-8,17	-28,56
2	Ikan segar / beku	130.014	176.767	213.566	139.540	139.535	121.200	1,79	-13,14
3	Lainnya	136.278	137.448	154.840	133.426	157.823	146.006	2,10	-7,49
	Total	**331.893**	**369.282**	**431.871**	**337.360**	**353.404**	**307.243**	**-0,40**	**-13,06**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

NO.	KOMODITI	NILAI (US$ 1000)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1	Tepung Ikan yang Tidak Baik Dimakan Manusia	39.945	36.047	44.385	49.129	69.221	47.983	6,86	-30,68
2	Ikan segar / beku	102.629	149.632	178.792	127.379	145.749	131.891	8,29	-9,51
3	Lainnya	157.688	206.136	265.175	235.854	242.276	238.563	9,90	-1,53
	Total	**300.261**	**391.815**	**488.351**	**412.362**	**457.247**	**418.438**	**8,39**	**-8,49**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

8.2.5 Impor Hasil Perikanan Menurut Provinsi

Kegiatan impor hasil perikanan pada tahun 2009 sampai 2014 banyak masuk melalui Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Tengah. Hal ini sebagai akibat dari pelabuhan-pelabuhan besar yang dimiliki oleh provinsi-provinsi tersebut. Seperti halnya DKI Jakarta yang mempunyai Pelabuhan Tanjung Priok, Jawa Timur mempunyai pelabuhan Tanjung Perak, Sumatera Utara mempunyai Pelabuhan Belawan, Lampung mempunyai Pelabuhan Panjang, dan Jawa Tengah yang mempunyai Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi pintu masuk kegiatan impor hasil perikanan di Indonesia.

Volume impor hasil perikanan yang melalui Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 adalah sebesar 184 ribu ton, menurun menjadi 143 ribu ton pada tahun 2014. Rata-rata penurunan volume impor hasil perikanan yang melalui Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 4,21 persen per tahun.

Sementara itu, Jawa Timur merupakan provinsi kedua terbesar setelah DKI Jakarta sebagai pintu masuk kegiatan importasi hasil perikanan pada tahun 2009 sampai 2014. Volume impor hasil perikanan yang masuk melalui Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 adalah sebesar 76 ribu ton, meningkat menjadi 106 ribu ton pada tahun 2014. Rata-rata peningkatan volume impor hasil perikanan yang melalui Jawa Timur selama tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah sebesar 14,38 persen per tahun.

Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi pada urutan ketiga terbesar sebagai pintu masuk komoditi impor hasil perikanan pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2014. Pada tahun 2009, volume impor hasil perikanan yang masuk melalui Provinsi Sumatera Utara sebesar 32 ribu ton sedikit menurun menjadi 31 ribu ton pada tahun 2014. Data selengkapnya terkait volume impor hasil perikanan menurut Provinsi pada tahun 2009 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel 8.10.

Tabel 8.10 Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Provinsi, 2009-2014

NO.	PROVINSI	VOLUME (Ton)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	Sumatera Utara	31.978	46.913	40.638	38.027	46.186	31.317	3,23	-32,19
2.	Lampung	16.601	12.142	17.234	13.696	14.586	14.288	-0,20	-2,05
3.	DKI Jakarta	183.949	200.511	188.585	141.904	143.297	142.844	-4,21	-0,32
4.	Jawa Tengah	3.582	6.307	6.727	8.251	10.898	6.920	20,19	-36,51
5.	Jawa Timur	75.545	85.612	172.330	130.954	131.952	106.266	14,38	-19,47
6.	Lainnya	38.367	50.193	44.450	4.528	6.485	5.609	-8,14	-13,50
	Total	**350.022**	**401.678**	**469.964**	**337.360**	**353.404**	**307.243**	**-0,95**	**-13,06**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

NO.	PROVINSI	NILAI (US$ 1000)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	Sumatera Utara	27.031	48.316	42.688	44.682	52.553	35.371	11,34	-32,69
2.	Lampung	16.070	14.756	21.383	16.176	17.380	15.967	2,34	-8,13
3.	Kepulauan Riau	5.006	6.890	4.631	5.464	6.060	7.772	12,40	28,24
4.	DKI Jakarta	159.906	198.810	201.623	151.065	172.853	183.924	4,30	6,40
5.	Jawa Timur	74.015	103.953	203.551	181.596	193.106	165.023	23,45	-14,54
6.	Lainnya	15.783	18.640	18.722	13.379	15.295	10.382	-5,56	-32,12
	Total	**297.811**	**391.365**	**492.598**	**412.362**	**457.247**	**418.438**	**8,68**	**-8,49**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

Dilihat dari sisi nilai impor hasil perikanan, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara tetap menjadi tiga provinsi terbesar yang mendominasi diantara Provinsi lainnya selama tahun 2009 sampai 2014. Nilai impor hasil perikanan yang melalui DKI Jakarta pada tahun 2009 adalah sebesar US$ 160 juta, meningkat menjadi US$ 184 juta pada tahun 2014. Rata-rata peningkatan nilai impor hasil perikanan yang melalui DKI Jakarta selama tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah sebesar 4,30 persen per tahun.

Sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata peningkatan nilai impor per tahun yang relatif lebih besar, yaitu sebesar 23,45 persen pada periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Nilai impor hasil perikanan yang melalui Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar US$ 74 juta meningkat cukup signifikan menjadi US$ 165 juta pada tahun 2014.

Sementara itu, nilai impor hasil perikanan yang masuk melalui Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 sebesar US$ 27 juta meningkat menjadi US$ 35 juta pada tahun 2014. Rata-rata peningkatan nilai impor hasil perikanan yang melalui Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah sebesar 11,34 persen per tahun.

Perubahan volume impor hasil perikanan pada periode tahun 2013 dan 2014 menurut provinsi pemasukan ditandai dengan trend bernilai negatif. Hal ini mengindikasinya adanya penurunan volume impor hasil perikanan yang masuk melalui beberapa provinsi di atas. Hal serupa juga terjadi pada nilai impor hasil perikanan yang masuk melalui provinsi diatas yang mengalami penurunan.

8.2.6 Impor Hasil Perikanan Menurut Negara Asal

Volume impor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2014 banyak didominasi oleh komoditi-komoditi yang berasal dari negara Cina dan Amerika Serikat. Pada tahun 2009, volume impor hasil perikanan yang berasal dari Cina sebesar 89 ribu ton, relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu sebesar 72 ribu ton.

Sedangkan jika dilihat dari sisi nilai, impor hasil perikanan dari Cina pada tahun 2009 adalah sebesar US$ 66 juta, meningkat menjadi US$ 71 juta pada tahun 2014. Rata-rata peningkatan nilai impor hasil perikanan Indonesia dari Cina selama tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah sebesar 5,75 persen per-tahun.

Sementara itu, komoditi hasil perikanan yang diimpor dari Amerika Serikat pada tahun 2009 sebanyak 47 ribu ton, meningkat menjadi 63 ribu ton pada tahun 2014. Rata-rata peningkatan volume impor hasil perikanan Indonesia dari Amerika Serikat pada tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah sebesar 9,69 persen per-tahun.

Nilai impor hasil perikanan Indonesia dari Amerika Serikat pada tahun 2009 sebesar US$ 36 juta, meningkat menjadi US$ 71 juta pada tahun 2014. Rata-rata peningkatan nilai impor hasil perikanan dari negara Amerika Serikat selama tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah sebesar 17,73 persen per-tahun.

Volume impor hasil perikanan yang berasal dari Korea Selatan pada tahun 2009 sebesar 25 ribu ton, meningkat menjadi 32 ribu ton pada tahun 2014 dengan rata-rata peningkatannya sebesar 6,68 persen per tahun. Adapun nilai impor hasil perikanan dari Korea Selatan pada tahun 2009 sebesar US$ 19 juta meningkat menjadi US$ 29 juta pada tahun 2014 dengan rata-rata peningkatannya sebesar 15,07 persen per tahun. Data selengkapnya mengenai nilai impor hasil perikanan berdasarkan negara asal tahun 2009 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel 8.11.

Tabel 8.11 Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan Indonesia Menurut Negara Asal, 2009-2014

NO.	NEGARA ASAL	VOLUME (Ton)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	Amerika Serikat	47.283	46.675	58.045	45.843	73.998	62.892	9,69	-15,01
2.	China	89.118	116.009	155.655	85.676	82.031	71.702	0,51	-12,59
3.	Malaysia	19.072	27.403	19.187	15.946	22.695	17.901	3,60	-21,13
4.	Korea Selatan	25.066	21.214	26.923	24.499	31.048	32.331	6,68	4,13
5.	Thailand	23.545	41.892	24.572	6.234	11.471	15.907	16,92	38,67
6.	Uni Eropa	3.785	727	1.015	668	900	2.437	26,03	170,88
7.	Lainnya	142.153	147.758	184.568	158.494	131.262	104.073	-4,63	-20,71
	Total	**350.022**	**401.678**	**469.964**	**337.360**	**353.404**	**307.243**	**-0,95**	**-13,06**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

NO.	NEGARA ASAL	NILAI (US$ 1000)						TREND (Persen)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
1.	Amerika Serikat	36.120	38.581	58.839	54.857	82.143	70.956	17,73	-13,62
2.	China	66.232	91.420	116.676	68.142	72.739	71.253	5,75	-2,04
3.	Malaysia	22.221	34.609	28.897	18.108	29.220	25.145	9,87	-13,95
4.	Korea Selatan	19.177	34.609	23.264	21.844	28.838	29.339	15,07	1,74
5.	Canada	2.509	7.984	16.209	18.669	26.278	24.831	74,33	-5,51
6.	Uni Eropa	4.588	3.339	6.163	3.027	4.475	5.452	15,22	21,83
7.	Lainnya	146.964	180.823	242.550	227.715	213.554	191.462	6,90	-10,34
	Total	**297.811**	**391.365**	**492.598**	**412.362**	**457.247**	**418.438**	**8,68**	**-8,49**

Sumber : BPS, diolah oleh Ditjen P2HP

8.2.7 Neraca Perdagangan Hasil Perikanan

Neraca perdagangan hasil perikanan merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor hasil perikanan pada periode waktu tertentu. Pada tahun 2009, neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia sebesar US$ 2,2 milyar, meningkat menjadi US$ 4,2 milyar pada tahun 2014. Selama tahun 2009 sampai dengan 2014 nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mempunyai trend yang selalu naik, dengan nilai ekspor sangat signifikan jika dibandingkan dengan nilai impor hasil perikanan. Hal inilah yang menyebabkan *trend* positif bagi perkembangan neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia selama kurun waktu tersebut. Rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia selama tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah sebesar 14,35 persen per tahun.

Tabel 8.12 Neraca Perdagangan Hasil Perikanan Indonesia Periode 2009 s.d. 2014

Satuan: US$ 1000

Parameter	Tahun						Trend (%)	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009-2014	2013-2014
Nilai Ekspor	2.466.202	2.863.831	3.521.091	3.853.658	4.181.858	4.641.913	13,61	11,00
Nilai Impor	297.811	391.365	492.598	412.362	457.247	418.438	8,68	-8,49
Neraca Perdagangan	2.168.391	2.472.466	3.028.493	3.441.296	3.724.611	4.223.475	14,35	13,39

Sumber: BPS, diolah Ditjen P2HP

Gambar 8.1 di bawah ini memperlihatkan pergerakan neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia pada periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Terlihat dengan jelas bahwa pola neraca perdagangan hasil perikanan yang terbentuk selalu mengikuti pola nilai ekspor hasil perikanan. Grafik nilai impor hasil perikanan pada gambar 8.1 di bawah ini terlihat berada pada posisi jauh di bawah, dibandingkan grafik neraca perdagangan dan nilai ekspor hasil perikanan yang terbentuk.

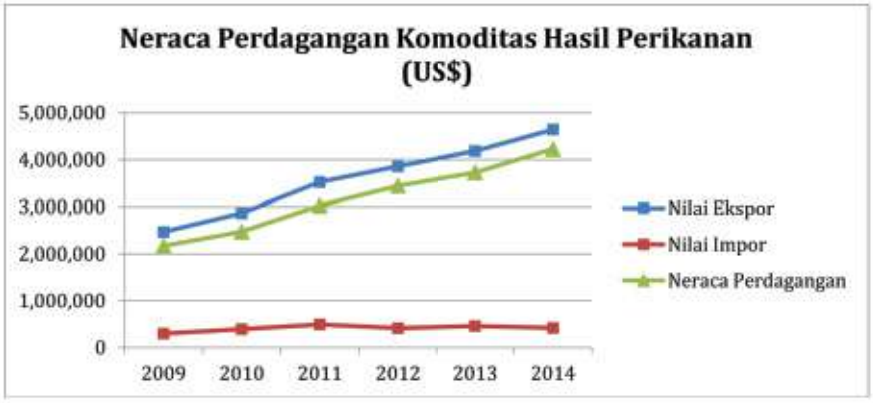

Gambar 8.1Neraca Perdagangan Hasil Perikanan Tahun 2009-2014

Sepanjang tahun 2014, neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia menpunyai rata-rata peningkatan sebesar 1,68 persen per bulan. Berdasarkan gambar 8.2, terlihat dengan jelas bahwa pada bulan September dan Oktober menjadi puncak capaian neraca perdagangan hasil perikanan tahun 2014. Komoditas udang dan lobster menjadi komoditas utama yang paling besar menyumbangkan neraca perdagangan hasil perikanan sepanjang tahun 2014. Bulan September menjadi bulan puncak pencapaian neraca perdagangan komoditas udang and lobster tahun 2014.

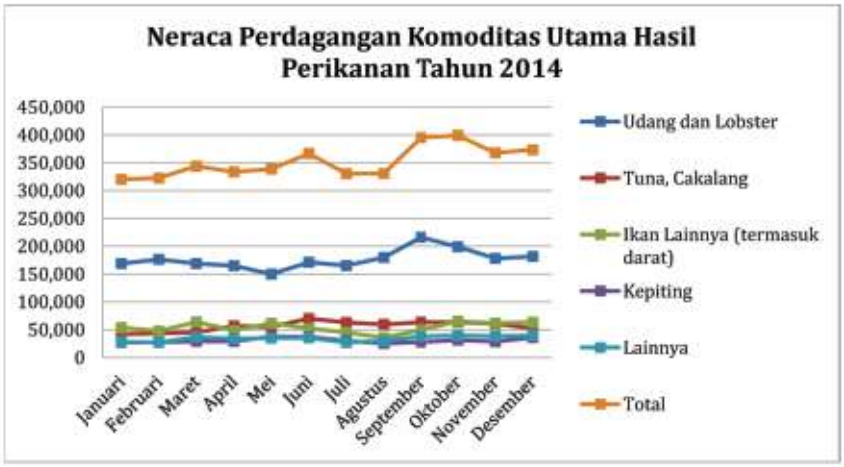

Gambar8.2 Neraca Perdagangan Komoditas Utama Hasil Perikanan Tahun 2014

Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan 9

9 Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan

Kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra pada tahun 2015 ditekan seminimal mungkin agar tidak melebihi maksimal 10 kasus per negara mitra. Sampai dengan tahun 2015, sudah ada 38 negara mitra yang telah memiliki mutual recognition arrangement (MRA) dengan Indonesia, yaitu China, Kanada, Vietnam, Rusia, Korea Selatan, Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, Belgia, Jerman, Luxembourg, Belanda, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus, Estonia, Republik Czech, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia, Bulgaria, Romania, Slovenia, Kroasia, Norwegia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgystan, dan Armenia.

Capaian sasaran strategis indikator ini diukur dengan jumlah penyampaian notifikasi kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra yang diterima oleh otoritas kompeten Indonesia. Jumlah kasus penolakan yang paling tinggi berdasarkan notifikasi penolakan ekspor sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar 2 kasus. Selama lima tahun terakhir KKP telah berhasil mempertahankan kinerja untuk menekan jumlah Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan per Negara Mitra yaitu pada tahun 2011 – 2015, sebesar ≤10 kasus.

Tabel9.1 Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan oleh Negara Mitra Tahun 2011-2015

No.	Negara Mitra	Kasus Penolakan						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Cina	12	0	2	0	0	0	0
2	Kanada	6	1	0	0	5	4	2
3	Vietnam	-	-	0	0	0	0	0
4	Rusia	1	7	6	1	4	0	2
5	Korea Selatan	4	3	1	2	3	2	1
6	Norwegia	-	-	0	0	0	0	0
7	Italia	1	1	3	9	1	1	1
8	Spanyol	0	2	1	3	0	1	0
9	Perancis	1	2	2	1	1	1	2
10	Inggris	1	3	0	1	0	1	2
11	Belgia	0	0	0	0	1	1	1
12	Jerman	3	2	0	0	2	3	0
13	Polandia	0	0	1	0	0	0	0
14	Luxembourg	0	0	0	0	0	0	0
15	Belanda	1	1	0	0	0	0	0
16	Denmark	0	0	0	0	0	0	0
17	Irlandia	0	0	0	0	0	0	0
18	Yunani	0	0	0	0	0	0	0
19	Portugal	0	0	0	0	0	0	0
20	Austria	0	0	0	0	0	0	0
21	Finlandia	0	0	0	0	0	0	0
22	Swedia	1	0	0	0	0	0	0
23	Cyprus	0	0	0	0	0	0	0
24	Estonia	0	0	0	0	0	0	0
25	Republik Ceko	0	0	0	0	0	0	0
26	Hungaria	0	0	0	0	0	0	0
27	Latvia	0	0	0	0	0	0	0
28	Lithuania	0	0	0	0	0	0	0
29	Malta	0	0	0	0	0	0	0
30	Slovenia	1	0	0	0	0	1	0
31	Slovakia	0	0	0	0	0	0	0
32	Bulgaria	0	0	0	0	0	0	0
33	Rumania	0	0	0	0	0	0	0
34	Kroasia	0	0	0	0	0	0	0
35	Belarus	-	-	-	-	-	-	0
36	Kazakhstan	-	-	-	-	-	-	0
37	Kyrgystan	-	-	-	-	-	-	0
38	Armenia	-	-	-	-	-	-	0

Sumber Pusat Sertifikasi Mutu KHP, BKIPM

Upaya otoritas kompeten Indonesia (BKIPM) dalam penyelesaian teknis sebagai tindak lanjut notifikasi kasus penolakan ekspor hasil perikanan dari negara mitra adalah dengan melakukan investigasi kasus sampai dengan menerbitkan rekomendasi. Hasil investigasi akan menyampaikan temuan ketidaksesuaian serta permintaan kepada unit pengolah ikan (UPI) untuk melakukan tindakan perbaikan. Apabila temuan ketidaksesuaian tidak dilaksanakan, maka BKIPM akan menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) atau pencabutan approval number terhadap UPI yang melanggar. Seluruh kasus penolakan ekspor hasil perikanan tersebut telah dilakukan investigasi dan ditindaklanjuti serta dilaporkan kepada otoritas kompeten negara mitra.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan tertinggi sebanyak 2 kasus per negara mitra lebih sedikit jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yaitu sebanyak 4 kasus per negara mitra. Semakin kecil kasus yang terjadi mengindikasikan bahwa produk ekspor hasil perikanan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara mitra yang berarti bahwa sistem jaminan mutu yang diterapkan sudah sejalan (harmonis) dengan sistem jaminan mutu negara pengimpor. Tetapi perlu diingat bahwa mutu hasil perikanan bersifat dinamis, artinya dimungkinkan terjadi perubahan terkait dengan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk perikanan termasuk aspek lingkungan yang diterapkan oleh negara mitra. Oleh karena itu harmonisasi terhadap sistem jaminan mutu produk hasil perikanan Indonesia juga harus berkembang mengikuti negara mitra sebagai tujuan ekspor. Selain itu penguatan kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, metode uji termasuk peralatan yang digunakan juga menjadi suatu keharusan.

Bila terjadi kasus penolakan ekspor hasil perikanan oleh negara mitra, perlu ditelusuri penyebabnya, apakah yang berkaitan dengan aspek keamanan pangan, lingkungan, penipuan ekonomi atau faktor lainnya. Selain itu juga harus ditelusuri pada tahapan mana kasus tersebut ditemukan atau terjadi. Mengingat produk perikanan merupakan bahan pangan yang cepat mengalami kemunduran

mutu (*high perishable food*) sehingga apabila penanganan dan transportasinya tidak sesuai dengan standar baku operasional (waktu dan suhu), maka perubahan fisika, kimia dan mikrobiologis akan terjadi dan ini akan menyebabkan terjadinya penyimpangan mutu.

Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam mencapai target di tahun 2015 ini adalah:

a. penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir seperti penerapan *HACCP*, pemberian nomor registrasi di negara mitra, penerbitan sertifikat kesehatan *(HC)* dan penanganan kasus penahanan dan penolakan serta harmonisasi sistem jaminan mutu dengan negara mitra dapat diterapkan secara konsisten.

b. pemberian apresiasi berupa kesempatan/peluang ekspor ke negara mitra dan sanksi terhadap yang terkena kasus berupa pembekuan nomor registrasi *(internal suspend)*. Sedangkan target ini dapat gagal apabila penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir tidak diterapkan secara konsisten.

c. telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya: pendaftaran UPI ke negara mitra (tujuan ekspor); penanganan Kasus Penolakan/ Penahanan Negara Mitra dan Negara importir lainya; rapat koordinasi penanganan Kasus Penolakan Hasil Perikanan; kunjungan ke negara Mitra dalam rangka Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; pertemuan dalam rangka Penyusunan Draft Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra; sosialisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra; dan evaluasi UPI yang terdaftar di negara mitra.

Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola 10

10 Luas Kawasan Konservasi Perairan yang di Kelola

Indikator pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan berupa luas kawasan konservasi perairan yang dikelola. Capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 852 ribu hektar pencadangan konservasi baru dengan akumulasi sampai dengan tahun 2015 yaitu seluas 17,3 juta hektar, hal ini sudah melebihi target pada tahun 2015 yaitu 500 ribu hektar pencadangan konservasi baru (akumulasi 16,5 juta hektar).

Penambahan luas kawasan konservasi yang masuk sampai bulan Oktober tahun 2015 dengan capaian 852 ribu hektar dengan lokasi kawasan berada di 10 Kabupaten/Kota yaitu: Kotawaringin Barat, Tambrauw, Banggai Laut, Buton, Minahasa, Nias Utara, Lingga, Muna, Kolaka Utara, dan Gorontalo Utara.

Sampai dengan tahun 2015 terdapat 32 Provinsi, 105 kabupaten/kota, dan 112 Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2015 sejumlah 32 kawasan dengan luas 4,7 juta hektar, sedangkan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 122 kawasan dengan luas 12,6 juta hektar, dimana kawasan konservasi perairan yang dikelola KKP hingga Tahun 2015 dengan jumlah 112 kawasan dan luas yaitu 7,3 juta hektar. Sehingga jumlah total kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2015 sebesar 17,3 juta hektar, hal ini dapat dilihat pada tabel 10.1.

Tabel 10.1 Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Tahun 2015

No	Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)
A	**Dikelola Kemenhut**	**32**	**4.694.947,55**
	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
	Suaka Margasatwa Laut	5	5.678,25
	Cagar Alam Laut	6	154.480,00
B	**Dikelola KKP dan Pemda**	**122**	**12.607.853,61**
	Taman Nasional Perairan	1	3.355.352,82
	Suaka Alam Perairan	3	445.630,00
	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040,20
	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	112	7.265.830,59
	Total	**154**	**17.302.801,16**

Sumber: Ditjen PRL

Kawasan konservasi yang dikelola meningkat efektivitasnya sampai dengan semester II Tahun 2015 dengan luas pengelolaan sebesar 6,8 juta hektar terfokus pada 17 (tujuh belas) kawasan yaitu: KKP Selayar; TWP Pulau Pieh, Kabupaten Padang Pariaman; TWP Kabupaten. Kep. Anambas; TWP Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara; TWP Kep. Kapoposang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan; TWP P. Padaido, Kabupaten Biak Numfor; TNP Laut Sawu, Provinsi NTT; TNP Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah; SAP Kep. Aru Bag. Tenggara, Kabupaten Kep. Aru; SAP Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat; TWP Alor; SAP Sabang; TP Sukabumi; TP Batang; SAP Waige Sebelah Barat; TWP Klungkung; dan TWP Raja Ampat.

Pada gambar 10.1, dapat dilihat status kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) dengan peringkat atau tingkatan warna hijau artinya kawasan konservasi dikelola minimum dengan kriteria tingkat efektivitas pengelolaannya telah mencapai pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi, sesuai standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan, pelaksanaan rencana pengelolaan zonasi serta telah dilakukan penetapan kawasan konservasi perairan, pada peringkat ini terdapat di 3 (tiga) lokasi yaitu SAP Sabang, TWP Klungkung, dan TWP Raja Ampat. Sedangkan peringkat atau tingkatan yang berwarna kuning

artinya kawasan konservasi didirikan dengan kriteria yaitu telah terbentuknya unit organisasi pengelola dengan sumber daya manusia, memiliki rencana pengelolaan dan zonasi, mempunyai sarana dan prasarana pendukung pengelolaan, serta mendapatkan dukungan pembiayaan pengelolaan, pada peringkat ini terdapat 13 (tiga belas) lokasi yaitu TWP Pulau Pieh, TWP Kep. Anambas, TP Sukabumi, TP Batang, TWP Kepulauan Kapoposang, TWP Gili Matra, TWP Alor, TNP Laut Sawu, SAP Raja Ampat, SAP Waige Sebelah Barat, TWP Laut Banda, TWP P. Padaido, SAP Kep. Aru Tenggara. 1 (satu) lokasi berwana merah artinya kawasan konservasi diinisiasi dengan kriteria yaitu mempunyai usulan inisiatif, telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi kawasan, serta adanya pencadangan kawasan, lokasi ini adalah KKP Selayar.

Sumber: Ditjen PRL

Gambar10.1 Peta Lokasi dan Status KKPN Yang Dikelola Ditjen PRL Tahun 2015

10.1 Kawasan Konservasi Taman Nasional Laut (TNL)

Tabel 10.2 Jumlah Kawasan Konservasi Taman Nasional Laut Tahun 2015

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
DKI Jakarta	1	107.489
Jawa Tengah	1	110.117
Sulawesi Utara	1	89.065
Sulawesi Tengah	1	362.605
Sulawesi Selatan	1	530.765
Sulawesi Tenggara	1	1.390.000
Papua	1	1.453.500
Total	**7**	**4.043.541**

Sumber: Ditjen PRL

Taman nasional laut yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan berjumlah 7 (tujuh) lokasi kawasan yang berada di 7 (tujuh) provinsi yaitu 1 (satu) kawasan di Provinsi DKI Jakarta dengan luas 107.489 hektar, 1 (satu) kawasan di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 110.117 hektar, 1 (satu) kawasan di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 89.065 hektar, 1 (satu) kawasan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 362.605 hektar, 1 (satu) kawasan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 530.765 hektar, 1 (satu) kawasan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 1,39 juta hektar dan 1 (satu) kawasan di Provinsi Papua dengan luas 1,45 juta hektar. Pada gambar 10.2 menunjukkan presentase luas kawasan konservasi terbesar pada kawasan TNL yaitu Provinsi Papua sebesar 36 persen terhadap total luas kawasan konservasi taman nasional laut, sedangkan presentase terendah pada kawasan TNL yaitu Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2 persen terhadap total luas kawasan konservasi taman nasional laut.

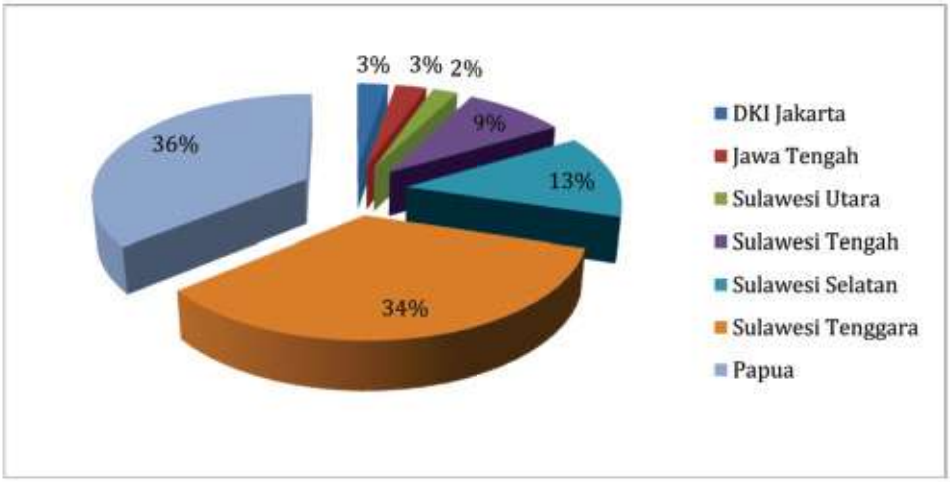

Sumber: Ditjen PRL

Gambar 10.2 Presentase Luas Kawasan Taman Nasional Laut Terhadap Total Luas Kawasan TNL Tahun 2015

10.2 Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL)

Tabel 10.3 menunjukkan jumlah kawasan konservasi taman wisata alam laut berjumlah 14 (empat belas) kawasan yang berlokasi di 7 (tujuh) provinsi. Pada Provinsi Aceh terdapat 2 (dua) kawasan dengan luas 231 ribu hektar, Provinsi Banten terdapat 1 (satu) kawasan dengan luas 720 hektar, Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 2 kawasan dengan luas 8.600 hektar, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 3 kawasan dengan luas 119 ribu hektar, Provinsi Kalimantan Timur terdapat 1 kawasan dengan luas 280 hektar, Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 2 kawasan dengan luas 118 ribu hektar, dan Provinsi Maluku terdapat 3 kawasan dengan luas 13 ribu hektar.

Tabel 10.3 Jumlah Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Tahun 2015

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
Aceh	2	231.400
Banten	1	720
Nusa Tenggara Barat	2	8.600
Nusa Tenggara Timur	3	119.350
Kalimantan Timur	1	280
Sulawesi Tenggara	2	117.800
Maluku	3	13.098
Total	**14**	**491.248**

Sumber: Ditjen PRL

Pada gambar 10.3 menunjukkan Provinsi Aceh merupakan lokasi kawasan taman wisata alam laut yang presentase luas kawasannya terbesar terhadap total luas taman wisata alam laut yaitu sebesar 47 persen dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa tenggara Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Banten, dimana presentase terendah berlokasi di Provinsi Banten sebesar 0,15 persen.

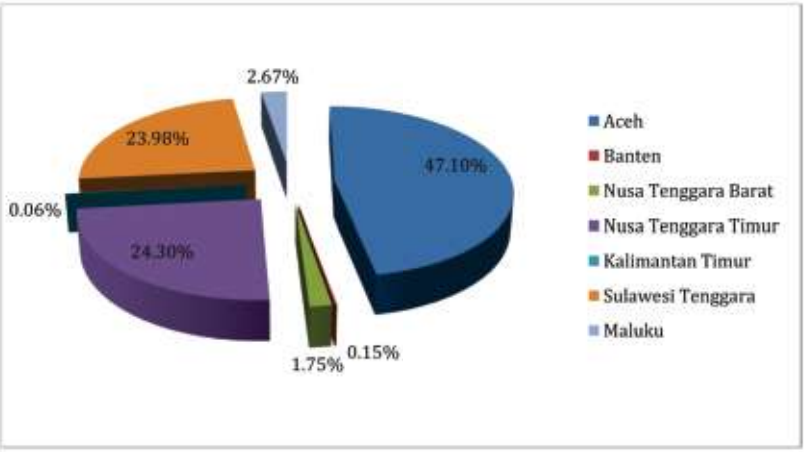

Sumber: Ditjen PRL

Gambar 10.3 Presentase Luas Kawasan Taman Wisata Alam Laut Terhadap Total Luas Kawasan TWAL Tahun 2015

10.3 Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Laut (SML)

Pada tabel 10.4 menunjukkan ada 5 (lima) jumlah lokasi kawasan konservasi suaka margasatwa alam laut yang berada di 4 (empat) Provinsi yaitu 1 (satu) lokasi kawasan di Provinsi DKI Jakarta dengan luas 90 hektar, 1 (satu) lokasi di Provinsi Jawa Barat dengan luas 90 hektar, 1 (satu) lokasi di Provinsi Kalimatan Timur dengan luas 220 hektar, dan 2 (dua) lokasi di Papua Barat dengan luas 5 ribu hektar.

Tabel 10.4 Jumlah Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Laut Tahun 2015

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
DKI Jakarta	1	90
Jawa Barat	1	90
Kalimantan Timur	1	220
Papua Barat	2	5.278
Total	**5**	**5.678**

Sumber: Ditjen PRL

Presentase luas kawasan konservasi di Provinsi Papua terhadap total luas kawasan konservasai sebesar 93 persen. Hal ini dapat dilihat pada gambar 10.4.

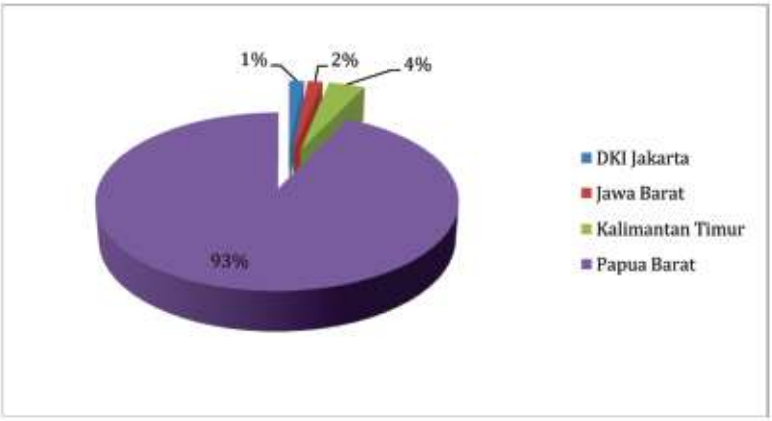

Sumber: Ditjen PRL

Gambar 10.4 Presentase Luas Kawasan Suaka Margasatwa Laut Terhadap Total Luas Kawasan SML Tahun 2015

10.4 Kawasan Konservasi Cagar Alam Laut (CAL)

Tabel 10.5 Jumlah Kawasan Konservasi Cagar Alam Laut Tahun 2015

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
Lampung	1	11.200
Jawa Barat	2	1.620
Nusa Tenggara Timur	1	2.000
Kalimantan Barat	1	77.000
Papua Barat	1	62.660
Total	**6**	**154.480**

Sumber: Ditjen PRL

Jumlah kawasan konservasi cagar alam laut berjumlah 6 (enam) lokasi yang berada di 5 (lima) Provinsi. Pada Provinsi Lampung dengan luas 11.200 hektar berjumlah 1 (satu) lokasi, di Provinsi Jawa Barat berjumlah 2 (dua) lokasi dengan luas 1.620 hektar, 1 (satu) lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 2.000 hektar, 1 (satu) lokasi di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas sebesar 77.000 hektar dan Provinsi Papua berjumlah 1 (satu) lokasi kawasan konservasi dengan luas sebesar 62.660 hektar.

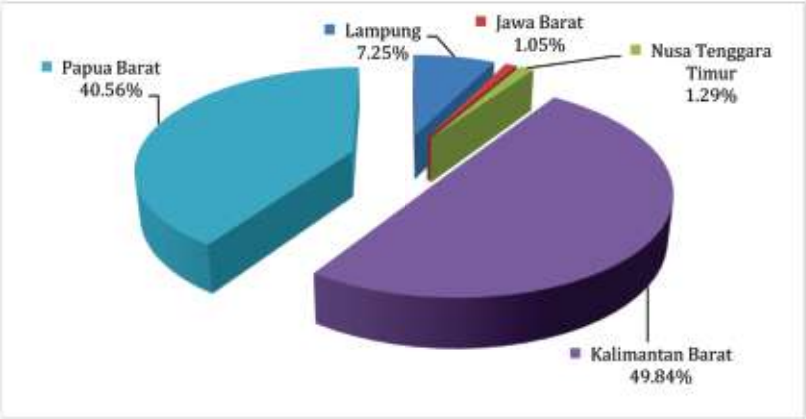

Sumber: Ditjen PRL

Gambar 10.5 Presentase Luas Kawasan Konservasi Cagar Alam Laut Terhadap Total Luas Kawasan CAL Tahun 2015

Pada gambar 10.5, presentase luas kawasan konservasi pada masing-masing Provinsi terhadap total luas kawasan konservasi tahun 2015 sebesar 49,84 persen berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, 40,56 persen berlokasi di Papua Barat, 7,25 persen berlokasi di Provinsi Lampung, 1,29 persen berlokasi di Nusa Tenggara Timur dan 1,05 persen berlokasi di Jawa Barat.

10.5 Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan (TNP)

Tabel 10.6 Jumlah Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Tahun 2015

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
Nusa Tenggara Timur	1	3.355.353
Total	**1**	**3.355.353**

Sumber: Ditjen PRL

Luas kawasan konservasi taman nasional perairan sebesar 3,35 juta hektar yang belokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 1 (satu) kawasan konservasi.

10.6 Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan (SAP)

Tabel 10.7 Jumlah Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Tahun 2015

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
Maluku	1	114.000
Papua Barat	2	331.630
Total	**3**	**445.630**

Sumber: Ditjen PRL

Luas kawasan konservasi suaka alam perairan sebesar 446 ribu hektar terbagi di 2 (dua) provinsi yaitu 1 (satu) lokasi kawasan konservasi berada di Provinsi Maluku dengan luas 114 ribu hektar dengan presentase sebesar 26 persen terhadap total luas kawsan konservasi suaka alam perairan dan 2 (dua) lokasi kawasan konservasi berada di Provinsi Papua Barat dengan luas 332 ribu hektar atau sebesar 74 persen terhadap total luas.

10.7 Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP)

Tabel 10.8 Jumlah Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Tahun 2015

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
Sumatera Barat	1	39.900
Kep. Riau	1	1.262.686
Nusa Tenggara Barat	1	2.954
Sulawesi Tenggara	1	50.000
Maluku	1	2.500
Papua	1	183.000
Total	**6**	**1.541.040**

Sumber: Ditjen PRL

Tabel 10.8 menunjukkan jumlah kawasan konservasi taman wisata perairan berjumlah 6 (enam) lokasi yang berada di 6 (enam) provinsi. Pada Provinsi Sumatera Barat dengan luas 39.900 hektar berjumlah 1 (satu) lokasi, 1 (satu) lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 2.954 hektar, 1 (satu) lokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas sebesar 50.000 hektar, 1(satu) lokasi di Provinsi Maluku dengan luas 2.500 hektar, di Provinsi Papua berjumlah 1 (satu) lokasi kawasan konservasi dengan luas 183.000 hektar dan Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1 (satu) lokasi dengan luas 1,26 juta hektar dengan presentase luas kawasan sebesar 81,94 persen terhadap total luas kawasan konservasi taman wisata perairan merupakan presentase terbesar dibandingkan dengan kelima provinsi lainnya. Presentase luas kawasan konservasi taman wisata perairan selengkapanya dapat dilihat pada gambar 10.6.

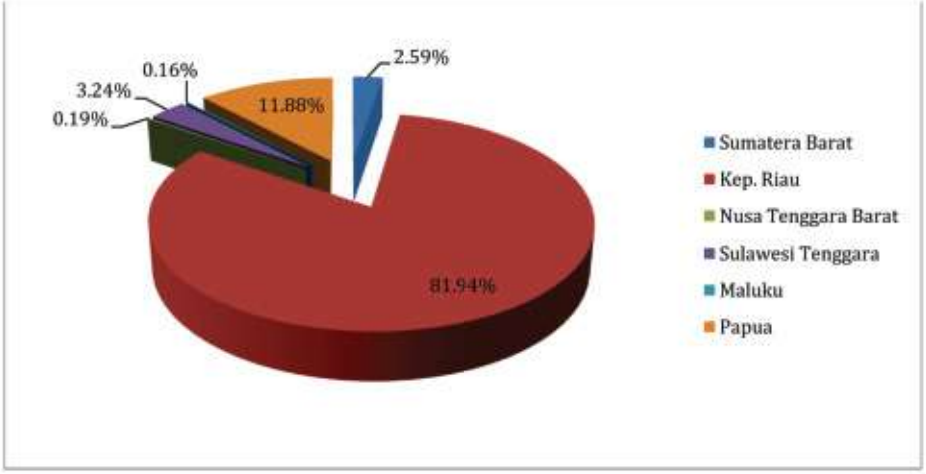

Sumber: Ditjen PRL

Gambar 10.6 Gambar Presentase Luas Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Terhadap Total Luas Kawasan TWP Tahun 2015

10.8 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

Tabel 10.9 Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahun 2015

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
Aceh	4	53.582,98
Sumatera Utara	5	167.714,15
Sumatera Barat	9	198.960,99
Riau	1	40.741,80
Bengkulu	3	87.475,78
Jambi	2	30,27
Lampung	2	91.081,20
Kep. Bangka Belitung	5	799.892,63
Kep. Riau	6	1.077.463,47
Jawa Barat	3	32.314,99
Jawa Tengah	5	57.721,73
DI Yogyakarta	2	3.570,46
Jawa Timur	4	121.606,40
Banten	1	7.391,00

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
Bali	3	37.630,65
Nusa Tenggara Barat	7	103.643,85
Nusa Tenggara Timur	4	817.882,30
Kalimantan Barat	1	15.300,00
Kalimantan Tengah	1	171.679,00
Kalimantan Timur	2	290.387,38
Kalimantan Selatan	2	34.959,14
Kalimantan Utara	2	274,00
Sulawesi Utara	4	67.864,00
Gorontalo	2	2.460,00
Sulawesi Tengah	6	177.827,79
Sulawesi Selatan	4	181.544,65
Sulawesi Tenggara	9	535.812,59
Sulawesi Barat	2	82.880,00
Maluku	1	150.000,00
Maluku Utara	5	9.718,46
Papua Barat	4	1.821.508,93
Papua	1	24.910,00
Total	**112**	**7.265.830,59**

Sumber: Ditjen PRL

Luas kawasan konservasi perairan daerah terluas ada di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 1,82 juta hektar dengan jumlah kawasan sebanyak 4 (empat) kawasan dan presentase luas kawasan terhadap total KKPD sebesar 26 persen. Diurutan kedua luas kawasan yg terluas berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 1,08 juta hektar dengan jumlah kawasan sebanyak 6 (enam) kawasan dan presentase luas kawasan sebesar 14,83 persen terhadap total luas kawasan, kemudian diikuti oleh luas kawasan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 817.882,30 hektar terdiri dari 4 (empat) kawasan dengan presentase luas terhadap total KKPD sebesar 11,26 persen.

10.9 Kawasan Konservasi Suaka Perikanan (SP)

Tabel 10.10 Jumlah Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Tahun 2015

Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
Jawa Tengah	1	12
Jawa Timur	2	370,23
Nusa Tenggara Barat	1	71
Total	**4**	**453,23**

Sumber: Ditjen PRL

Pada tabel 10.10 , total luas kawasan konservasi suaka perikanan seluas 453,23 Ha dengan jumlah kawasan sebanyak 4 kawasan. 1 (satu) kawasan berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 12 Ha, 2 (dua) kawasan berlokasi di Provinsi Jawa Timur dengan luas 370,23 Ha dan 1 (satu) kawasan berlokasi di Nusa Tenggara Barat dengan luas 71 Ha. Sedangkan presentase luas kawasan konservasi SP terhadap total kawasan konservasi dapat dilihat pada gambar 10.7.

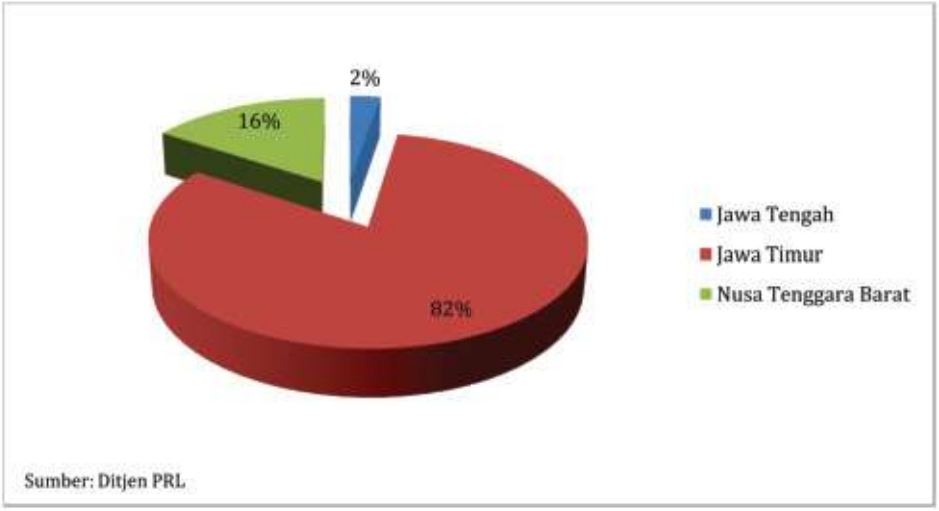

Gambar 10.7 Presentase Luas Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Terhadap Total Luas Kawasan SP Tahun 2015

11 Pulau-pulau Kecil, Termasuk Pulau-pulau Terluar yang dikelola

11 Pulau-pulau Kecil, Termasuk Pulau-pulau Terluar yang Dikelola

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di Dunia dengan jumlah pulau 17.504 pulau dan memiliki panjang garis pantai sekitar 99.093 km. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia menduduki urutan kedua setelah Kanada. Pulau-pulau yang ada di Indonesia didominasi oleh pulau dengan pulau kecil (luas kurang dari 2.000 km2) dan pulau sangat kecil (luas kurang dari 100 km2 dan atau memiliki lebar kurang dari 3 km).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pulau-pulau kecil yaitu jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar yang dikelola. Total target pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola pada satu periode Renstra KKP (tahun 2010-2015) yaitu sebesar 225 pulau, sedangkan target dan realisasi atau capaian IKU (tahun 2010-2015) dapat dilihat pada tabel 11.1.

Tabel 11.1 Target dan Capaian IKU Jumlah Pulau-Pulau Kecil, termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Dikelola

Tahun	Jumlah Pulau	
	Target	Realisasi
Total Jumlah	**225**	**238**
2010	20	20
2011	55	37
2012	60	74
2013	50	62
2014	20	25
2015	20	20

Sumber: Ditjen PRL

Target tahun 2015 yang telah ditetapkan pada Renstra KKP 2010-2015 terkait IKU tersebut yaitu sebesar 20 pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola. Capaian IKU tersebut hingga bulan Desember tahun 2015 mencapai 20 pulau, hal ini sesuai dengan target. Perkembangan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir terkait IKU ini yakni sebesar 16,52 persen. Selengkapnya perkembangan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola dapat dilihat pada tabel 11.2 dan gambar 11.1.

Tabel 11.2 Perkembangan Jumlah Pulau-Pulau Kecil, Termasuk Pulau Kecil Terluar Yang Dikelola

Parameter	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *)	Trend (%)
Jumlah Pulau-Pulau Kecil, Termasuk Pulau Kecil Terluar Yang Dikelola	20	37	74	62	33	20	16.52

Sumber : Ditjen PRL
*) Data hingga Desember Tahun 2015

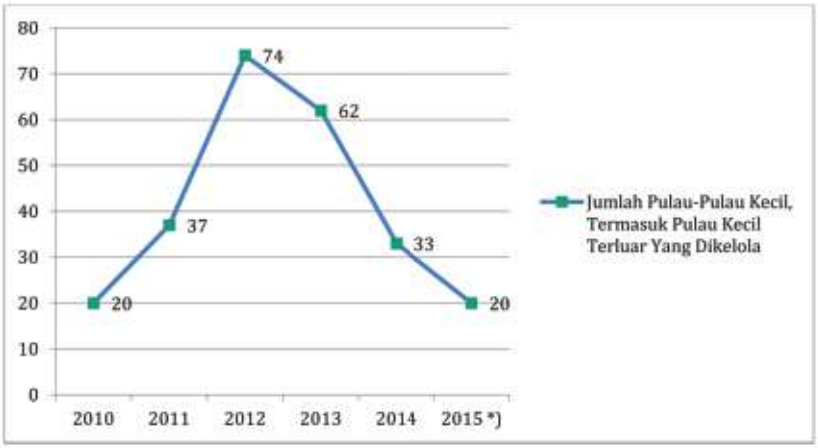

Sumber : Ditjen PRL
*) Data hingga Desember Tahun 2015

Gambar 11.1 Jumlah Pulau-Pulau Kecil, Termasuk Pulau Kecil Terluar Yang Dikelola

Daftar 20 (dua puluh) pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang menjadi capaian indikator kinerja Jumlah PPKT Yang Difasilitasi Pengembangan Ekonominya (Pulau) Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 11.3 dibawah ini.

Tabel 11.3 Daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Yang Menjadi Capaian Indikator Kinerja Jumlah PPKT Yang Difasilitasi Pengembangan Ekonominya (Pulau) Tahun 2015

No	Nama Pulau	Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Pulau Maratua	Berau	Kalimatan Timur
2	Pulau Simeulucut	Simeulue	Aceh
3	Pulau kolepon, Distrik Kiman	Merauke	Papua
4	Pulau Senua	Natuna	Kepulauan Riau
5	Pulau Larat	Maluku Tengggara Barat	Maluku
6	Pulau Sangihe	Sangihe	Sulawesi Utara
7	Pulau Kakorotan	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara
8	Pulau Kawio	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara
9	Pulau Masela	Maluku Barat Daya	Maluku
10	Pulau Kawaluso	Kep. Sangihe	Sulawesi Utara
11	Pulau Marore	Kep. Sangihe	Sulawesi Utara
12	Pulau Bras	Supiori	Papua
13	Pulau enggano	Bengkulu Utara	Bengkulu
14	Pulau wetar	Maluku Barat Daya	Maluku
15	Pulau Liran	Maluku Barat Daya	Maluku
16	Pulau kolepon	Merauke	Papua
17	Pulau Sebatik	Nunukan	Kalimatan Utara
18	Pulau Nusakambangan	Cilacap	Jawa Tengah
19	Pulau Lingayan	Tolitoli	Sulawesi Tengah
20	Pulau Alor	Alor	Nusa Tenggara Timur

Sumber: Ditjen PRL

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 12

12 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, Ditjen PSDKP berperan melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pokok utama dari tugas dan fungsi pengawasan adalah menjamin terselenggaranya pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, agar SDKP terjamin kelestariannya serta dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Saat ini, terdapat dua Undang-undang Republik Indonesia yang secara langsung mengamanatkan perlunya menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009, dan Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara garis besar meliputi: pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran atau distribusi produk perikanan, termasuk pengangkutan ikan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pemanfaatan sumber daya kelautan.

12.1 Tantangan Pengawasan Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

a. Masih maraknya kegiatan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).

Beberapa modus/jenis *Illegal Fishing* yang sering dilakukan oleh KII, antara lain:

- Penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
- Memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (a.l: pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan);
- Pemalsuan/manipulasi dokumen (a.l: dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal);
- Transshipment di tengah laut;
- Tidak mengaktifkan transmiter VMS (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter); dan
- Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, maupun bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Adapun kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA adalah pencurian/penjarahan ikan di WPP-NRI. KIA tersebut berasal dari

beberapa negara tetangga seperti: Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok, Taiwan, dan Kamboja. Sebagian besar pencurian ikan tersebut terjadi di ZEEI (*Exlusive Economic Zone Indonesia*), khususnya di 3 (tiga) wilayah laut, yaitu: Laut China Selatan, Laut Arafura, dan Laut Sulu Sulawesi, disamping juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*.

b. Data stok ikan terkini dan *reliable* (dapat diandalkan) belum tersedia.

c. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) telah mengalami *overfishing* dan *overcapacity*.

d. Hasil tangkapan nelayan skala kecil belum terdata dengan baik.

e. Terancam punahnya beberapa spesies ikan endemik, seperti: Ikan Lemuru di Selat Bali, Ikan Belida di Sumatera Selatan.

2. Bidang Perikanan Budidaya

a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;

b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut; dan

c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

a. Hanya 30-50persen dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku; dan

b. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang notabene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut Indonesia.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

a. Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor.

b. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan.

c. Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

d. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*;

b. Eksploitasi mangrove;

c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

12.2 Operasi Pengawasan Kapal Penangkapan Ikan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan telah melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan baik sebelum melaut (*before fishing*) adalah SLO (Surat Laik Operasional) dan SPB (Surat Perintah Berlayar), pada saat melaut (*while fishing*), saat kedatangan (*during landing*) maupun setelah mendarat (*postlanding*).

Sebelum melaut yang diperiksa antara lain dokumen perizinan, aktivasi VMS (*Vessel Monitoring System*), alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI), kesesuaian ABK dengan kapalnya, dan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter). Sementara pada saat melaut yang dipantau adalah kapal-kapal berbendera asing yang masuk wilayah Republik Indonesia tanpa izin dan kapal-kapal berbendera Indonesia yang melanggar peraturan, dan pada saat kedatangan (*during landing*) yang diawasi adalah 1) pengisian logbook untuk mengetahui asal usul ikan dan sebagai gambaran stock ikan; 2) SHTI (Surat Hasil

Tangkapan Ikan); 3) laporan pemeriksaan kedatangan kapal ikan untuk menjustifikasi kelayakan bongkar muat kapal tersebut, kemudian dicek kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap dan kesesuaian pelabuhan pangkalan; dan pengawasan kapal setelah mendarat (*post landing*) yang diawasi adalah distribusi hasil tangkapan, untuk memastikan pasokan bahan baku bagi UPI.

IUU fishing merupakan isu yang paling kompleks penanganannya dan dampak yang diakibatkannya berskala regional dan global, sehingga menjadi kegiatan prioritas dalam lingkup program pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Praktek-praktek *IUU fishing* yang terjadi di WPP-NRI, baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) berpotensi menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kondisi tersebut di atas menuntut kemampuan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan yang memadai. Di sisi lain, Indonesia juga dituntut untuk dapat mengendalikan dan mengontrol seluruh armada perikanannya yang beroperasi di wilayah perairan.

Berbagai modus operandi *IUU fishing* yang sering terjadi, di antaranya :

1. penangkapan ikan tanpa izin;
2. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang;
4. penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang, atau tidak sesuai izin;
5. pemalsuan data tangkapan, atau hasil tangkapan tidak dilaporkan dengan benar;
6. membawa hasil tangkapan langsung ke negara lain (*transshipment* di tengah laut), tidak melaporkan hasil tangkapan di pelabuhan yang telah ditetapkan;
7. melanggar ketentuan: alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI), *fishing ground, port of call*;

8. manipulasi persyaratan: *deletion certificate, bill of sale*;
9. kapal perikanan menggunakan bendera ganda *(double flagging)*;
10. kapal perikanan berbendera Indonesia menggunakan ABK asing melebihi prosentase yang ditetapkan; dan
11. kapal perikanan berganti-ganti nama dan nomor kapal, untuk mengelabui aparat pengawas, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil operasi pengawasan oleh Ditjen PSDKP, *IUU fishing* oleh KII maupun KIA ditemukan terjadi baik di wilayah perairan kepulauan, wilayah perairan teritorial, maupun di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sedangkan dari hasil pemantauan posisi dan pergerakan KII menggunakan *vessel monitoring system* (VMS), terdapat kecenderungan KII mematikan transmitter VMS ketika berada di daerah perbatasan luar ZEEI dan juga ketika beroperasi di luar ZEEI. Hal ini menunjukkan adanya potensi kesengajaan melakukan pelanggaran, agar tidak dapat dipantau keberadaan dan aktivitas operasinya.

Dampak atau kerugian yang dapat terjadi akibat *IUU Fishing* bagi Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Dampak/Kerugian Ekonomi
   Terdapat berbagai angka yang diyakini sebagai angka kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek-praktek *IUU fishing*, tergantung pada pendekatan yang digunakan di dalam menghitung kerugian tersebut.
2. Dampak Sosial di antaranya, terancamnya keberlanjutan mata pencaharian nelayan skala kecil, karena kalah bersaing dengan kapal-kapal perikanan asing dengan skala yang lebih besar; menurunnya hasil tangkapan per-unit usaha nelayan, karena kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya; penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, termasuk usaha pengumpulan dan pengolahan ikan.
3. Dampak terhadap ekologi/lingkungan, seperti: kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya akibat penggunaan alat tangkap yang *eksploitatif* dan tidak ramah lingkungan; *overfishing* dan *overcapacity* di sejumlah WPP-NRI.

Di samping kerugian tersebut, terdapat kerugian non material yang berdampak buruk akibat dari praktek *IUU fishing*, di antaranya:

1. Hasil tangkapan yang tidak didaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan, menyulitkan otoritas pengelola perikanan dalam menyediakan data yang akurat, yang sangat diperlukan untuk mengatur perijinan pemanfaatan sumber daya ikan.
2. Beralihnya mata pencaharian nelayan kecil ke bidang usaha lain, termasuk kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, seperti: menjadi penambang pasir timah liar, menjajakan jasa keahliannya melaut untuk mengangkut imigran gelap, memburu spesies ikan yang terancam punah karena adanya permintaan pasar dengan harga tinggi, dan lain sebagainya.
3. Hilangnya peluang kesempatan kerja bagi nelayan dalam negeri akibat penggunaan ABK asing, dan menurunnya kesempatan kerja pada industri pengolahan ikan di dalam negeri akibat kekurangan bahan baku.

Data pada tabel 12.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 gelar operasi rutin pengawasan SDKP di WPP-NRI dilakukan oleh 27 unit Kapal Pengawas SDKP dengan jumlah hari operasi sebanyak 7.283 hari, naik 235,16 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kapal yang diperiksa, naik 231,80 persen (6.782 kapal) yang terdiri dari 62 KIA dan 6.720 KII, dan jumlah kapal yang ditangkap sebanyak 108 kapal yang terdiri dari 48 unit KII dan 60 unit KIA, naik 184,21 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel12.1 Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas, Pemeriksaan, Penangkapan dan Jumlah Kapal Pengawas Tahun 2009 s.d. 2015

Satuan: Unit

TAHUN	Σ HARI OPERASI	DIPERIKSA			DITANGKAP			Σ KAPAL PENGAWAS
		KII	KIA	Σ	KII	KIA	Σ	
2009	4.365	3.822	139	3.961	78	125	203	24
2010	2.892	2.089	166	2.255	24	159	183	24
2011	4.407	3.269	79	3.348	30	76	106	25
2012	4.776	4.252	74	4.326	42	70	112	26
2013	4.291	3.824	47	3.871	24	44	68	26
2014	2.173	2.028	16	2.044	22	16	38	27
2015	7.283	6.720	62	6.782	48	60	108	27
JUMLAH	**30.187**	**26.004**	**583**	**26.587**	**268**	**550**	**818**	

Keterangan:
*) Update per tanggal 31 Desember 2015

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada gambar 12.1, di bawah ini:

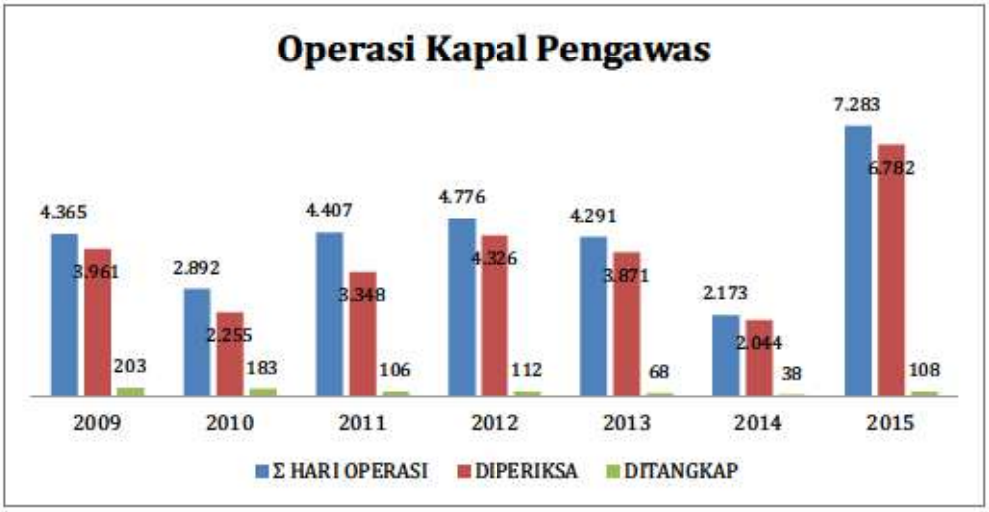

Gambar12.1 Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas, Kapal yang Diperiksa dan Ditangkap

Berdasarkan gambar 12.1 di atas terlihat bahwa pada tahun 2009 hanya 5,12 persen (203 kapal) yang ditangkap dari 3.961 kapal yang diperiksa dengan hari operasi selama 4.365 hari, tahun 2010 hanya 8,12 persen (183 kapal) yang

ditangkap dari 2.255 kapal yang diperiksa dengan hari operasi selama 2.892 hari, tahun 2011 hanya 3,17 persen (106 kapal) yang ditangkap dari 3.348 kapal yang diperiksa dengan hari operasi selama 4.407 hari, tahun 2012 hanya 2,59 persen (112 kapal) yang ditangkap dari 4.326 kapal yang diperiksa dengan hari operasi selama 4.776 hari, tahun 2013 hanya 1,76 persen (68 kapal) yang ditangkap dari 3.871 kapal yang diperiksa dengan hari operasi 4.291 hari, dan tahun 2014 hanya 1,86 persen (38 kapal) yang ditangkap dari 2.044 kapal yang diperiksa dengan hari operasi 2.173 hari. Sementara itu, pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari sisi jumlah hari operasi dan kapal yang diperiksa, yaitu masing-masing menjadi sebesar 7.283 hari dan 6.782 kapal. Meskipun demikian presentase kapal yang ditangkap terhadap kapal yang diperiksa turun menjadi 1,59 persen (108 kapal).

Tabel 12.2 Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera Kebangsaan Kapal

Satuan: Unit

No.	Bendera Kebangsaan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1	Indonesia	78	24	30	42	24	22	42	262
2	Malaysia	9	22	11	5	14	0	5	66
3	Philipina	4	8	13	17	9	0	6	57
4	RRC	8	7	0	0	0	0	0	15
5	Thailand	27	7	3	8	4	7	6	62
6	Vietnam	76	115	42	40	17	9	36	335
7	Taiwan	0	0	6	0	0	0	0	6
8	Hongkong	1	0	1	0	0	0	0	2
	Total	**203**	**183**	**106**	**112**	**68**	**38**	**95**	**805**

Keterangan: *Up to date* Desember 2015

Tabel 12.2 diatas menginformasikan hasil tangkapan kapal pengawas pada tahun 2009 sampai dengan 2015 berdasarkan bendera kebangsaan asal kapal. Pada tahun 2010 kapal yang berbendera Vietnam paling banyak masuk wilayah perairan Republik Indonesia dan ditangkap oleh kapal pengawas yaitu sebanyak 62,84 persen (115 kapal). Dari 7 (tujuh) negara yang masuk tanpa izin di wilayah perairan Indonesia termasuk kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran, yang paling sedikit ditangkap oleh kapal pengawas selama tahun 2009 sampai

dengan 2015 adalah kapal ikan asing yang berbendera Hongkong sebanyak 0,28 persen (2 kapal) dan Taiwan sebanyak 0,85 persen (6 kapal).

Gambar 12.2 Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera/ Kebangsaan Kapal Tahun 2009 – 2015

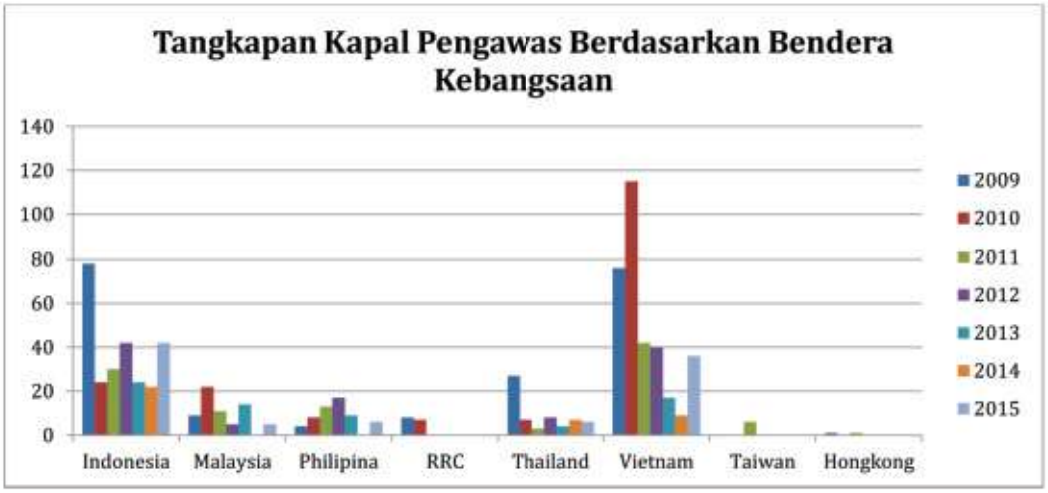

Selain operasi mandiri oleh kapal pengawas Ditjen PSDKP, juga dilakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait (TNI-AL, POLAIR dan BAKORKAMLA) yang biasa disebut dengan istilah "Operasi Bersama". Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasaan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran.

Kapal-kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas tersebut diduga melakukan beberapa pelanggaran di wilayah perairan Republik Indonesia antara lain :

1. Menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak memiliki dokumen perizinan;
2. Pelanggaran daerah penangkapan;
3. Menangkap ikan dengan armada tanpa izin, modifikasi alat tangkap, ABK asing, dan tidak pernah bongkar di pelabuhan yang ditetapkan;

4. Pengangkatan BMKT tanpa izin; dan
5. Pemanfaatan lingkungan sumber daya perikanan dan ekosistem perairan tanpa izin dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penegakan hukum *(law enforcement)*.

Pada tahun 2015, KKP bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya telah menenggelamkan 121 kapal pelaku *illegal fishing* yang terdiri dari 10 KII dan 111 KIA. Penenggelaman kapal dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah sehingga kondisi kapal tetap terjaga, dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman. Diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut, sehingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No.45/2009, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam KUHAP.

12.3 Upaya Pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia

Upaya pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia dilakukan dengan pendekatan *soft structure* dan *hard structure*.

Upaya *soft structures*, antara lain meliputi :

1. *Review* dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan mandat IPOA, pada tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan *National Plan of Action* (Rencana Aksi Nasional) Pemberantasan *IUU fishing* 2012-2016, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 50 tahun 2012 tentang NPOA 2012-2016.

Rencana Aksi ini akan direviu dan disempurnakan setiap 4 (empat) tahun sekali, disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

2. Pada akhir tahun 2014, KKP telah menerbitkan 2 (dua) regulasi yang bertujuan mencegah dan memberantas praktek-praktek *IUU Fishing*, yaitu:
   a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP NRI; dan
   b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas PERMEN-KP Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP NRI yaitu penghentian alih muatan (*transhipment*) di tengah laut.
3. Penguatan dan pengembangan unit-unit pelaksana teknis (UPT) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (UPT PSDKP).
4. Penguatan kapasitas pengawas perikanan dan PPNS perikanan.
5. Kerjasama Regional:
   a. Menjadi anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional *(Regional Fisheries Management Organizations/*RFMOs*)*. Saat ini Indonesia telah menjadi anggota penuh dari beberapa RFMOs, yaitu: *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Convention of Conservation on Southern Blufin Tuna* (CCSBT), dan *West and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC).
   b. Bersama-sama dengan 10 (sepuluh) Negara ASEAN plus Australia membentuk *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-IUU)*, dan sejak pembentukannya di tahun 2007, Indonesia bertindak selaku Koordinator Sekretariat RPOA-IUU.
   c. Menggalang kerjasama bilateral. Dengan Australia kerjasama pemberantasan *IUU fishing* diwujudkan dalam fora Indonesia *Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*.

d. Berpartisipasi aktif dalam fora-fora Perikanan Regional dan Internasional (ASEAN-SEAFDEC, APEC, CTI-CFF, IORC, COFI-FAO).

e. Menerapkan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan (*conservation and management measures*/CMM), dan ketentuan-ketentuan lainnya, seperti *European Commission Regulation* no. 1005/2008, mengupayakan meratifikasi *Port State Measures Agreement*/PSMA, dll.].

Upaya-upaya *hard structures*, antara lain meliputi :

1. Mengimplementasikan *monitoring, control and surveillance* (MCS) secara konsisten, termasuk menerapkan system pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system*/VMS), mendorong pemenuhan ketentuan tentang *observer onboard*, penerapan *logbook*, meningkatkan *port inspection*, bersama-sama Ditjen Perikanan Tangkap membangun *Database Sharing System* (DSS).

2. Melaksanakan pemeriksaan kapal perikanan : *before fishing, while fishing, during landing, and post landing*, sebagaimana *MCS Technical Guidelines.*

   Monitoring, mencakup kegiatan-kegiatan pengumpulan, pengaturan dan analisis penangkapan ikan dan kegiatan yang terkait lainnya, namun tidak terbatas pada hasil tangkapan, komposisi spesies, usaha penangkapan, hasil sampingan dari penangkapan ikan *(by catch)*, hasil tangkapan yang dibuang *(discards)* dan wilayah operasi penangkapan ikan.

   Control, berkaitan dengan pembentukan aturan yang terdiri dari spesifikasi syarat dan ketentuan dimana sumber daya dapat ditangkap.

   Surveillance, melingkupi kegiatan-kegiatan pengecekan dan supervisi terhadap kegiatan penangkapan ikan serta kegiatan yang terkait dan memastikan aturan nasional, syarat dan kondisi serta aturan pengelolaan diobservasi.

3. Membangun sarana dan prasarana pengawasan

4. Mendorong pengembangan *Integrated Surveillance Systems*, termasuk menggalang pertukaran data dan informasi antar instansi terkait.
5. Memfasilitasi dan membina kelompok masyarakat pengawas [POKMASWAS]
6. Melaksanakan operasi gabungan pengawasan di laut dengan institusi-institusi terkait (BAKORKAMLA, TNI-AL dan POLAIR).
7. Pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia melibatkan beberapa unit teknis lingkup KKP dan berbagai institusi penegak hukum lainnya.
8. Menyelenggarakan *coordinated patrol* dengan beberapa negara tetangga (Australia, Malaysia, Singapura).
9. Bersama-sama Mahkamah Agung, membangun 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan.

Survei Nilai Tambah Perdagangan Komoditas Garam dan Ikan

13

13 Survei Nilai Tambah Perdagangan Komoditas Garam dan Ikan

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Cakupan perdagangan meliputi perdagangan besar dan perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan besar dan perdagangan eceran hasil ekstraksi garam, dan perdagangan besar dan perdagangan eceran hasil pengolah perikanan.

Nilai tambah adalah tambahan nilai terhadap barang antara setelah berubah menjadi barang baru (misal barang akhir). Konsep nilai tambah adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar faktor produksi seperti upah (tenaga kerja), bunga dan sewa (modal), dan keuntungan (enterpreunership). Nilai tambah setiap komponen (barang antara) dapat dihitung dengan cara yang sama. Nilai tambah memberikan informasi pendapatan faktor produksi, teknologi produksi, dan jumlah faktor produksi yang digunakan.

Untuk mengetahui nilai tambah dalam sektor perdagangan diperlukan informasi mengenai output perdagangan, rasio marjin perdagangan dan biaya antara perdagangan. Oleh karena itu maka diperlukan survey khusus untuk mengetahui informasi tersebut. Metode di dalam survey ini menggunakan

metode purpossive sampling. Dengan target responden yaitu pedagang ikan yang berada di pasar ikan dan pedagang garam dengan kriteria sebagai berikut:

a. Merupakan pedagang ikan/garam di pasar

b. Merupakan pedagang ikan/garam ≥1 tahun

c. Komoditas yang dijual ≥10 kg

d. Komoditas dijual kembali ke pedagang lain

Metode survei dilakukan dengan cara mendata, mewawancarai, dan observasi lapak (*face to face interview*). Pelaksanaan survei dilakukan tanggal bulan Oktober 2015 di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Sampang. Waktu survei dilaksanakan pagi, siang, sore atau malam tergantung pada kondisi pasar.

Nilai tambah perdagangan diperoleh dari nilai marjin barang yang dijual kembali atau nilai penjualan dikurangi nilai pembelian dan nilai biaya angkut.

13.1 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Survei ini dilaksanakan dengan lokasi survei Kabupaten Indramayu, dengan jumlah responden terpilih sebagai berikut: Untuk petambak garam di Kecamatan Krangkeng sebanyak 1 orang dan Kecamatan Losarang sebanyak 1 orang. Untuk pedagang ikan, Kecamatan Krangkeng, sebanyak 2 orang. Kecamatan Losarang sebanyak 2 orang.

Pedagang garam skala kecil yang berada di Kecamata Kerangkeng telah menjadi pedagang garam lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Untuk memenuhi persediaan garam yang dijual, garam diperoleh dari petambak garam di wilayah Kecamatan Kerangkeng dan apabila mengalami kekurangan persediaan garam, garam didatangkan dari wilayah lain seperti Kecamatan Losarang, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Cirebon, dan lain-lain. Garam yang dibeli dalam kurun waktu rata-rata sebulan sebanyak 100.000 kg untuk garam kualitas (kw) 1 dan sebanyak 20.000 kg untuk garam kualitas (kw) 2, dengan harga masing-masing

Rp. 450,-/kg untuk garam kw1 dan Rp. 380,-/kg untuk garam kw2. Garam tersebut dijual kembali kepada pedagang besar dengan harga Rp. 550,- /kg untuk garam kw 1 dan Rp. 450,-/kg untuk garam kw 2. Biaya pengeluaran meliputi biaya pembelian barang dagangan sebesar Rp. 52.000.000,-, biaya pengadaan karung baru sebesar Rp. 20,-/kg, jasa pembungkusan sebesar Rp. 10,-/kg dan kuli angkut sebesar Rp. 40,-/kg. Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 3.600.000,- dan nilai tambah sebesar Rp. 9.600.000,-.

Pedagang garam skala besar yang berada di Kecamata Losarang telah menjadi pedagang garam lebih dari 17 (tujuh belas) tahun. Garam yang dijual diperoleh dari wilayah kecamatan Losarang dan sekitarnya, dan apabila permintaan garam dari perusahaan meningkat maka garam diambil dari kabupaten lain seperti Kabupaten Cirebon. Garam diambil dari petambak garam secara periodik setiap hari untuk memenuhi permintaan garam dari perusahaan (sesuai kontrak). Garam yang diperoleh dijual ke perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan dan didistribusikan ke kabupaten/kota disekitar Kabupaten Indramayu seperti Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan lain-lain. Garam yang dibeli dalam kurun waktu rata-rata sebulan sebanyak 1.000.000 kg untuk garam kualitas (kw) 1, dengan harga Rp. 250,-/kg. Garam tersebut dijual kembali kepada pedagang besar dengan harga Rp. 550,-/kg. Biaya pengeluaran meliputi biaya pembelian barang dagangan sebesar Rp. 250.000.000,-, biaya pengadaan karung baru sebesar Rp. 30,-/kg, jasa pembungkusan sebesar Rp. 10,-/kg dan kuli angkut sebesar Rp. 50,-/kg. Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 50.000.000,- dan nilai tambah sebesar Rp. 100.000.000,-. Struktur biaya usaha perdagangan garam dan ikan di Kabupaten Indramayu terdapat dalam tabel 13.1 dan tabel 13.2.

Tabel 13.1 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Garam di Kabupaten Indramayu (bulanan)

Satuan: Rp

Parameter	Kecamatan	
	Krangkeng	Losarang
I PENDAPATAN DAN PENERIMAAN		
1 Penerimaan dari berdagang	64.000.000	550.000.000
JUMLAH	**64.000.000**	**550.000.000**
II BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG		
1 Pembelian barang dagangan	52.000.000	250.000.000
2 Biaya transport	ditanggung pembeli	60.000.000
3 Biaya pembungkusan/pengepakan	2.400.000	40.000.000
4 Sewa Lahan	lahan milik sendiri	lahan milik sendiri
5 Upah angkut	4.800.000	50.000.000
6 Jasa pembungkusan	1.200.000	
7 Lain-lain		100.000.000
KEUNTUNGAN	**3.600.000**	**50.000.000**
NILAI TAMBAH	**9.600.000**	**100.000.000**

Tabel 13.2 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di Kabupaten Indramayu (harian)

Satuan: Rp

Parameter	Kecamatan			
	Krangkeng - Sampel 1	Krangkeng - Sampel 2	Losarang - Sampel 1	Losarang - Sampel 2
I PENDAPATAN DAN PENERIMAAN				
1 Penerimaan dari berdagang	5.965.000	7.990.000	3.340.000	1.620.000
JUMLAH	**5.965.000**	**7.990.000**	**3.340.000**	**1.620.000**
II BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG				
1 Pembelian barang dagangan	5.305.000	7.115.000	2.960.000	1.440.000
2 Biaya transport	15.000	15.000	5.000	5.000
3 Biaya pembungkusan/pengepakan	200	200	150	150
4 Sewa Lahan	400	400	350	350
5 Retribusi pasar	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Listrik	500	500	500	500
7 Air	500	500	500	500
8 Es	600	600	600	600
9 Upah angkut	500	500	300	300
KEUNTUNGAN	**640.800**	**855.800**	**370.900**	**170.900**
NILAI TAMBAH	**641.300**	**856.300**	**371.200**	**171.200**

13.2 Kabupaten Serang, Banten

Jumlah responden yang disurvei adalah sebanyak 5 responden, terdiri dari: pedagang besar yang langsung memperoleh ikan dari produsen, dan pedagang besar yang mendapatkan ikan dari pedagang besar lainnya. Lama usaha bervariasi dengan kisaran 12 - 25 tahun, dengan skala usaha perorangan tanpa badan usaha. Responden yang disurvei seluruhnya berada di kawasan PPN Karangantu Serang, Banten.

Ikan yang dibeli sebagian besar diperoleh dari kapal-kapal yang melakukan bongkar di PPN Karangantu, namun ada juga responden yang mendapatkan pasokan ikan dari PPS Nizam Zachman Jakarta. Sedangkan ikan yang dijual sebagian besar didistribusikan di sekitar Kota Serang dan pasar-pasar tradisional seperti Pasar Rao, dan Pasar Baros.

Komoditas hasil perikanan yang dibeli dan dijual sangat bervariasi berdasarkan musim, namun yang sering dijumpai pada saat survei antara lain: ikan kuwe, tongkol, tetengkek, bawal putih, bawal hitam, kakap merah, tenggiri, cumi-cumi, udang jerbung, dan udang krosok. Tidak terdapat proses pengolahan lebih lanjut pada komoditas tersebut, selain penyimpanan di dalam steroform menggunakan es dan pembungkusan dengan plastik.

Volume dan nilai komoditas yang dibeli dan dijual oleh pedagang sangat tergantung pada kapasitas dan skala usahanya. Berdasarkan hasil survey ini, jika dilihat dari skala usahanya maka terdapat tiga jenis responden yaitu: (1) pedagang besar yang menjual hasil dagangannya ke pedagang besar lain; (2) pedagang besar yang menjual hasil dagangannya ke pedagang eceran; dan (3) pedagang eceran yang menjual hasil dagangannya langsung ke konsumen. Skala usaha jika dilihat dari pendapatannya bervariasi antara tiga puluh dua juta rupiah sampai dengan satu miliar rupiah per bulan September 2015.

Harga beli dan jual rata-rata oleh para pedagang untuk komoditas ikan tertentu dengan kualitas yang sama adalah sebagai berikut: ikan kuwe, beli Rp. 48.333,- dan jual Rp. 55.000,-; tongkol, beli Rp. 20.000,-/kg dan jual Rp. 22.500,-

/kg; tetengkek, beli Rp. 14.500,-/kg dan jual Rp. 18.500,-/kg; bawal putih, beli Rp. 245.000,-/kg dan jual Rp. 280.000,-/kg; bawal hitam, beli Rp. 48.333,-/kg dan jual Rp. 57.666,-/kg; kakap putih, beli Rp. 40.000,-/kg dan jual Rp. 45.000,-/kg; cumi-cumi, beli Rp. 44.333,-/kg dan jual Rp. 47.333,-/kg; udang jerbung, beli Rp. 72.500,-/kg dan jual Rp. 80.000,-/kg; dan udang krosok, beli Rp. 30.000,-/kg dan jual Rp. 35.000,-/kg.

Struktur biaya usaha perdagangan hasil perikanan di PPN Karangantu secara umum terdiri dari: biaya transport/angkut; sewa tempat; Es; air dan listrik; upah tenaga kerja; dan plastik. Struktur biaya usaha perdagangan ikan di PPN Karangantu, Serang dapat dilihat di tabel 13.3.

Tabel 13.3 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di PPN Karangantu, Serang (bulanan)

Satuan: Rp

Paramater	PPN Karangantu, Serang				
	Sampel 1	Sampel 2	Sampel 3	Sampel 4	Sampel 5
I PENDAPATAN DAN PENERIMAAN					
1 Penerimaan dari berdagang	1.145.750.000	672.552.000	615.600.000	36.945.000	172.992.000
JUMLAH	**1.145.750.000**	**672.552.000**	**615.600.000**	**36.945.000**	**172.992.000**
II BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG					
1 Pembelian barang dagangan	1.018.000.000	645.690.000	494.700.000	32.640.000	165.597.000
2 Biaya transport	3.250.000		510.000	600.000	
3 Biaya pembungkusan/pengepakan	85.000	80.000	59.000	50.000	30.000
4 Sewa Lahan	720.000	1.800.000	90.000		
5 Listrik					10.000
6 Es		960.000		600.000	1.440.000
7 Bongkar muat					
8 Garam					
9 Kebersihan	60.000				30.000
10 Upah tanaga kerja	11.200.000	12.000.000	6.000.000		
ATK	30.000		40.000		
KEUNTUNGAN	**112.405.000**	**12.022.000**	**114.201.000**	**3.055.000**	**5.885.000**
NILAI TAMBAH	**123.605.000**	**24.022.000**	**120.201.000**	**3.055.000**	**5.885.000**

13.3 Kabupaten Sampang, Jawa Timur

Responden yang diperoleh dalam survei nilai tambah perdagangan garam di kabupaten Sampang, Jawa Timur sebanyak 3 responden dengan rata-rata lama berdagang 15-16 tahun. Dari 3 responden tersebut, 2 diantaranya berlokasi di daerah perkotaan (Kelurahan Polagen) dan 1 di daerah pedesaan (Desa Pengarengan). Responden yang diperoleh dalam survei ini dikategorikan sebagai

pedagang besar. Seluruh garam yang diperdagangkan oleh para pedagang (pengepul) merupakan garam rakyat hasil produksi petani garam (100 persen) di kabupaten Sampang. Sedangkan rantai selanjutnya, dari para pengepul garam dijual ke pedagang besar lainnya, pabrik, dan eceran.

Volume komoditas garam yang dibeli oleh pengepul dari petani garam rata-rata sebanyak 500 – 1.050 ton per bulan, dengan harga beli berkisar antara Rp. 350,-/kg – Rp. 400,-/kg. Kemudian dijual kembali dengan harga rata-rata berkisar antara Rp. 450,-/kg – Rp. 600,-/kg. Adapun pasar penjualan garam dari para pengepul ini ditujukan kepada pabrik, pedagang besar lainnya, dan eceran. Harga jual garam ke pabrik lebih bersifat stabil dengan besaran yang relatif lebih rendah dibandingkan eceran. Meskipun demikian, pabrik mampu menyerap komoditas garam dalam volume yang sangat besar dibandingkan eceran.

Struktur biaya usaha perdagangan garam skala pedagang besar di Kabupaten Sampang, Jawa Timur secara umum terdiri dari: biaya pembelian barang dagangan, biaya transportasi, biaya pengepakan (karung), dan sewa gudang penyimpanan. Struktur biaya usaha perdaganan garam di Kabupaten Sampang terdapat dalam tabel 13.4.

Tabel 13.4 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Garam di Kabupaten Sampang (bulanan)

Satuan: Rp

	Paramater	Kelurahan/Desa		
		Polagen 1	Polagen 2	Pengarengan
I	**PENDAPATAN DAN PENERIMAAN**			
1	Penerimaan dari berdagang	250.000.000	384.000.000	472.500.000
2	Komisi dari garam titipan	0	5.062.500	500.000
	JUMLAH	**250.000.000**	**389.062.500**	**473.000.000**
II	**BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG**			
1	Pembelian barang dagangan	187.500.000	337.500.000	393.750.000
2	Biaya transport	15.000.000	24.750.000	34.650.000
3	Biaya pembungkusan/pengepakan	16.000.000	14.400.000	16.800.000
4	Sewa Lahan	4.166.667		
	KEUNTUNGAN	**27.333.333**	**12.412.500**	**27.800.000**
	NILAI TAMBAH	**27.333.333**	**12.412.500**	**27.800.000**

13.4 Kabupaten Tangerang, Banten

Responden yang disurvei di Kabupaten Tangerang sebanya 5 (lima) orang yang seluruhnya merupakan pedagang eceran, dengan usia 30-50 tahun dan lama berdagang antara 4-20 tahun. Komoditas yang dijual berasal dari pedagang besar dengan komoditas antara lain: ikan kembung, cumi, bawal, tongkol, udang, lele, ikan mas, nila, bandeng, layur dan kakap merah. Komoditas yang dibeli dari pedagang besar sebagian besar dijual kembali ke rumah tangga dan hanya sebagian kecil yang disimpan dan dikonsumsi sendiri. Struktur biaya usaha perdagangan ikan di Kabupaten Tangerang terdapat dalam tabel 13.5.

Tabel 13.5 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di Kabupaten Tangerang

Satuan: Rp

Parameter	Kabupaten Tangerang				
	Sampel 1	Sampel 2	Sampel 3	Sampel 4	Sampel 5
I PENDAPATAN DAN PENERIMAAN					
1 Penerimaan dari berdagang	3.097.000	1.500.000	714.286	3.500.000	2.500.000
2 Komisi					
JUMLAH	**3.097.000**	**1.500.000**	**714.286**	**3.500.000**	**2.500.000**
II BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG					
1 Pembelian barang dagangan	2.737.500	786.000	600.000	2.000.000	2.000.000
2 Biaya transport	60.000	10.000	20.000	76.000	76.000
3 Biaya pembungkusan/pengepakan	25.000	13.000	13.000	20.000	26.000
4 Sewa Lahan		4.167			13.000
5 Listrik	8.000	667	3.000	1.000	6.000
6 Es	70.000	10.000	10.000	25.000	35.000
7 Air	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Kebersihan/keamanan	1.000				30.000
9 Lainnya	2.500	3.083		10.000	1.500
KEUNTUNGAN	**186.000**	**668.083**	**63.286**	**1.363.000**	**307.500**

13.5 Muara Angke, Jakarta

Responden yang disurvei adalah sebanyak 5 (lima) responden, terdiri dari: pedagang besar yang langsung memperoleh ikan dari produsen, dan pedagang besar yang mendapatkan ikan dari pedagang besar lainnya. Lama usaha bervariasi dengan kisaran 3 - 20 tahun, dengan skala usaha berbadan hukum (perseroan terbatas) sampai dengan perorangan. Responden yang disurvei seluruhnya berada di kawasan PPS Nizam Zachman Jakarta.

Ikan yang dijual sebagian besar diperoleh dari kapal-kapal yang melakukan bongkar di PPS Nizam Zachman Jakarta, namun ada juga responden yang hanya menjual ikan di PPS Nizam Zachman sementara ikannya diperoleh dari pasokan beberapa daerah di luar Provinsi DKI Jakarta seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku. Sedangkan untuk skala perusahaan berbadan hukum, terdapat responden yang memperoleh ikan tanpa membeli, artinya perusahaan tersebut selain menjual ikan juga memiliki kapal penangkap ikan sendiri.

Komoditas hasil perikanan yang dibeli dan dijual sangat bervariasi berdasarkan musim, namun yang sering dijumpai pada saat survei antara lain: tuna, tongkol abu-abu, tongkol batik, marlin, layang, banjar, ekor kuning, selar, bentong, dan bandeng. Tidak terdapat proses pengolahan lebih lanjut pada komoditas tersebut, selain penyimpanan di tempat cold storage dan pengepakan atau pembungkusan dengan plastik.

Volume komoditas yang dibeli oleh pedagang sangat tergantung pada kapasitas dan skala usahanya, selama bulan September 2015 responden pedagang besar berbadan hukum (PT) mampu membeli 940 ton ikan dengan nilai Rp. 11,81 miliar atau rata-rata harga beli ikan Rp. 12.560,-/kg dan dijual dengan rata-rata harga ikan mencapai Rp. 14.134,-/kg. Sedangkan untuk responden dengan skala usaha lebih kecil tanpa berbadan hukum, selama bulan September 2015 mampu membeli ikan dari pedagang besar lainnya pada kisaran 17 - 60 Ton dengan rentang nilai Rp. 577,5 juta – Rp. 740 juta atau rata-rata harga ikan yang dibeli sekitar Rp. 12.333,-/kg – Rp. 33.000,-/kg dan dijual dengan rata-rata harga berkisar Rp. 13.667/kg – Rp. 46.000,-/kg.

Struktur biaya usaha perdagangan hasil perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta secara umum terdiri dari: biaya transport/angkut, sewa tempat, es, air dan listrik, upah tenaga kerja, dan plastik.

Tabel 13.6 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di PPS Nizam Zachman (bulanan)

Satuan: Rp

Parameter	PPS Nizam Zachman, Jakarta				
	Sampel 1	Sampel 2	Sampel 3	Sampel 4	Sampel 5
I PENDAPATAN DAN PENERIMAAN					
1 Penerimaan dari berdagang	820.000.000	2.605.000.000	13.288.790.500	805.000.000	42.480.000
JUMLAH	**820.000.000**	**2.605.000.000**	**13.288.790.500**	**805.000.000**	**42.480.000**
II BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG					
1 Pembelian barang dagangan	740.000.000	2.155.000.000	11.809.651.000	577.500.000	-
2 Biaya transport	24.600.000	35.100.000	519.075.000	750.000	9.720.000
3 Biaya pembungkusan/pengepakan	-	-	20.935.000	1.000.000	290.000
4 Sewa Lahan	25.000.000	25.000.000	-	175.000	300.000
5 Listrik	-	-	67.800.000	-	-
6 Es	-	-	-	-	112.000
7 Air	-	-	10.000.000	-	840.000
8 Upah tanaga kerja	3.000.000	15.000.000	200.000.000	8.750.000	7.500.000
9 Uang mandor	-	-	-	-	20.250.000
10 ATK					
11 Sewa bak	-	-	-	-	375.000
12 Sewa fiber	-	-	-	-	100.000
13 Sewa meja	-	-	-	-	50.000
14 Sewa lap	-	-	-	-	50.000
15 Keamanan	-	-	-	-	50.000
KEUNTUNGAN	**27.400.000**	**374.900.000**	**661.329.500**	**216.825.000**	**2.843.000**
NILAI TAMBAH	**30.400.000**	**389.900.000**	**861.329.500**	**225.575.000**	**30.593.000**

13.6 Kota Bandung, Jawa Barat

Responden yang diperoleh dalam survei nilai tambah perdagangan ikan di Kota Bandung, Jawa Barat adalah perwakilan dari pedagang ikan eceran di Pasar Sederhana dan pengurus koperasi pedagang ikan besar di Pasar Ciroyom. Bahan baku ikan perdagangan skala grosir di Pasar Ciroyom berasal dari berbagai daerah, seperti Lampung; Merak (Banten); Muara Angke (DKI Jakarta); Indramayu, Cirebon, Sukabumi, Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur (Jawa Barat); Tegal, Pekalongan (Jawa Tengah), Lamongan, Tulung Agung, Blitar, Tuban, Muncar (Jawa Timur), dan lain-lain. Sedangkan pada perdagangan skala eceran di Pasar Sederhana mayoritas bahan baku berasal dari Pasar Ikan Ciroyom dan sebagian kecil diambil langsung dari kolam pembudidaya ikan.

Distribusi ikan pada perdagangan skala besar di Pasar Ciroyom menyebar ke daerah Bandung dan sekitarnya, seperti: Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut, dan Purwakarta. Sedangkan pada perdagangan skala eceran di Pasar Sederhana mayoritas langsung dibeli oleh konsumen akhir dan

sebagian kecil dibeli oleh tukang sayur untuk diperdagangkan lagi ke konsumen akhir.

Rata-rata total volume ikan yang dibeli oleh pedagang eceran di Pasar Sederhana sebanyak 100 kg per hari dengan rincian 40 kg diambil dari produsen (pembudidaya ikan) dan 60 kg dari pedagang besar (grosir) dengan nilai sebesar Rp. 3.300.000,-/hari. Kemudian dijual kembali dengan selisih antara harga beli dan harga jual sebesar rata-rata Rp. 5.000,- /kg untuk setiap jenis ikan. Struktur biaya yang dikeluarkan dalam aktifitas perdagangan ini antara lain: plastik, air, listrik, upah pegawai, dan bensin.

Berdasarkan informasi dari pengurus Koperasi Pasar Ciroyom sebanyak 120 pedagang ikan skala besar (grosir) terdaftar sebagai anggota aktif. Komoditas ikan yang diperdagangkan meliputi ikan hasil tangkapan laut dan hasil budidaya. Rata-rata total volume ikan yang dibeli dari produsen (kapal/pembudidaya ikan) adalah sebanyak 500 kg per pedagang per malam dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,-. Kemudian dijual kembali dengan selisih antara nilai beli dan nilai jual rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,-. Struktur biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas perdagangan ini antara lain: retribusi (meliputi air, listrik, dan kebersihan), plastik, dan upah pegawai. Struktur biaya usaha perdagangan ikan di Pasar Sederhana dan Pasar Ciroyom terdapat dalam tabel 13.7.

Tabel 13.7 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di Pasar Sederhana dan Pasar Ciroyom (harian)

Satuan: Rp

Parameter	Pasar Sederhana (Eceran)	Pasar Ciroyom (Grosir)
I PENDAPATAN DAN PENERIMAAN		
1 Penerimaan dari berdagang	3.960.000	16.000.000
JUMLAH	**3.960.000**	**16.000.000**
II BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG		
1 Pembelian barang dagangan	3.300.000	15.000.000
2 Biaya transport	50.000	
3 Biaya pembungkusan/pengepakan	40.000	100.000
4 Sewa Lahan		
5 Retribusi pasar		20.000
6 Listrik	30.000	
7 Air	30.000	
8 Es		50.000
9 Upah angkut	140.000	240.000
KEUNTUNGAN	**370.000**	**590.000**
NILAI TAMBAH	**510.000**	**830.000**

13.7 Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Perdagangan ikan sebanyak 5 responden. Responden merupakan bakul ikan yang membeli ikan melalui lelang dan non lelang di TPI Juwana Unit II. Ikan yang dibeli kemudian dijual kembali ke pedagang eceran, pabrik ikan asin dan pemindangan. Untuk lama usaha berdagang bervariasi antara 4 - 28 tahun. Responden yang diperoleh dalam survei ini dikategorikan sebagai pedagang besar.

Komoditas hasil perikanan yang dibeli dan dijual sangat bervariasi berdasarkan musim, namun jenis ikan yang sering dijumpai adalah ikan tongkol, kemaren, lonco, sero, banyar, perkak dan layang. Volume komoditas hasil perikanan yang dibeli oleh pedagang besar rata-rata antara 15 ton - 172 ton per bulan, dengan rata-rata keuntungan pedagang Rp. 1.000,- /kg.

Untuk tempat penyimpanan ikan, responden ada yang sudah memiliki tempat penyimpanan dan ada pula yang menyewa coldstorage untuk ikan segar.

Daerah pemasaran ikan ada yang untuk pedagang eceran lokal dan dikirim ke daerah Rembang, Tegal, Pekalongan, Boyolali, Prigi, Muncar, Bali, Jakarta dan Brondong.

Responden yang diperoleh dalam survey nilai tambah perdagangan garam adalah petani garam yang berada di Desa Ketitang Wetan Juwana, sebanyak 4 responden. Lama berdagang bervariasi antara 17 - 27 tahun. Garam yang dipanen dibedakan menurut kualitasnya yaitu kualitas 1 dan kualitas 2. Selanjutnya garam dijual ke pabrik garam, pedagang ikan asin, dan pabrik es. Garam dijual dalam bentuk garam krosok, briket dan garam meja. Dengan jumlah volume produksi antara 1.200 - 15.000 ton per bulan.

Tabel 13.8 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Garam di Desa Ketitang Wetan, Kec. Batangan (bulanan)

Satuan: Rp

	Parameter	Desa Ketitang Wetan, Kec. Batangan			
		Sampel 1	Sampel 2	Sampel 3	Sampel 4
I	**PENDAPATAN DAN PENERIMAAN**				
1	Penerimaan dari berdagang	1.100.000.000	3.336.666.667	6.750.000.000	456.000.000
2	Komisi	-	1.666.667	-	-
	JUMLAH	**1.100.000.000**	**3.338.333.333**	**6.750.000.000**	**456.000.000**
II	**BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG**				
1	Pembelian barang dagangan	730.000.000	2.590.000.000	4.875.000.000	228.000.000
2	Biaya transport	120.000.000	47.200.000	31.500.000	-
3	Biaya pembungkusan/pengepakan	1.500.000	3.250.000	-	-
4	Biaya pembelian rafia	-	2.250.000	-	-
5	Biaya pembungkusan plastik	-	-	-	14.250.000
6	Sewa Lahan	10.000.000	45.000.000	450.000.000	3.333.333
7	Retribusi pasar				
8	Listrik	-	1.900.000	-	300.000
9	Air				
10	Es				
11	Upah angkut	87.000.000	90.000.000	9.000.000	13.500.000
12	Peralatan		458.333		
13	Gudang	-	-	35.000.000	-
14	Bongkar muat (kuli)	24.000.000	21.000.000	37.800.000	-
15	Pendorong	-	-	750.000.000	-
16	Solar	-	-	-	4.160.000
	KEUNTUNGAN	**127.500.000**	**537.275.000**	**561.700.000**	**192.456.667**
	NILAI TAMBAH	**238.500.000**	**648.275.000**	**608.500.000**	**205.956.667**

Tabel 13.9 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Hasil Perikanan di TPI Juwana Unit II (bulanan)

Satuan: Rp

Parameter	TPI Juwana Unit II				
	Sampel 1	Sampel 2	Sampel 3	Sampel 4	Sampel 5
I PENDAPATAN DAN PENERIMAAN					
1 Penerimaan dari berdagang	1.777.333.333	5.315.625.000	163.000.000	1.455.000.000	750.000.000
2 Komisi	166.666.667	-	-	-	-
JUMLAH	**1.944.000.000**	**5.315.625.000**	**163.000.000**	**1.455.000.000**	**750.000.000**
II BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG					
1 Pembelian barang dagangan	1.505.000.000	4.865.625.000	30.000.000	400.000.000	7.500.000
2 Biaya transport	100.000.000	120.000.000	-	42.600.000	32.300.000
3 Sewa Lahan	100.000.000	-	-	-	-
4 Retribusi pasar	500.000	-	-	-	-
5 Air	35.000.000	90.000.000	-	-	-
6 Upah angkut	26.000.000	3.000.000	-	246.000.000	154.500.000
KEUNTUNGAN	**177.500.000**	**237.000.000**	**133.000.000**	**766.400.000**	**555.700.000**
NILAI TAMBAH	**203.500.000**	**240.000.000**	**133.000.000**	**1.012.400.000**	**710.200.000**

13.8 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Responden yang diperoleh dalam survei nilai tambah perdagangan hasil perikanan di wilayah PPP Tegalsari Tegal Jawa Tengah sebanyak 5 responden dengan rata-rata berdagang 10-20 tahun, semua merupakan pedagang di TPI Tegalsari. Responden yang diperoleh dalam survei ini dikategorikan sebagai pedagang besar.

Seluruh hasil perikananan yang diperdagangkan oleh para pedagang merupakan ikan yang berasal langsung dari kapal yang melakukan bongkar di TPI Tegalsari. Sedangkan rantai selanjutnya, dari para pedagang besar dijual ke pedagang besar lainnya di luar kota atau pedagang besar lainnya, pabrik dan eceran lokal.

Komoditas hasil perikanan yang dibeli dan dijual sangat bervariasi berdasarkan musim, namun yang sering dijumpai adalah tongkol, bawal, kakap, cumi, tenggiri, udang, dan kerapu. Sedangkan volume komoditas hasil perikanan yang dibeli oleh pedagang besar rata-rata sebanyak 3 - 90 ton per bulan, dengan harga beli berkisar antara Rp. 20.000,-/kg – Rp. 70.000,-/kg. Kemudian dijual kembali dengan harga rata-rata berkisar antara Rp. 25.000,-/kg – Rp. 75.000,-/kg. Adapun pasar penjualan ikan dari para pedagang besar/pengepul ini ditujukan kepada pabrik, pedagang besar lainnya di wilayah Jakarta, Bandung, Cirebon, Pemalang, serta pedagang besar dan eceran di wilayah Tegal.

Struktur biaya usaha perdagangan hasil perikanan di TPI Tegalsari Tegal Jawa Tengah secara umum terdiri dari: biaya pembelian barang dagangan, biaya transportasi, plastik untuk packing, tenaga kerja/kuli angkut; dan sewa lapak. Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di TPI Tegalsari, Tegal (bulanan).

Tabel 13.10 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di TPI Tegalsari, Tegal (bulanan)

Satuan: Rp

	Parameter	TPI Tegalsari, Tegal				
		Sampel 1	Sampel 2	Sampel 3	Sampel 4	Sampel 5
I	**PENDAPATAN DAN PENERIMAAN**					
1	Penerimaan dari berdagang	79.500.000	5.400.000.000	4.500.000.000	81.000.000	30.000.000
	JUMLAH	**79.500.000**	**5.400.000.000**	**4.500.000.000**	**81.000.000**	**30.000.000**
II	**BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG**					
1	Pembelian barang dagangan	68.850.000	4.800.000.000	4.050.000.000	70.650.000	26.850.000
2	Biaya transport	600.000	18.000.000	17.100.000	600.000	600.000
3	Biaya pembungkusan/pengepakan	120.000	2.880.000	5.400.000	120.000	120.000
4	Sewa Lahan	21.700	40.000	40.000	21.700	21.700
5	Listrik		87.500	87.500		
6	Es	300.000			300.000	300.000
7	Bongkar muat		540.000	3.420.000		
8	Garam		180.000	1.140.000		
9	Kebersihan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Upah angkut		12.000.000	7.500.000		
	KEUNTUNGAN	**9.578.300**	**566.242.500**	**415.282.500**	**9.278.300**	**2.078.300**
	NILAI TAMBAH	**9.578.300**	**578.242.500**	**422.782.500**	**9.278.300**	**2.078.300**

13.9 Cirebon, Jawa Barat

Ikan yang dijual di Pasar Ikan Desa Karangreja Kabupaten Cirebon merupakan hasil tangkapan nelayan di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tegal, Kabupaten Indramayu dan wilayah sekitarnya, selain itu berasal dari pedagang besar dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Indramayu. Hasil penjualan di Pasar Ikan Desa Karangreja Kabupaten Cirebon didistribusikan baik ke wilayah sekitar Kabupaten Cirebon maupun diluar Kabupaten Cirebon, seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Tegal. Struktur biaya usaha perdagangan ikan di Pasar Karangreja, Kabupaten Cirebon terdapat dalam tabel 13.11.

Tabel 13.11 Struktur Biaya Usaha Perdagangan Ikan di Pasar Karangreja, Kabupaten Cirebon (harian)

Satuan: Rp

	Parameter	Pasar Karangreja, Kab. Cirebon			
		Sampel 1	Sampel 2	Sampel 3	Sampel 4
I	**PENDAPATAN DAN PENERIMAAN**				
1	Penerimaan dari berdagang	7.208.250	6.520.000	7.640.000	7.300.000
	JUMLAH	7.208.250	6.520.000	7.640.000	7.300.000
II	**BIAYA PENGELUARAN UNTUK BERDAGANG**				
1	Pembelian barang dagangan	6.202.417	6.130.000	6.840.000	6.360.000
2	Biaya transport	50.000	10.000	30.000	30.000
3	Biaya pembungkusan/pengepakan	300	200	500	500
	-. Beli plastik	300	200	500	500
4	Sewa Lahan	500	500	500	500
5	Retribusi pasar	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Listrik	500	500	500	500
7	Air	500	500	500	500
8	Es	600	600	600	600
9	Upah angkut	500	500	600	400
	KEUNTUNGAN	**947.933**	**372.200**	**761.800**	**902.000**
	NILAI TAMBAH	**948.433**	**372.700**	**762.400**	**902.400**

Kesimpulan 14

Kesimpulan 14

Hasil Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2015 ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian PDB Perikanan pada triwulan III-2015 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 73,36 triliun meningkat 5,90 persen dibanding triwulan II-2015 sebesar Rp 69,27 triliun. Sedangkan PDB Perikanan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 50,12 triliun di triwulan II-2015 dan meningkat di triwulan III-2015 sebesar 2,99 persen menjadi Rp 51,62 triliun. PDB Perikanan sampai dengan triwulan III-2015 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 209,60 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 150,51 triliun rupiah.

2. Pertumbuhan PDB Perikanan pada triwulan III-2015 sebesar 8,37 persen relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan PDB Nasional pada periode yang sama yaitu hanya sebesar 4,73 persen. Laju pertumbuhan perikanan yang terjadi di triwulan III-2015 disebabkan oleh kenaikan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya hingga triwulan III-2015. Untuk produksi tangkap mencapai angka sebesar 4,72 juta ton atau naik sebesar 5,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan produksi perikanan budidaya mencapai produksi sebesar 10,07 juta ton atau meningkat sebesar 3,98 persen.

3. Sepanjang tahun 2015, rata-rata NTN Nasional dari kegiatan perikanan tangkap adalah sebesar 106,14 dengan IT sebesar 127,17 dan IB sebesar 119,80. Terdapat 2 provinsi yang memiliki rata-rata NTN kurang dari 100, yaitu Provinsi Sumatera Selatan (96,16), dan Aceh (99,97). Sementara itu, rata-rata NTPI Nasional dari kegiatan perikanan budidaya adalah sebesar 99,66 dengan IT sebesar 117,75 dan IB sebesar 118,15. Terdapat 11 provinsi dengan rata-rata NTPI lebih dari 100, yaitu Jawa Tengah (100,22), Sumatera Selatan (101,02), Sulawesi Selatan (102,08), Riau (102,42), Kalimantan Selatan (102,66), Jawa Timur (104,94), DIY (105,29), Sumatera Barat (108,22), Kepulauan Riau (108,44), Maluku (108,81), dan Maluku Utara (109,19).

4. Kenaikan harga sangat mempengaruhi pergerakan NTN/NTPI, kenaikan harga komoditas hasil produksi tidak akan menaikkan NTN/NTPI jika komoditas barang modal produksi dan konsumsi rumah tangga nelayan/pembudidaya mengalami kenaikan harga lebih tinggi. Faktor penyebab kenaikan harga komoditas konsumsi rumah tangga (bahan makanan, perumahan, makanan jadi, sandang, kesehatan, transportasi dan komunikasi, dan pendidikan) merupakan di luar kendali Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan pengendalian kuantitas dan kualitas produksi serta sarana dan prasarana produksi bagi nelayan/pembudidaya ikan akan sangat membantu dalam peningkatan NTN.

5. Produksi perikanan Indonesia hingga triwulan III tahun 2015 (angka sementara) mencapai 14,79 juta ton. Produksi tersebut merupakan kontribusi dari produksi perikanan tangkap mencapai 4,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 10,07 juta ton. Produksi perikanan tangkap dihasilkan dari produksi perikanan tangkap di laut mencapai 4,39 juta ton dan produksi perikanan tangkap di perairan umum mencapai 325 ribu ton.

6. Produksi perikanan Indonesia tahun 2014 mencapai 20,84 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,42 juta ton atau meningkat sebesar 7,35 persen dibandingkan tahun 2013. *Trend* produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2010 dengan kenaikan rata-rata tahun 2010-2014 sebesar 15,80 persen, rata-rata produksi perikanan sebesar 16,21 juta ton dan standar deviasi 3,86 juta ton. Melalui 95persen *Confident Interval* (CI) produksi perikanan tahun 2010-2014 berada diantara 11,42 juta - 21,0 juta ton, artinya produksi perikanan Indonesia tahun 2010-2014 mengalami kenaikan yang stabil karena masih berada dalam interval tersebut.

7. Produksi tambak garam rakyat tahun 2015 adalah sebanyak 2,08 juta ton yang dihasilkan dari 44 kabupaten/kota PUGAR dengan total luas tambak dan produktivitas masing-masing mencapai 25.766 hektar dan 84,20 ton/hektar. Berdasarkan lokasi kabupaten/kota PUGAR tahun 2015, maka produksi garam tertinggi terdapat di Kabupaten Cirebon yaitu 438 ribu ton (3.858 hektar), sedangkan produksi terendah ada di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan volume sebesar 315,10 ton (17,00 hektar).

8. Rata-rata NTPG tahun 2015 sampai dengan triwulan III adalah 100,42 dengan It 105,02 dan Ib 104,58 yang berarti bahwa petambak garam masih mengalami surplus dari hasil usahanya. Dilihat dari It maka harga garam baik tambak maupun rebusan naik 5,02 persen dibandingkan dengan tahun dasar, begitu juga dengan Ib yang menunjukkan bahwa harga komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi petambak garam mengalami kenaikan 4,58 persen. Kenaikan harga produksi garam diikuti oleh naiknya harga-harga barang yang dibeli petambak garam, namun perbedaan kenaikan harga produksi garam yang sedikit lebih besar dari barang dan jasa untuk konsumsi membuat petambak garam tetap mendapatkan kelebihan dari hasil usahanya.

9. Penyediaan konsumsi ikan untuk konsumsi domestik tahun 2014 mencapai 13,07 juta ton atau meningkat sebesar 10,01 persen dibandingkan tahun 2013. Peningkatan penyediaan ikan diikuti juga dengan peningkatan penyediaan ikan per kapita yang mencapai 51,80 Kg/Kap/Tahun atau meningkat sebesar 8,44 persen dibandingkan tahun 2013. Tren penyediaan ikan untuk konsumsi tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan sebesar 9,50 persen, rata-rata penyediaan ikan sebesar 11,18 juta ton, standard deviasi sebesar 1,52 juta ton, dan 95 persen *Confidence Interval* (CI) antara 9,29 juta – 13,08 juta ton.

10. Nilai ekspor hasil perikanan sampai bulan Oktober tahun 2015 mencapai US$ 3,27 milyar, dengan kontribusi terbesar komoditas udang sebesar US$ 1,37 milyar (41,87 persen), tuna, tongkol, cakalang sebesar US$ 492 juta (15,03 persen), dan kepiting sebesar US$ 266 juta (8,12 persen).

11. Pada tahun 2015 jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan tertinggi adalah sebanyak 2 (dua) kasus per negara mitra lebih sedikit jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yaitu sebanyak 4 (empat) kasus per negara mitra.

12. Peningkatan jaminan kualitas mutu produk perikanan dan keamanan hasil perikanan (*quality assurance* dan *food safety*) dapat memacu volume dan nilai ekspor hasil perikanan di manca negara. Jaminan kualitas pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi merupakan hal kunci untuk mempermudah akses pasar produk perikanan, disamping pengendalian impor juga tetap harus diterapkan.

13. Harmonisasi terhadap sistem jaminan mutu produk hasil perikanan Indonesia dikembangkan mengikuti negara mitra sebagai tujuan ekspor. Selain itu penguatan kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, metode uji termasuk peralatan yang digunakan juga menjadi suatu keharusan.

14. Total kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2015 sebesar 17,3 juta hektar, dengan rincian 32 kawasan (4,7 juta hektar)

dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan 122 kawasan (12,6 juta hektar) dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah. Penambahan luas kawasan konservasi yang masuk sampai bulan Oktober tahun 2015 mencapai 852 ribu hektar dengan lokasi kawasan berada di 10 Kabupaten/Kota yaitu: Kotawaringin Barat, Tambrauw, Banggai Laut, Buton, Minahasa, Nias Utara, Lingga, Muna, Kolaka Utara, dan Gorontalo Utara.

15. Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola pada tahun 2015 adalah sebanyak 20 pulau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,52 persen per tahun pada 2010-2015.

16. *IUU fishing* merupakan isu yang paling kompleks penanganannya dan dampak yang diakibatkannya berskala regional dan global, sehingga menjadi kegiatan prioritas dalam lingkup program pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pada tahun 2015 gelar operasi rutin pengawasan SDKP di WPP-NRI dilakukan oleh 27 unit Kapal Pengawas SDKP dengan jumlah hari operasi sebanyak 7.283 hari, naik 235,16 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah kapal yang diperiksa naik 231,80 persen menjadi 6.782 kapal (62 KIA dan 6.720 KII), sedangkan jumlah kapal yang ditangkap naik 184,21 persen menjadi 108 kapal (48 unit KII dan 60 unit KIA) dari tahun sebelumnya.

17. Upaya pemberantasan IUU fishing di Indonesia terus diupayakan dengan strategi melakukan pendekatan secara soft structure dan hard structure. Pada tahun 2015, KKP bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya telah menenggelamkan 121 kapal pelaku illegal fishing yang terdiri dari 10 KII dan 111 KIA. Hal ini perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku *IUU fishing*.

18. Survei nilai tambah perdagangan komoditas kelautan dan perikanan dilakukan pada beberapa lokasi meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Sampang dengan tujuan untuk melihat selisih antara margin perdagangan dengan

struktur ongkos yang dikeluarkan pada proses tersebut. Disimpulkan bahwa struktur nilai tambah perdagangan pada 5 lokasi tersebut berbeda sesuai dengan karakteristik kewilayahan.

Penutup 15

Penutup 15

Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk penetapan kebijakan (*Decision Support System*) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan dapat menyumbangkan gagasan dan pemikiran tentang arah dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan kedepan secara lebih luas dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014, Jakarta, 2015

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, Jakartam 2015

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi Tahun 2013, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2014

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Statistik Perikanan Tangkap di Laut menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2014

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Tahun 2012, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2013

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2013, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2014

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2012, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2013

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Peta Sentra Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2013, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2014

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Peta Sentra Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2012, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2013

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Modul Penghitungan Angka Konsumsi Ikan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Jakarta, 2010

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2013, Laporan Akhir Pendataan Garam Tahun 2013 Kerjasama KKP dan BPS, Jakarta

Badan Informasi Geospasial, 2013, Pemetaan Lahan Garam Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, Jakarta

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, 2011, Laporan Kebijakan Harga Garam Nasional, Jakarta

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Rencana Aksi Nasional 2012 – 2016, Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, Jakarta, 2012

Directorate General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources, RPOA (Regional Plan of Action) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in The Southeast Asia Region, Activities 2011-2013, Jakarta

Directorate General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources, Report to the Committee on Fisheries (COFI) of The UN Food and Agriculture Organisation, Jakarta

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Buku Refleksi 2014 dan Outlook 2015 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Warta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Edisi X-Tahun 2015, Jakarta, 2015

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Statistik Ekspor Impor Hasil Perikanan Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Jakarta, 2015

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Statistik Ekspor Impor Hasil Perikanan Tahun 2013, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Jakarta, 2014

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Statistik Ekspor Impor Hasil Perikanan Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Jakarta, 2013

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Statistik Ekspor Impor Hasil Perikanan Tahun 2011, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Jakarta, 2012

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Statistik Ekspor Impor Hasil Perikanan Tahun 2010, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Jakarta, 2011

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Statistik Ekspor Impor Hasil Perikanan Tahun 2009, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Jakarta, 2010

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Refleksi 2014 Outlook 2015 Pembangunan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta, 2014

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Keputusan Dirjen KP3K Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K), Jakarta, 2012

Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik BPS No. 83/11/Th.XVII, 5 November 2014, Jakarta, 2014

Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik, Data PDB Triwulanan 2014 (Triwulan III), Jakarta, 2014

Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Publikasi Analisis Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2013

Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Data Capaian IKU 2010-2013 dan Target 2014, Jakarta, 2014

Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Produk Domestik Bruto Satelite Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, Kerja sama BPS dan KKP, Jakarta, 2015

Pusat Data, Statistik dan Informasi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2015

9 772502 592000